

**DETERMINAN EFEKTIVITAS AUDIT INTERNAL DAN PENCEGAHAN
KORUPSI: STUDI EMPIRIS PADA INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN AGAMA RI**

T E S I S

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Magister**



Oleh :

**IKA SHOHIHAH
156020304111015**

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG 2017**

T E S I S


DETERMINAN EFEKTIFITAS AUDIT INTERNAL DAN PENCEGAHAN KORUPSI: STUDI EMPIRIS PADA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA RI

Oleh :

IKA SHOHIHAH
156020304111015


Dipertahankan didepan penguji
pada tanggal : **29 Desember 2017**
dan dinyatakan memenuhi syarat

Komisi Pembimbing,


Ali Djamhuri, SE., M.Com., Ak., Ph.D
Ketua


Dr. Lilik Purwanti, M.Si., Ak
Anggota

Mengetahui,
a/n. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya
Ketua Program Magister Akuntansi


Dr. Erwin Saraswati, Ak., CPMA., CSRA, CA
NIP. 19600124 198601 2 001

LEMBAR IDENTITAS KOMISI PEMBIMBING DAN PENGUJI

Judul : DETERMINAN EFEKTIFITAS AUDIT INTERNAL
DAN PENCEGAHAN KORUPSI: STUDI EMPIRIS
PADA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN
AGAMA RI

Nama Mahasiswa : IKA SHOHIHAH

Program Studi : AKUNTANSI

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing 1 : Ali Djamhuri, SE., M.Com., Ak., Ph.D

Pembimbing 2 : Dr. Lilik Purwanti, M.Si., Ak

TIM PENGUJI

Dosen Penguji 1 : Nurkholis, SE., M.Buss., Ak., Ph.D

Dosen Penguji 2 : Dr. Aji Dedi Mulawarman, SP., MSA.

Tanggal Ujian : 29 Desember 2017

a.n Dekan

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Erwin Saraswati, Ak., CPMA., CSRA, CA
NIP. 19600124 198601 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah TESIS dengan judul:

"DETERMINAN EFEKTIFITAS AUDIT INTERNAL DAN PENCEGAHAN KORUPSI: STUDI EMPIRIS PADA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA RI"

Tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (UU NO. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 29 Desember 2017

Mahasiswa,



Nama : IKA SHOHIHAH
NIM : 156020304111015
PS : MAGISTER AKUNTANSI
PPS FEB UB

RIWAYAT HIDUP

Ika Shohihah, Lahir di Cirebon, 15 Pebruari 1974, anak dari pasangan Bapak HMS Hidayat (Alm) dan Ibu Hj. Sutikah (Almrh) Menikah dengan Fajar Nugraha, SE, MM pada tahun 1998 dan telah dikaruniai dua orang anak: Mushthafainal Akhyar Ramadhan (19 tahun) dan Karima Tamara (16 Tahun).

Ika Shohihah menyelesaikan pendidikan formal di MI Assuniyah tahun 1985, SMPN Losari Cirebon tahun 1988, dan SMA Negeri 2 Cirebon tahun 1991. S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 1996, dan tahun 2015 sampai sekarang melanjutkan studi pada Program Magister Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

Malang, 29 Desember 2017

Peneliti



Kudedikasikan kepada:

Kedua orang tua yang telah mendahului menghadap Allah SWT

Bapak dan Ibu mertua yang selalu mendoakan keberhasilan dan kebahagiaan

Kakak dan Adik di Cirebon dan di Jakarta yang selalu mendukung dan mendoakan

Suami dan Kedua Anakku tercinta: Akhyar & Rima

Serta orang-orang yang membuat hidupku lebih bermakna dan bahagia



UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Rektor, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Ketua Program Magister Akuntansi Universitas Brawijaya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk berkelana dalam pencarian ilmu di program Magister Akuntansi ini,
- Ali Djamhuri, SE., M.Com., Ak., Ph.D dan Dr. Lilik Purwanti, M.Si., Ak selaku tim pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada peneliti sehingga dapat menghasilkan sebuah karya tulis, sekaligus telah banyak mengajarkan ilmu hidup sehingga peneliti dapat lebih memahami arti proses perjalanan kehidupan,
- Nurcholis, SE., M.Buss., Ak., Ph.D dan Dr. Aji Dedi Mulawarman, SP., MSA. selaku tim penguji yang telah memberikan masukan demi penyempurnaan tesis ini,
- Bapak dan Ibu Auditor terutama kepada Mas Darori di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam melakukan penelitian,
- Rekan-rekan Program Magister Akuntansi Kelas A : Darori, Tsani, Samsul, Mimin, Itus, Regga, Yuyut, Dedy, Lusi, Dina, Sandi serta kawan-kawan kelas B yang telah banyak memberikan semangat kepada peneliti selama menjalani masa studi,
- Teriring doa peneliti haturkan untuk Ibunda dan Ayahanda tercinta yang telah wafat semoga Allah SWT memberikan tempat yang terbaik disisiNya,
- Terima kasih yang mendalam peneliti haturkan kepada Bapak dan Ibu Mertua, atas dorongan dan doa yang kuat sehingga peneliti senantiasa diberikan kemudahan dalam menyelesaikan studi ini,
- Terima kasih yang tulus peneliti ucapkan kepada Kakak-kakak dan Adik yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada peneliti untuk menyelesaikan studi ini,
- Ucapan terima kasih secara khusus peneliti sampaikan kepada suami tercinta Fajar Nugraha, SE, MM yang telah mendukung peneliti untuk melanjutkan studi dan senantiasa memberikan motivasi agar peneliti dapat menyelesaikan studi, serta anak-anakku yang tersayang Mushthafainal Akhyar Ramadhan dan Karima Tamara yang senantiasa mendoakan Ibunya agar Allah SWT memberikan kesehatan dan kekuatan untuk menyelesaikan studi ini,

Atas jasa-jasa mereka, peneliti tidak dapat memberikan imbalan yang setimpal, hanya doa yang dapat peneliti panjatkan kepada Allah SWT, semoga mereka semua senantiasa diberi kesehatan, panjang umur, dan kemudahan segala urusan. *Amin yaa Rabbal alamin.*

Malang, 29 Desember 2017

Peneliti

ABSTRAK

Ika Shohiah, Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, 29 Desember 2017. Determinan Efektifitas Audit Internal Dan Pencegahan Korupsi: Studi Empiris Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI.

Komisi Pembimbing, Ketua: Ali Djamhuri dan Anggota Komisi: Lilik Purwanti.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi auditor internal, independensi organisasi audit internal, hubungan antara auditor internal dan eksternal, dan dukungan manajemen terhadap efektivitas audit internal serta pengaruhnya efektivitas audit internal terhadap korupsi di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI dengan jumlah sampel 152 responden. Metode analisis menggunakan SEM-PLS. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat pengaruh kompetensi auditor internal, independensi organisasi audit internal, hubungan antara auditor internal dan eksternal, dan dukungan manajemen terhadap efektivitas audit internal. Penelitian ini membuktikan bahwa efektivitas audit internal cenderung dapat menurunkan korupsi. Selain itu, penelitian ini juga mendukung Inspektorat Jenderal Kemenag sebagai bagian dari tata kelola organisasi Kemenag dapat membantu memerangi korupsi.

Kata Kunci: efektivitas audit internal, korupsi

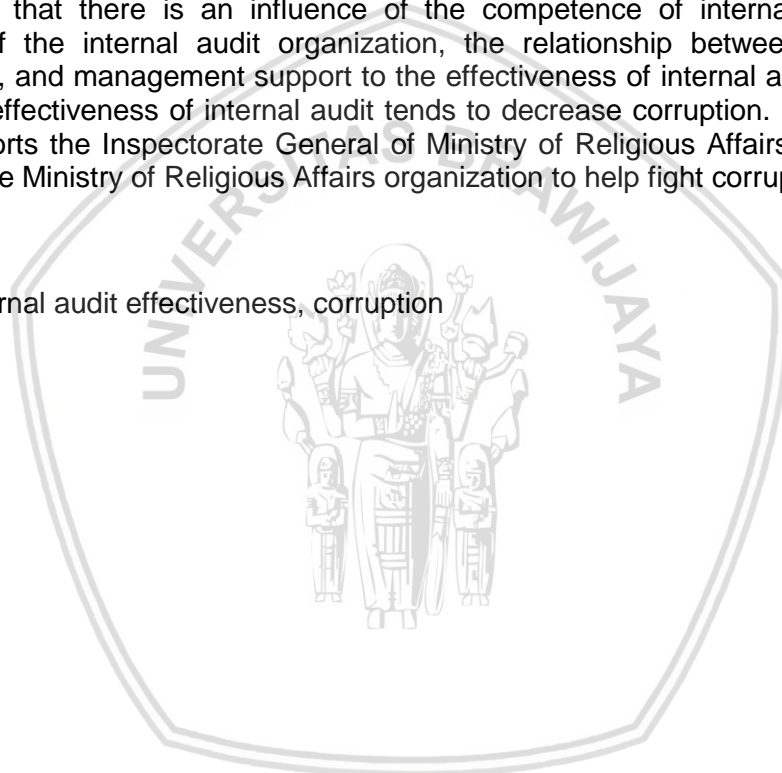


ABSTRACT

Ika Shohiah, Master of Accounting Program Faculty of Economics and Business Universitas Brawijaya Malang, December 29, 2017. Determinan Effectiveness Internal Audit And Prevention Of Corruption: Empirical Study At Inspektorat General Ministry of Religious Affairs. Advisors: Ali Djamhuri and Lilik Purwanti.

This study aims to examine the influence of the competence of internal auditors, the independence of the internal audit organization, the relationship between internal and external auditors, and management support to the effectiveness of internal audit and the effect of effectiveness of internal audit on corruption in Inspectorate General of Ministry of Religious Affairs RI with 152 respondents. Analysis method using SEM-PLS. The results of the study found that there is an influence of the competence of internal auditors, the independence of the internal audit organization, the relationship between internal and external auditors, and management support to the effectiveness of internal audit. This study proves that the effectiveness of internal audit tends to decrease corruption. In addition, this study also supports the Inspectorate General of Ministry of Religious Affairs as part of the governance of the Ministry of Religious Affairs organization to help fight corruption.

Keywords: internal audit effectiveness, corruption



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiim, Subhanallah, Walhamdulillah, Walailahaillallah Wallahuakbar. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Mu peneliti dapat menyajikan tulisan tesis yang berjudul: *Determinan Efektifitas Audit Internal Dan Pencegahan Korupsi: Studi Empiris Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI.*

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, penuntun umat dan penerang dalam gulita, semoga mendapat syafaat beliau kelak di hari akhir.

Di dalam tulisan ini, disajikan pokok-pokok bahasan yang meliputi: Bab I yang menyajikan latar belakang, motivasi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian. Bab II menyajikan tentang Tinjauan Pustaka. Bab III menyajikan Kerangka Konseptual Penelitian. Bab IV menyajikan Metode Penelitian, Bab V menyajikan Hasil Dan Pembahasan. Bab VI menyajikan sesi penutup yang meliputi simpulan, implikasi keterbatasan, serta saran penelitian.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki peneliti dalam menyusun tesis ini, walaupun telah dikerahkan segala kemampuan untuk lebih teliti, tetapi masih dirasakan banyak kekurangtepatan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran yang membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Malang, 29 Desember 2017

Peneliti

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi di berbagai aspek kehidupan telah membangkitkan kesadaran masyarakat, penyelenggara negara, dan pemerintah tentang perlunya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Reformasi bidang keuangan negara ditandai dengan terbitnya paket tiga UU bidang keuangan negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiga UU tersebut telah memberikan landasan yang kokoh dalam pengelolaan keuangan negara beserta peraturan negara yang mengikutinya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut kini menjadi acuan sekaligus energi dalam melaksanakan manajemen keuangan negara khususnya di bidang pelaksanaan anggaran, pencatatan, dan pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.

Pada dasarnya, pembaharuan tentang pengelolaan keuangan negara bertujuan untuk menghilangkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara yang terjadi selama ini, namun tampaknya tujuan tersebut masih belum tercapai (Kayo, 2013:1). Hal ini terbukti dengan masih banyaknya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara yang berindikasi tindak pidana korupsi. Terungkapnya berbagai kasus korupsi di Indonesia membuat negeri ini menjadi

salah satu negara terkorup di dunia. Berdasarkan hasil survey *Transparency International* (TI), pada tahun 2016 rangking CPI (*Corruption Perception Index*)¹ Indonesia berada di peringkat 90 dari 176 negara yang disurvei dengan skor 37 (rendah) yang berarti cenderung korup. Skor menunjukkan tingkat korupsi suatu negara, pada skala 0 (sangat korup) sampai 100 (sangat bersih). Negara ASEAN seperti Singapura jauh berada di peringkat 7. Sementara Malaysia berada di peringkat ke-55 dan Brunei Darussalam peringkat ke-41. Rangking Indonesia tahun 2016 ini lebih buruk dibandingkan tahun 2015. Pada tahun 2015 Indonesia menempati peringkat ke-88 dari 168 negara (Tabel 1.1). Sementara itu, rangking CPI Indonesia di lingkungan negara-negara ASEAN pada tahun 2016 menempati posisi 4 dibawah Singapura (1), Brunei Darussalam (2), dan Malaysia (3). Rangking 2016 ini masih pada posisi yang sama dengan tahun 2014 dan 2015 (Tabel 1.1).

Tabel 1.1
Rangking CPI Indonesia

Negara	2016			2015		2014	
	Regional	Global	Score	Regional	Global	Regional	Global
Singapura	1	7	84	1	8	1	7
Brunei*	2	41	58	-	-	-	-
Malaysia	3	55	49	2	54	2	50
Indonesia	4	90	37	4	88	4	107
Filipina	5	101	35	5	95	3	85
Thailand	5	101	35	3	76	3	85
Vietnam	6	113	33	6	112	5	119
Laos	7	123	30	7	139	6	145
Myanmar	8	136	28	8	147	7	156
Kamboja	9	156	21	9	150	7	156

*tidak ada data yang tersedia untuk tahun 2015 dan 2014

Sumber: www.transparency.org

¹ CPI memeringkat negara-negara berdasarkan survei persepsi atas korupsi di sektor publik meliputi pertanyaan tentang suap kepada pegawai negeri atau pejabat negara, korupsi *kick back* pada pengadaan barang dan jasa, penyalagunaan atau penggelapan dana publik, dan kekuatan dan keefektifan upaya pemberantasan korupsi di sektor publik.

Sumber yang lain menunjukkan data tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menunjukkan situasi yang memprihatinkan. KPK merilis data tentang penanganan korupsi lima tahun terakhir yaitu tahun 2012-2016 dan menyampaikan data bahwa kementerian/lembaga menempati posisi teratas dalam hal jumlah kasus korupsi yang ditangani KPK dengan 150 kasus, disusul oleh pemerintah kabupaten/kota sebanyak 78 kasus, serta pemerintah provinsi sebanyak 59 kasus (Tabel 1.2).

Tabel 1.2
Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi (2012-2016)

Instansi	2012	2013	2014	2015	2016	Jumlah
DPR/DPRD	6	2	2	3	15	28
Kementerian/Lembaga	18	46	26	21	39	150
BUMN/BUMD	1	0	0	5	11	17
Pemerintah Provinsi	13	4	11	18	13	59
Pemkab/Pemkot	10	18	19	10	21	78

Sumber: <http://acch.kpk.go.id>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud korupsi mencakup perbuatan melawan hukum, memperkaya diri, orang atau badan lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Korupsi adalah salah satu bentuk *fraud* seperti yang disebutkan *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), selain penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*) dan manipulasi laporan keuangan (*fraudulent financial report/financial statement fraud*). Penulis lain telah memperluas definisi korupsi sehingga mencakup penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi (Sandholtz dan Koetzle, 2000). Menurut Asiedu dan Deffor (2017) korupsi di instansi pemerintah berkisar dari suap kecil-kecilan kepada pejabat pemerintah yang melihat pelanggaran terhadap peraturan

perundang-undangan sampai korupsi berskala besar seperti pemberian kontrak untuk proyek.

Mengurai persoalan korupsi di Indonesia tentu bukanlah persoalan yang mudah. Upaya penegakan hukum telah dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI pada pelaku tindak pidana korupsi. Ironisnya upaya tersebut tampaknya belum mampu meredam praktik tindak pidana korupsi di banyak instansi pemerintah. Pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui penindakan dan pencegahan. Tindakan penegakan hukum pasca terjadinya korupsi perlu diimbangi dengan upaya pencegahan korupsi yang serius dan kerja sama dari semua pihak. Irianto (2015) mengungkapkan bahwa dalam penanganan korupsi, mencegah terjadinya tindak pidana korupsi jauh lebih baik daripada menindak pelaku korupsi. Hal ini karena pencegahan korupsi memerlukan biaya, waktu dan tenaga yang lebih sedikit, dan hasil yang dicapai lebih optimal dibandingkan dengan kegiatan penindakan (Kuntadi, 2015:160-161). Sinergi kedua upaya tersebut akan menghasilkan *deterrence effect* dan dampak yang besar/jangka panjang.

Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan memperkuat fungsi lembaga pengawasan baik eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) maupun internal (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Hasil studi yang dilakukan oleh Halbouni (2015) mengkonfirmasi bahwa auditor internal lebih memperhatikan tanggung jawab mereka terkait pelaporan terjadinya kecurangan di organisasi dibandingkan auditor eksternal. Menurut Salameh, *et al.* (2011) auditor internal memiliki pengalaman lebih dibandingkan auditor eksternal dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan (secara spesifik: korupsi) di organisasi. Auditor internal mempunyai pengetahuan mendalam tentang budaya, kebijakan dan prosedur organisasi dibandingkan auditor eksternal. Hal ini menyebabkan auditor

internal pada umumnya lebih paham mengenai kecurangan yang mungkin terjadi di organisasi (Kuntadi, 2015:141).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Coram, *et al.* (2008) menegaskan bahwa organisasi yang memiliki fungsi audit internal yang efektif cenderung lebih baik dibandingkan organisasi yang tidak memiliki fungsi tersebut, terlebih untuk pendeteksian dan pencegahan terhadap kecurangan. Hasil kajian yang lain, seperti dari Labuschangne dan Els (2006), Omar dan Bakar (2012), Adetos, *et al.* (2013), dan Othman, *et al.* (2015) juga mengungkapkan bahwa fungsi audit internal keberadaannya relatif strategis karena dapat mendeteksi adanya risiko kecurangan yang mungkin terjadi di organisasi. Selain sumber-sumber tersebut, kita juga dapat menemukan dari sumber lain seperti hasil survei ACFE 2014 yang dikutip Irianto (2015) memberikan gambaran tentang bagaimana akuntan dapat menjalankan perannya dalam deteksi dini kecurangan melalui audit internal yang efektif.

Kementerian Agama memiliki posisi tidak sekedar sebagai lembaga birokrasi yang menjalankan fungsi legislator, administrator, dan fasilitator pembangunan bidang agama, juga merupakan institusi moral yang notabene menjadi barometer moralitas institusi yang lain (Renstra Kemenag RI, 2015-2019:97) ternyata tidak luput dari kasus korupsi. Ekspektasi masyarakat yang kerap menilai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama mempunyai keunggulan religiusitas dibandingkan ASN instansi lain ternoda oleh adanya ASN yang terlibat kasus korupsi. Beberapa kasus korupsi yang menarik perhatian publik adalah kasus korupsi proyek pengadaan Al Qur'an tahun anggaran 2011 dan 2012. Kasus ini melibatkan Ahmad Jauhari yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama yang merugikan keuangan negara sekitar 27 Milyar dan telah divonis 10 tahun penjara pada 24 Agustus 2015 (<https://www.kpk.go.id/>

diakses 23 Mei 2017). Kasus lainnya adalah korupsi oleh Suryadharma Ali (Mantan Menteri Agama RI) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan haji tahun 2010-2011 dan tahun 2012-2013 telah divonis 6 tahun penjara pada 10 April 2014 (<https://www.rappler.com/indonesia/> diakses 23 Mei 2017). Selain itu, data Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama tahun 2016 menunjukkan bahwa masih ada 340 (tiga ratus empat puluh) temuan berupa pelanggaran dan penyimpangan yang memerlukan rekomendasi tindak lanjut terjadi di tingkat satuan kerja nasional. Hasil temuan tahun 2016 ini lebih banyak dibandingkan tahun 2015 (170 temuan). Terjadinya fenomena tersebut ditengarai karena pengawasan internal yang dilakukan oleh APIP belum berjalan dengan baik dan tujuan audit internal di Kementerian Agama belum tercapai atau belum efektif.

Efektivitas audit internal terletak pada kemampuan auditor dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan atau ditetapkan sehingga dapat meningkatkan operasi organisasi (Mardiasmo, 2009:182; Dittenhofer, 2001). Menurut Alzeban dan Gwillian (2014) efektivitas audit internal dapat diukur dengan didasarkan pada aspek-aspek dari fungsi audit internal untuk: merencanakan, meningkatkan produktivitas organisasi, menilai konsistensi antara hasil dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, mengimplementasikan rekomendasi audit, mengevaluasi dan meningkatkan manajemen risiko, mengevaluasi sistem pengendalian internal, serta memberikan rekomendasi perbaikan. Sementara itu, Ahmad, *et al.* (2009) menggunakan fungsi efektivitas audit internal untuk menyakinkan *stakeholder* atas transparansi, integritas, kualitas dan peningkatan pelayanan audit.

Saat ini menurut Cohen dan Sayag (2010), efektivitas audit internal sudah menjadi alat yang wajib untuk mencapai pengendalian yang efektif pada organisasi publik dan organisasi privat. Pengendalian ini bertujuan untuk melihat

apakah tujuan dari sebuah organisasi sudah terpenuhi yaitu mencapai tata kelola organisasi yang baik (Lenz, 2013) termasuk di dalamnya mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi oleh organisasi (Ramachandran, *et al.*, 2012). Salah satunya adalah risiko korupsi yang mungkin terjadi di organisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Asiedu dan Deffor (2017) menemukan bahwa efektivitas audit internal berpengaruh terhadap korupsi di sektor publik Ghana. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas audit internal dapat mendeteksi adanya praktik korupsi lebih awal sehingga auditor internal dapat melakukan upaya pencegahan. Namun, korupsi tidak mungkin sepenuhnya dapat hilang (Ackerman, 1997; Kuntadi, 2015:94).

Teori kontinjensi mampu menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih (Badara dan Saidin, 2014), misalnya saja dalam area *auditing*. Efektivitas audit internal tidak akan tercapai jika tidak ada faktor-faktor yang mendukungnya. Banyak faktor yang mungkin berpengaruh terhadap efektivitas audit internal. Beberapa peneliti telah mengkaji faktor kompetensi auditor internal, di antaranya: kompetensi berupa keterampilan, pengalaman, pengetahuan teknis dan *behavior skill* audit (Ahmad, *et al.*, 2009; Arena dan Azzone, 2009b; Alzeban dan Gwilliam, 2014; Baharud-din, *et al.*, 2014). Dalam penelitian-penelitian tersebut ditemukan adanya hubungan yang positif antara kompetensi auditor terhadap efektivitas audit internal. Penelitian yang dilakukan oleh Brierley, *et al.* (2001) menemukan penyebab kegagalan audit internal di sektor publik Sudan yang di antaranya adalah karena rendahnya tingkat pelatihan dan keahlian staf audit.

Beberapa tahun terakhir ruang lingkup audit internal telah berkembang pesat. Dalam praktiknya di masa mendatang profesi auditor internal harus menata ulang kemampuan dan kompetensinya untuk dapat memiliki berbagai pengetahuan dan keterampilan agar dapat melakukan audit di luar kegiatan audit keuangan (D'Silva dan Ridley, 2007). Pengetahuan auditor dapat berupa

pemahaman lebih mengenai pengendalian, manajemen risiko dan proses tata kelola organisasi pada tingkat operasional dan strategis. Hal tersebut akan meningkatkan efektivitas organisasi atas audit internal dalam rangka melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi yang mungkin terjadi di organisasi. Dalam jangka panjang hal ini diharapkan dapat mengurangi terjadinya praktik korupsi.

Faktor lain yang mungkin juga berpengaruh terhadap efektivitas audit internal adalah independensi organisasi audit internal. Independensi menjadi faktor yang banyak diteliti, di antaranya oleh Al-Twaijry, *et al.* (2003), Mihret, *et al.* (2010), Cohen dan Sayag (2010), Alzeban dan Gwilliam (2014), serta Baharud-din, *et al.* (2014) yang seluruhnya menyatakan bahwa independensi mempunyai pengaruh terhadap efektivitas audit internal. Independensi menjadi salah satu variabel yang mempunyai hubungan positif dan dapat menambah nilai organisasi dengan menjaga netralitas dalam aktivitas audit (D'Onza, *et al.*, 2015).

Menurut Alzeban dan Gwilliam (2014), meningkatkan kapasitas auditor internal pemerintah adalah penting agar dapat melaksanakan tugas pemeriksaan secara mandiri dan objektif. Hasil penelitian lainnya dari Alzeban dan Gwilliam (2014) menunjukkan bahwa independensi organisasi audit internal pemerintah antara lain terkait kemudahan akses untuk mendapatkan data dan informasi dari auditi. Hal ini berarti bahwa proses audit internal menjadi lebih baik karena jika ada risiko kecurangan yang mungkin terjadi di organisasi dapat segera diketahui.

Faktor lain yang ditengarai berpengaruh terhadap efektivitas audit internal adalah hubungan antara auditor internal dan eksternal. Hal tersebut ditunjukkan oleh penelitian Alzeban dan Gwilliam (2014) yang mengungkapkan bahwa hubungan antara auditor internal dan eksternal berpengaruh pada efektivitas audit internal. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kerja sama antara

auditor internal dan eksternal yang tepat akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas audit dan membantu manajemen memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Tidak adanya kerja sama antara auditor internal dan eksternal diidentifikasi sebagai faktor yang memengaruhi kualitas audit sektor publik di negara-negara berkembang (Brierley, *et al.*, 2001).

Faktor lain yang tidak kalah penting yang dapat memengaruhi efektivitas audit internal adalah dukungan manajemen. Menurut Cohen dan Sayag (2010), Alzeban dan Gwilliam (2014), dan Baharud-din, *et al.* (2014) dukungan manajemen menjadi faktor yang dominan dalam memengaruhi efektivitas audit internal. Manajemen menyediakan sumber daya yang cukup dalam bentuk dukungan dana untuk rekrutmen auditor internal yang terlatih dan berpengalaman, pengembangan auditor internal dengan memberikan pelatihan agar menjadi auditor yang kompeten, serta peningkatan hubungan kerja sama dengan auditor eksternal (Cohen dan Sayag, 2010; Alzeban dan Gwilliam, 2014).

Hasil studi yang lain, seperti dari Mihret dan Yismaw (2007) menyoroti bahwa hasil dan rekomendasi audit tidak memberikan banyak makna jika pihak manajemen tidak menindaklanjuti dengan rencana perbaikan (*action plan*), sehingga pelaksanaan rekomendasi audit tidak berhubungan dengan efektivitas audit (Gansberghe, 2005; Sawyer, 1995) sebagaimana dikutip oleh Arena dan Azzone (2009b). Dalam hal ini dukungan manajemen sangat dibutuhkan agar seluruh pegawai bersedia menindaklanjuti rekomendasi auditor internal.

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap efektivitas audit internal. Beberapa variabel di antaranya adalah kompetensi auditor internal, independensi organisasi audit internal, hubungan antara auditor internal dan eksternal serta dukungan manajemen. Hal ini berarti bahwa setelah diketahui variabel-variabel

yang memengaruhi efektivitas audit internal tersebut, kemudian dapat dilakukan upaya peningkatan.

Penelitian ini merupakan perluasan dari penelitian yang dilakukan oleh Alzeban dan Gwilliam (2014) mengenai efektivitas audit internal organisasi sektor publik di Saudi Arabia. Penelitian tersebut menguji lima variabel yang diprediksi memengaruhi efektivitas audit internal, yaitu kompetensi auditor, independensi organisasi audit internal, hubungan antara auditor internal dan eksternal, ukuran organisasi audit internal serta dukungan manajemen. Dari lima variabel tersebut, peneliti tidak menggunakan variabel ukuran organisasi audit internal karena variabel tersebut diukur dengan membandingkan jumlah auditor internal di 79 organisasi sektor publik yang disurvei, sehingga dapat membandingkan jumlah auditor internal di masing-masing organisasi sektor publik tersebut. Penelitian ini dilakukan hanya pada satu organisasi sektor publik yaitu Itjen Kementerian Agama. Oleh karena itu, variabel ukuran organisasi audit internal tidak dapat digunakan dalam penelitian ini.

Peneliti berminat untuk melakukan penelitian serupa pada Itjen Kementerian Agama dengan menambahkan variabel korupsi sebagai variabel endogen dari penelitian Asiedu dan Deffor (2017). Alasan dipilihnya variabel korupsi sebagai variabel endogen karena adanya pengaruh efektivitas audit internal pada korupsi yang dapat memberikan nilai tambah untuk mencegah atau mengurangi praktik korupsi yang terjadi di organisasi, sebagaimana telah terbukti dari hasil penelitian Asiedu dan Deffor (2017) di sektor publik Ghana. Lebih lanjut Kuntadi (2015:160) menambahkan bahwa auditor internal mempunyai kewenangan formal untuk melaporkan adanya kecurangan atau korupsi dalam sebuah organisasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan internal yang efektif oleh auditor internal akan berperan dalam mencegah terjadinya korupsi di organisasi.

Penelitian tentang pengaruh efektivitas audit internal terhadap korupsi di sektor publik Indonesia khususnya di kementerian/lembaga sepengetahuan peneliti belum banyak dilakukan. Penelitian sebelumnya hanya meneliti tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas audit internal, antara lain di perguruan tinggi (Sari, 2014; Baheri, 2016), pemerintahan daerah (Mahmudah, 2014; Widyawati, 2017) dan kantor BPKP (Anto, 2016). Penelitian-penelitian tersebut tidak meneliti secara langsung pengaruh efektivitas audit internal terhadap korupsi. Studi ini menjadi sangat penting karena masifnya praktik korupsi yang terjadi di instansi pemerintah.

1.2. Motivasi Penelitian

Terdapat beberapa motivasi dalam melakukan penelitian ini antara lain: Pertama, peran APIP dalam mengurangi korupsi sangat diharapkan oleh pemerintah dalam rangka mengeliminasi dampak buruk yang timbul baik yang sifatnya material maupun non material. APIP Kementerian Agama memiliki peran sangat strategis dalam pelaksanaan fungsi pengawasan internal. Upaya peningkatan fungsi pengawasan internal yang efektif dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan mewujudkan *good governance* di lingkungan Kementerian Agama.

Kedua, penelitian tentang pengaruh efektivitas audit internal terhadap korupsi menurut pengetahuan peneliti belum banyak dilakukan. Penelitian sebelumnya banyak meneliti tentang efektivitas audit internal, namun tidak secara langsung meneliti tentang efektivitas audit internal terhadap korupsi. Beberapa penelitian tentang efektivitas audit internal yang pernah dilakukan mencoba meneliti faktor-faktor yang diduga memengaruhi efektivitas audit internal antara lain oleh Mihret dan Yismaw (2007), Ahmad, *et al.* (2009), Cohen dan Sayag (2010), Unegbu dan Kida (2011), Ramachandran, *et al.* (2012),

Alzeban dan Gwilliam (2014), Baharud-din, *et al.* (2014), Sari (2014), Mahmudah (2014), Baheri (2016) serta Anto (2016).

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah adanya penambahan variabel korupsi sebagai variabel endogen. Alasan dipilihnya variabel korupsi sebagai variabel endogen karena sebagaimana hasil penelitian Asiedu dan Deffor (2017), korupsi di organisasi sektor publik dapat berkurang dengan efektivitas fungsi audit internal. Oleh karena itu, peneliti bermaksud memberikan kontribusi yang akan menambah referensi penelitian tentang pengaruh efektivitas audit internal atas korupsi. Pemahaman akan pentingnya audit yang efektif diperlukan demi terwujudnya pencapaian tujuan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka rumusan masalah dapat dijabarkan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh kompetensi auditor internal terhadap efektivitas audit internal?
2. Apakah terdapat pengaruh independensi organisasi audit internal terhadap efektivitas audit internal?
3. Apakah terdapat pengaruh hubungan antara auditor internal dan eksternal terhadap efektivitas audit internal?
4. Apakah terdapat pengaruh dukungan manajemen terhadap efektivitas audit internal?
5. Apakah terdapat pengaruh efektivitas audit internal terhadap korupsi?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh kompetensi auditor internal terhadap efektivitas audit internal.
2. Untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh independensi organisasi auditor internal terhadap efektivitas audit internal.
3. Untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh hubungan antara auditor internal dan eksternal terhadap efektivitas audit internal.
4. Untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh dukungan manajemen terhadap efektivitas audit internal.
5. Untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris pengaruh efektivitas audit internal terhadap korupsi.

1.5. Kontribusi Penelitian

Kontribusi penelitian dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: kontribusi teoretis, kontribusi praktis dan kontribusi kebijakan.

1.5.1. Kontribusi Teoretis

Kontribusi teoretis dari penelitian adalah:

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan kajian tentang teori agensi, teori kontinjensi dan teori peran dalam kaitannya dengan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas audit internal dan tujuannya untuk mencegah korupsi.
2. Memperkaya penemuan empiris tentang hubungan antara organisasi audit internal, efektivitas audit internal dan korupsi di sektor publik.
3. Memberikan bukti peran efektivitas fungsi audit internal dalam mencegah atau mengurangi korupsi di instansi pemerintah.

4. Menambah referensi bagi para akademisi yang ingin melakukan penelitian tentang pengaruh efektivitas audit internal terhadap korupsi di lingkungan kementerian.

1.5.2. Kontribusi Praktis

Kontribusi praktis penelitian ini bagi lembaga terkait:

1. Bagi Kementerian Agama Pusat, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi secara empiris tentang pengaruh kompetensi auditor internal, independensi organisasi audit internal, hubungan antara auditor internal dan eksternal, dan dukungan manajemen terhadap efektivitas audit internal dan pengaruhnya terhadap korupsi untuk membuat kebijakan yang nantinya akan memberikan nilai tambah bagi kementerian.
2. Bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi mengenai fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh APIP dalam rangka untuk mendeteksi atau mencegah terjadinya kasus korupsi.
3. Bagi APIP Kementerian Agama, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan fungsi audit yakni sebaiknya menjunjung sikap independen, kompetensi dan menjaga hubungan dengan auditor eksternal serta mendapatkan dukungan manajemen sehingga dapat berperan dalam mendeteksi atau mencegah terjadinya korupsi.

1.5.3. Kontribusi Kebijakan

Bagi pemerintah hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan memberikan rekomendasi terkait upaya peningkatan efektivitas fungsi audit internal di sektor publik dalam berperan mencegah terjadinya korupsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan kontrak antara prinsipal dan agen di dalam teori agensi, yaitu hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen untuk melaksanakan beberapa layanan dengan delegasi wewenang pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen. Dengan demikian prinsipal adalah pihak pemberi mandat kepada agen untuk melaksanakan kegiatan atas nama prinsipal.

Dalam konteks pemerintahan di Indonesia karena kedaulatan berada di tangan rakyat, maka rakyatlah yang berperan sebagai prinsipal, pemerintah sebagai manajemen (agen). Menurut Jensen dan Meckling (1976), tidak selamanya agen akan mengikuti keinginan prinsipal karena adanya perbedaan kepentingan di antara keduanya. Dalam pelaksanaannya, masing-masing pihak bertindak sesuai dengan kepentingan yang ingin dicapainya. Hal ini menyebabkan adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen (Adams, 1994) dan pihak prinsipal akan kesulitan untuk memantau secara efektif apakah kepentingan mereka dilayani oleh agen dengan benar. Asimetri informasi adalah informasi yang tidak seimbang karena distribusi informasi antara prinsipal dan agen tidak sama.

Dalam upaya mengatasi masalah antara prinsipal dan agen ini menimbulkan *agency cost* yang akan ditanggung baik oleh prinsipal maupun agen (Jensen dan Meckling, 1976). Misalnya, untuk meminimalkan risiko agen tidak bertanggung jawab, prinsipal akan mengeluarkan biaya monitoring, misalnya biaya untuk mengecek laporan keuangan sampai audit eksternal. Di sisi lain, agen menanggung *bonding cost* misalnya biaya audit internal untuk

memberi isyarat kepada prinsipal bahwa mereka bertindak secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kontrak kerja. Tindakan itu akan membantu agen untuk mengamankan posisi di organisasi dan untuk melindungi tingkat gaji mereka (Adams, 1994).

Fungsi audit internal adalah salah satu bagian penting dari *good governance* (Coram, *et al.*, 2008). Prinsipal menginginkan agen menjalankan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan audit internal yang efektif untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan yang mungkin terjadi di organisasi. Auditor internal menjadi salah satu bagian penting dalam mekanisme pengawasan oleh prinsipal (Adams, 1994). Dalam konteks pemerintahan, keberadaan auditor internal menjadi suatu langkah pengawasan bagi masyarakat untuk memastikan bahwa segala kebijakan dan tindakan pemerintah ditujukan untuk kepentingan rakyat.

2.2. Teori Kontinjensi

Teori kontinjensi merupakan sebuah teori dasar yang sering kali digunakan dalam penelitian mengenai akuntansi manajemen dan audit. Dalam penerapannya teori ini memiliki efek yang berbeda tergantung pada pengaplikasiannya dan lingkungan yang ada. Prinsip teori ini menyatakan bahwa sistem yang diterapkan dan bersifat efektif pada suatu organisasi belum tentu akan berhasil dan efektif bila diterapkan pada organisasi lain dengan karakteristik organisasi yang berbeda. Hal ini disebabkan adanya faktor-faktor kontinjensi. Drazin, *et al.* (1985) menyebutkan bahwa gagasan pokok teori kontinjensi tentang struktur organisasi adalah proposisi bahwa struktur organisasi dan proses organisasi harus sesuai konteksnya (karakteristik budaya organisasi, lingkungan, teknologi, ukuran atau tugas) jika ingin bertahan atau menjadi efektif.

Badara dan Saidin (2014) berpendapat bahwa teori kontinjensi mampu membantu peneliti untuk menjelaskan secara sistematis mengenai sebuah fenomena. Teori ini mampu menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih, misalnya saja dalam area *auditing*. Efektivitas audit internal merupakan sesuatu yang harus dilakukan dan diwujudkan. Hal tersebut tidak akan tercapai jika tidak ada faktor-faktor yang mendukung untuk mencapai dan mewujudkan hal tersebut (Badara dan Saidin, 2014). Dalam penelitian ini efektivitas audit internal bergantung pada *contingency variables* yaitu kompetensi auditor, independensi organisasi audit internal, hubungan antara auditor internal dan eksternal serta dukungan manajemen (Alzeban dan Gwilliam, 2014).

2.3. Teori Peran

Teori yang mendukung penelitian ini adalah *role theory* (teori peran) yang dikemukakan oleh Kahn, *et al.* (1964). Peran diartikan oleh Gibson, Ivance, dan Donnely (2000:216) sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan dari seorang individu dalam posisi tertentu. Teori peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Teori peran mencoba untuk menjelaskan interaksi antarindividu dalam organisasi, berfokus pada peran yang mereka mainkan. Individu yang menduduki sebuah posisi dalam organisasi akan berperilaku sesuai dengan perannya untuk berinteraksi sebagai bagian dari pekerjaannya yang saling bergantung satu sama lain.

Setiap peran menghendaki perilaku yang berbeda-beda dan seorang individu dapat memiliki lebih dari satu peran. Peran mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial dengan hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab. Seorang individu yang menduduki jabatan sebagai auditor internal memiliki kewajiban untuk melaksanakan penilaian yang objektif untuk peningkatan operasi organisasinya. Hal tersebut membuktikan bahwa perilaku

dipengaruhi oleh peran sosial yang disandang individu.

Teori peran juga mengungkapkan bahwa ketika perilaku yang diharapkan oleh individu tidak jelas, maka mereka dapat mengalami stres, depresi, tidak puas, dan kinerja mereka akan kurang efektif dari pada jika pada harapan tersebut tidak mengandung konflik. Jadi, dapat diasumsikan bahwa adanya konflik peran tentunya dapat memberikan sebuah pengaruh negatif terhadap cara berpikir dan cara bekerja seseorang (Ahmad dan Taylor, 2009).

2.4. Korupsi dan Fungsi Audit Internal

Beberapa hasil penelitian atau pemikiran tentang kecurangan dan fungsi audit internal telah dilakukan diantaranya oleh Labuschangne dan Els (2006), Omar dan Bakar (2012), Adetoso, *et al.* (2013), dan Othman, *et al.* (2015). Menurut Omar dan Bakar (2012) auditor internal pemerintah berperan efektif dalam membantu manajemen melakukan aspek pengawasan dalam konteks pencegahan kecurangan. Hal ini dapat dilakukan oleh auditor internal pemerintah karena mereka memiliki kemampuan yang memadai sehingga dapat mengidentifikasi adanya kecurangan yang mungkin terjadi di organisasi.

Menurut Adetoso, *et al.* (2013) yang melakukan penelitian di sebuah universitas swasta di Nigeria menemukan bahwa auditor internal efektif dalam mengungkap kecurangan dan penyimpangan keuangan di universitas tersebut. Caranya adalah dengan menempatkan auditor internal pada posisi yang kuat sehingga mereka dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik. Lebih lanjut Labuschangne dan Els (2006) dan Othman, *et al.* (2015) sepakat bahwa auditor internal pemerintah memainkan peran penting dalam pendeteksian, pencegahan dan akan membantu upaya pemberantasan korupsi. Mekanisme deteksi korupsi dan pencegahan yang dilakukan oleh Othman, *et al.* (2015) di antaranya adalah dengan peningkatan peran audit, pengendalian internal, adanya *fraud hotline*, penggunaan teknologi dan rotasi staf.

Beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa fungsi audit internal dapat memberikan nilai tambah yang penting untuk mengungkap dan mencegah kecurangan yang mungkin terjadi di organisasi. Menurut Salameh, *et al.* (2011) auditor internal memiliki pengalaman lebih dari auditor eksternal dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Auditor internal memiliki pengetahuan mendalam tentang budaya, kebijakan dan prosedur organisasi dari pada auditor eksternal. Hal ini menyebabkan auditor internal lebih paham mengenai kecurangan yang mungkin terjadi di organisasi (Kuntadi, 2015:141). Meskipun bukan tujuan utama auditor internal untuk mengawasi program pencegahan kecurangan, namun logis bahwa auditor internal membantu dalam mengidentifikasi risiko kecurangan di organisasi (Halbouni, 2015). Misalnya, dalam perjalanan pemeriksaan yang dilakukan auditor, ketika auditor menemukan faktor risiko tertentu untuk pelaporan keuangan yang tidak benar, maka auditor internal harus melaporkannya.

Hasil survey ACFE 2008 yang dikutip Halbouni (2015) menemukan bahwa auditor internal dapat mendeteksi aktivitas kecurangan sebesar 19 persen kasus kecurangan dalam pekerjaan mereka. Menurut ACFE, angka 19 persen ini lebih besar dari jumlah kasus kecurangan yang dapat diungkap oleh auditor eksternal dalam pekerjaan yang sama yaitu hanya 9 persen. Hal ini membuktikan bahwa organisasi audit internal adalah entitas yang paling penting untuk mendeteksi dan membatasi terjadinya penyalahgunaan aset dan skema korupsi (Halbouni, 2015). Standar Audit Intern Pemerintah mewajibkan auditor internal memiliki pengetahuan yang cukup di antaranya untuk mengevaluasi tidak hanya risiko kecurangan, tetapi juga bagaimana organisasi mengelola risiko tersebut. Namun demikian, auditor internal tidak wajib untuk memiliki tingkat pengalaman yang sama dengan mereka yang diberi wewenang secara khusus untuk mendeteksi dan menyelidiki adanya kecurangan di organisasi (Halbouni, 2015).

Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dapat dikelompokkan sebagai berikut: perbuatan yang menyebabkan kerugian negara, perbuatan suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang dalam pengadaan barang dan jasa, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, dan gratifikasi. Korupsi merupakan permasalahan yang utama di Indonesia bahkan dunia (Kayo, 2013:6). Pada awalnya korupsi terjadi karena adanya interaksi antara warga negara atau sektor privat (perusahaan, NGO, individu-individu) dan pengambil kebijakan (politikus di eksekutif, legislatif, dan yudikatif) serta PNS (memiliki kekuasaan administrasi) yang memiliki kepentingan kolektif (Argandona, 2001) dan dapat terjadi karena faktor kebutuhan, keserakahan dan kesempatan (Tuanakotta, 2010:271-284). Menurut Santoso (2008) kecurangan dapat terjadi di instansi pemerintah di antaranya ketika pengendalian internal lemah karena dilakukan dengan longgar sehingga tidak efektif. Studi yang dilakukan oleh Alfian (2015) menunjukkan modus-modus operandi kecurangan yang terjadi di sektor publik yang selama ini ada dan tidak muncul kepermukaan serta terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, pencairan dan pertanggungjawaban anggaran.

Dampak negatif dari korupsi dapat dilihat dari dimensi ekonomi, sosial politik dan etika. Akibat negatif korupsi dari dimensi ekonomi yaitu terjadinya inefisiensi penggunaan dana publik, redistribusi pendapatan dan kekayaan yang tidak merata, pertumbuhan pembangunan melambat (Ackerman, 1997; Sandholtz dan Koetzle, 2000; Argandona, 2001) dan pada akhirnya memiliki dampak memperparah kemiskinan pada masyarakat luas (Chetwynd, *et al.*, 2003). Dari dimensi sosial politik, Argandona (2001) mengkonfirmasi bahwa korupsi dipandang sebagai penyebab distorsi dalam proses pengambilan keputusan, membatasi ruang lingkup hak-hak warga negara, memfasilitasi ketidakjelasan

hukum dan dalam jangka panjang merusak legitimasi pemerintah dan bahkan sistem demokrasi itu sendiri. Korupsi adalah masalah etika dan perilaku tidak jujur (Labuschangne dan Els, 2006). Tindakan atau perilaku penguasa, PNS atau karyawan pemerintah yang tidak jujur dalam melaksanakan tugas akan menimbulkan ketidakadilan dan merugikan kepentingan masyarakat. Untuk memerangi korupsi, pemerintah telah mengambil langkah-langkah di antaranya dengan menerbitkan UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 15 Tahun 2002 dan UU No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Inpres No.5 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Mengingat dampak buruk tindakan korupsi, reformasi kelembagaan yang kuat diperlukan untuk memerangi fenomena tersebut. Hal ini dilakukan dengan membuat sistem dan struktur organisasi yang lebih efektif, termasuk pengembangan kapasitas sumber daya (Asiedu dan Deffor, 2017). Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah penguatan lembaga pengawasan internal pemerintah melalui audit internal. Beberapa penelitian (Coram, *et al.*, 2008; Halbouni, 2015) memberikan bukti bahwa organisasi dengan struktur dan sistem tata kelola organisasi yang baik, cenderung memiliki fungsi audit internal.

Menurut Standar Audit Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI, 2014), fungsi audit internal sebagai bagian dari tata kelola organisasi adalah sebagai kegiatan yang independen dan objektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi. Dengan demikian, audit internal merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan *good governance* yang mengarah pada *clean government*. Fungsi audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara menggunakan

pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (AAIPI, 2014).

2.5. Efektivitas Audit Internal

Dittenhofer (2011) mendefinisikan efektivitas audit internal sebagai pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam sebuah organisasi. Lenz (2013) mengungkapkan bahwa efektivitas audit internal sebagai sebuah konsep berbasis manajemen risiko, pengendalian internal, serta tata kelola organisasi yang dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi dan membantu meningkatkan proses organisasi. Menurut Anto (2015) pengembangan kebijakan dan prosedur untuk menjamin pencapaian tujuan termasuk penilaian risiko yang tepat, keandalan laporan internal dan eksternal serta akuntabilitas, kepatuhan dengan peraturan, perundang-undangan, standar etika dan perilaku untuk organisasi sektor publik merupakan bagian dari manajemen risiko, pengendalian internal dan tata kelola organisasi.

Beberapa penelitian tentang efektivitas audit internal yang pernah dilakukan mencoba meneliti faktor-faktor yang diduga memengaruhi efektivitas audit internal. Pemahaman terhadap faktor-faktor yang menentukan efektivitas audit internal penting untuk dilakukan, karena audit internal yang efektif dapat meningkatkan empat proses penting dalam organisasi, yaitu proses pembelajaran, proses motivasi, proses pencegahan serta proses perbaikan (Eden dan Moriah, 1996). Setelah diketahui faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas audit internal, kemudian dapat dilakukan upaya peningkatan. Efektivitas audit internal terbukti berperan dalam mencegah terjadinya praktik korupsi di organisasi (Salameh, *et al.*, 2011; Asiedu dan Deffor, 2017). Dengan demikian peningkatan efektivitas audit internal dapat meningkatkan pencegahan terhadap praktik korupsi yang mungkin terjadi di organisasi.

Menurut Arena dan Azzone (2009a) efektivitas memiliki arti kemampuan untuk memperoleh hasil yang konsisten dengan tujuan dan target. Dalam konteks yang sama, suatu program dapat dilihat efektif jika hasilnya sama dengan tujuannya (Eden dan Moriah, 1996). Pada penelitian ini efektivitas audit internal adalah kemampuan APIP untuk mencapai tujuan dari organisasi audit internal yaitu mencegah atau mengurangi terjadinya praktik korupsi di organisasi (Asiedu dan Deffor, 2017).

2.6. Kompetensi Auditor Internal

Kompetensi auditor internal adalah kunci untuk melaksanakan audit internal yang efektif (Al-Twajiry, *et al.*, 2003). Untuk mencapai tujuan audit internal pemerintah yang efektif, sebuah institusi pemerintah harus memiliki APIP yang handal, yaitu APIP yang kompeten dalam melakukan tugas-tugasnya. Kompetensi APIP menjadi prasyarat mutlak seiring dengan peran baru pengawas intern yang diuraikan sebagai berikut (AAIPI, 2014):

“APIP yang efektif sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (*assurance activities*); memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas (*anti corruption activities*); serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah (*consulting activities*).”

Uraian tersebut menunjukkan bahwa peran APIP diharapkan dapat berperan menjadi agen perubahan yang dapat memberi nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. Menurut Gamar dan Djamhuri (2015) penting bagi auditor internal untuk memahami dengan baik peran yang mereka jalankan untuk dapat memenuhi tuntutan dari perubahan paradigma sebagai auditor internal pemerintah. Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh auditor internal tidak terbatas pada pemeriksaan saja, fungsi pelayanan dan konsultatif banyak dilakukan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Hal ini sesuai dengan tuntutan paradigma auditor internal yang dikehendaki pada saat ini. Peran APIP

semakin strategis dan bergerak mengikuti perkembangan zaman. Dengan tuntutan terhadap APIP yang semakin berat, APIP harus memiliki kompetensi yang handal.

Menurut Standar Audit Internal AAIPI (2014), peran APIP yang efektif dapat terwujud jika didukung dengan adanya auditor yang kompeten. Auditor yang kompeten maksudnya adalah yang mempunyai kualifikasi pendidikan, pengetahuan, keahlian dan keterampilan, pengalaman, serta kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Seiring perkembangan zaman, auditor harus senantiasa menjaga dan memperbarui keahlian yang telah dimilikinya, sehingga dapat selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan optimal. Oleh karena itu, untuk menjamin kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan APIP dan perkembangan lingkungan pengawasan, maka menurut AAIPI (2014) auditor wajib meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan, serta kompetensi lain melalui Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan (*Continuing Professional Education*).

Lee dan Stone (1995) menyebut kompetensi sebagai keahlian yang cukup untuk melakukan audit secara objektif. Adapun menurut beberapa peneliti yang lain mengartikan kompetensi sebagai keterampilan, pengalaman, pengetahuan teknis, dan *behavior skill* audit yang dimiliki auditor internal dalam menjalankan tugas pemeriksaan (Ahmad, *et al.*, 2009; Arena dan Azzone, 2009b; Alzeban dan Gwilliam, 2014; Baharud-din, *et al.*, 2014). Kompetensi auditor internal harus terus ditingkatkan secara berkelanjutan agar dapat menyediakan layanan yang efisien dan efektif serta berkualitas tinggi kepada pihak yang berkepentingan (Mihret dan Yismaw, 2007; Mihret, *et al.*, 2010)

Penelitian yang dilakukan oleh Baharud-din, *et al.* (2014) di Kementerian Malaysia, menemukan bahwa auditor yang memiliki keterampilan dan

pengalaman audit kurang memadai dapat menyebabkan keterlambatan dalam pekerjaan audit di organisasi audit internalnya. Ini menunjukkan bahwa auditor internal yang kurang kompeten akan membatasi tugas yang dilakukan oleh organisasi audit internal, dengan kata lain kompetensi auditor internal yang memadai akan meningkatkan kompetensi organisasi audit internalnya. Adanya hubungan yang positif antara kompetensi auditor dengan efektivitas fungsi audit internal diharapkan mampu untuk mengatasi praktik korupsi (Asiedu dan Deffor, 2017).

2.7. Independensi Organisasi Audit Internal

Independensi adalah kebebasan dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit internal untuk melaksanakan tanggung jawab audit internal secara objektif (AAIPI, 2014). Menurut Cohen dan Sayag (2010) dan Alzeban dan Gwilliam (2014) auditor harus cukup independen dari pihak auditi dan memastikan bahwa mereka dapat melakukan pekerjaannya tanpa ada intervensi atau gangguan. Ini adalah elemen yang sangat penting dalam melakukan audit. Hal ini tentu tidak mudah, bahwa akan ada kesulitan seorang auditor internal untuk menjaga agar tetap independen karena auditor internal pada dasarnya adalah bagian dari organisasi (Mihret, *et al.* 2010). Hal serupa juga dikemukakan oleh Salameh, *et al.* (2011), bahwa auditor internal merasa takut akan mendapatkan perlakuan tidak semestinya ketika harus melaporkan temuan-temuan yang tidak menguntungkan manajemen puncak.

Baharud-din, *et al.* (2014) mengungkapkan bahwa independensi organisasi audit internal berkontribusi pada kegiatan audit intern pemerintah yang efektif ketika dapat melaksanakan kegiatan audit intern tanpa campur tangan pihak lain. Independensi sangat erat kaitannya dengan kebebasan dari kondisi yang dapat mengancam obyektivitas dan tidak ada kompromi atas kualitas hasil audit saat melakukan penugasan audit. Beckmerhagen, *et al.*

(2004) menyatakan bahwa dalam mengukur efektivitas audit internal tidak hanya dilihat dari hasil akhir (*outcome*) audit tetapi juga proses audit (perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan dan tindak lanjut) dan sumber daya yang ada yaitu independensi dan kompetensi (Ahmad, *et al.*, 2009).

Salah satu elemen penting dalam melakukan audit adalah auditor internal dapat mengakses dokumen apapun yang berkaitan dengan pekerjaan audit intern tanpa gangguan dan ketakutan (Baharud-din, *et al.* 2014; Alzeban dan Gwilliam, 2014). Studi oleh Al-Twaijry, *et al.* (2003) menunjukkan bahwa untuk menjaga independensi dalam penugasan audit internal maka sebaiknya auditor internal tidak dilibatkan dalam perancangan, pemasangan dan pengoperasian sistem organisasi auditi.

Menurut Standar Audit Internal AAIP (2014) diperlukan pelaksanaan tanggung jawab aktivitas audit intern secara efektif untuk mencapai tingkat independensi yang diperlukan, pimpinan audit internal mempunyai akses langsung kepada pimpinan kementerian/lembaga. Pimpinan organisasi audit internal bertanggung jawab kepada pimpinan kementerian/lembaga, antara lain dengan: (1) Posisi auditor internal ditempatkan secara tepat (2) Melaporkan ke tingkat pimpinan kementerian/lembaga yang memungkinkan kegiatan audit internal dapat memenuhi tanggung jawabnya (3) Penjaminan kualitas (*quality assurance*) menentukan ruang lingkup, pelaksanaan, dan pengkomunikasian hasil dan (4) Pimpinan organisasi audit internal berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung dengan pimpinan kementerian/lembaga.

Auditor internal harus bersikap netral dan tidak bias untuk menghindari konflik kepentingan (Alzeban dan Gwilliam, 2014) dalam penugasan audit (merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan). Gangguan yang terjadi secara faktual dan independensi atau objektivitas terganggu maka harus dilaporkan kepada pimpinan audit internal (AAIP, 2014). Hal tersebut sesuai dengan tujuan

yang ingin dicapai yaitu auditor internal dapat melakukan aktivitas audit secara efektif dan akan sangat mendukung reputasi auditor internal serta mendapat kepercayaan dari pemangku kepentingan.

2.8. Hubungan Antara Auditor Internal dan Eksternal

Salah satu faktor yang ditengarai dapat memengaruhi efektivitas audit internal adalah hubungan antara auditor internal dan eksternal. Auditor eksternal yang dimaksud adalah auditor BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Menurut Alzeban dan Gwilliam (2014) koordinasi dan kerja sama antara auditor internal dan eksternal berupa pembahasan rencana audit, berbagi kertas kerja, kepercayaan auditor eksternal pada pekerjaan audit internal dan dukungan manajemen atas hubungan yang terjalin antara internal dan eksternal auditor mempunyai peranan penting dan bermanfaat bagi organisasi audit internal dan BPK. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 9 menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan APIP dan laporan hasil pemeriksaannya wajib disampaikan kepada BPK.

Untuk memahami hubungan antara auditor internal dan eksternal, perlu mengetahui perbedaan dan persamaan antara audit internal dan eksternal dikalangan pemerintahan (Ristiyanto, 2013). Beberapa persamaan keduanya yaitu: auditor internal dan eksternal melakukan perbandingan antara fakta-fakta dengan kriterianya, memberikan rekomendasi guna perbaikan operasi manajemen auditi, dilakukan oleh orang-orang yang kompeten, berpedoman pada standar audit, taat pada kode etik profesi. Perbedaannya terletak pada pelaksana audit dan strategi pelaksanaannya. Auditor eksternal tidak berasal dari dalam organisasi auditi, sedangkan audit internal berasal dari dalam organisasi auditi.

Perbedaan lainnya terkait strategi pelaksanaan yaitu auditor internal melakukan pengawasan internal sejak perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan diharapkan dapat meminimalkan potensi penyimpangan yang mungkin terjadi di organisasi. Peran auditor internal tersebut didukung oleh auditor eksternal yang menilai hasil akhir (output) dari kegiatan atau program yang diaudit dengan prosedur yang lebih ketat dibandingkan yang dilakukan oleh auditor internal (Halbouni, 2015). Hal ini memberikan dukungan empiris tentang anggapan bahwa auditor eksternal harus lebih meningkatkan usahanya untuk mendeteksi dan melaporkan terjadinya kecurangan. Namun demikian, penelitian Asiedu dan Deffor (2017) menunjukkan bahwa banyak kasus penyimpangan yang dapat ditemukan dan dideteksi lebih awal sebelum ditemukan oleh auditor eksternal karena organisasi sektor publik Ghana memiliki fungsi audit internal yang efektif. Adanya hubungan yang baik antara auditor internal dan eksternal dalam melakukan pengawasan/audit internal di organisasi akan meningkatkan efektivitas audit internal (Alzeban dan Gwilliam, 2014; Asiedu dan Deffor, 2017). Audit internal memberikan nilai tambah bagi manajemen dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan lainnya.

2.9. Dukungan Manajemen

Dukungan dari manajemen sangat penting untuk memenuhi fungsi audit internal yang efektif, baik di sektor publik maupun di sektor privat (Cohen dan Sayag, 2010). Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tanpa dukungan manajemen, auditor internal tidak dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya (Ahmad, *et al.*, 2009). Menurut Alzeban dan Gwilliam (2014) yang mensitir tulisan Gansberghe (2005) menyatakan pentingnya penerimaan dan penghargaan manajemen atas kontribusi dan nilai yang dapat ditambahkan oleh audit internal ke organisasi. Ketika dukungan manajemen pada fungsi audit internal kurang memadai maka akan memengaruhi respon dan kerja sama yang

diberikan oleh auditi yang menganggap audit internal tidak penting (Mihret dan Yisway, 2007). Hal ini akan berpengaruh negatif terhadap fungsi audit internal.

Dukungan dari pimpinan tertinggi kementerian/lembaga memungkinkan auditor internal pemerintah dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesionalnya dengan baik. Menurut AAPI (2014) pimpinan organisasi audit internal harus mengkomunikasikan kepada pimpinan kementerian/lembaga mengenai rencana kegiatan audit intern tahunan dan meminta persetujuannya. Hal ini merupakan langkah awal dalam pemberian dukungan dari pimpinan kementerian/lembaga kepada organisasi audit internal. Adanya rencana kegiatan yang telah disusun dengan baik, dilanjutkan dengan pemberian dukungan baik berupa sumber daya manusia, keuangan, peningkatan hubungan kerja sama dengan auditor eksternal serta sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya (Cohen dan Sayag, 2010; Alzeban dan Gwilliam, 2014). Dukungan yang tampak diberikan oleh pimpinan kementerian/lembaga akan memberikan sinyal kepada seluruh pegawai kementerian/lembaga tentang pentingnya peran dan fungsi audit internal. Dukungan ini pada gilirannya akan berdampak pada penguatan organisasi audit internal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya (Alzeban dan Gwilliam, 2014).

Bentuk dukungan yang lain berupa implementasi tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit internal oleh auditi. Temuan dan rekomendasi audit yang kurang atau tidak ditindaklanjuti oleh auditi akan mengurangi kredibilitas audit internal yang telah dilakukan. Laporan hasil audit tidak akan memiliki nilai ketika auditi tidak termotivasi untuk mengambil tindakan korektif atas hasil temuan auditor, meskipun audit internal telah direncanakan, dilaksanakan dan menemukan temuan yang signifikan. Implementasi rekomendasi hasil audit

internal merupakan ukuran yang cocok bagi efektivitas audit internal (Mihret dan Yisway, 2007).

2.10. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pengaruh efektivitas audit internal terhadap korupsi belum banyak dilakukan. Salah satunya adalah penelitian oleh Asiedu dan Deffor (2017). Penelitian ini menggunakan 300 responden pekerja yang terdiri dari direktur, manajer dan staf organisasi audit internal organisasi publik di Ghana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan antara korupsi dan efektivitas audit internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor internal dapat mendeteksi adanya kasus korupsi lebih awal sehingga mereka dapat melakukan upaya pencegahan. Dengan kata lain efektivitas audit internal berpengaruh terhadap korupsi di organisasi sektor publik Ghana.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas audit internal telah dilakukan diantaranya oleh Alzeban dan Gwilliam (2014). Penelitian tersebut dilakukan di 79 organisasi sektor publik di Saudi Arabia dengan menggunakan 203 manajer dan 239 auditor internal. Mereka menguji pengaruh lima faktor yang diprediksi memengaruhi efektivitas audit internal, yaitu kompetensi auditor internal, ukuran organisasi audit internal, hubungan internal dengan eksternal auditor, dukungan manajemen, dan independensi organisasi audit internal. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa semua faktor berpengaruh terhadap efektivitas audit internal dan dukungan manajemen memiliki pengaruh dominan terhadap efektivitas audit internal.

Penelitian oleh Cohen dan Sayag (2010) pada 75 organisasi sektor publik dan 33 sektor privat di Israel menggunakan data variabel dependen dan variabel independen yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Dalam penelitian tersebut, data tentang efektivitas audit internal diperoleh dari *general manager* organisasi yang diaudit, sedangkan 5 (lima) data determinan (profesionalisme

auditor internal, kualitas pekerjaan audit, independensi organisasi audit internal, karir dan penjenjangan dan dukungan manajemen puncak) diperoleh dari auditor internal. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dukungan manajemen merupakan determinan utama efektivitas audit internal. Bahkan dukungan manajemen puncak dapat mengurangi peran variabel independen dan profesionalise auditor internal. Sementara itu, independensi organisasi berpengaruh terhadap dua dari tiga dimensi efektivitas audit internal, yaitu dimensi kualitas audit dan evaluasi auditi.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Baharud-din, *et al.* (2014) dengan responden auditor internal pemerintah di Malaysia yang mengindikasikan bahwa kompetensi auditor internal, independensi dan objektivitas serta dukungan manajemen berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal. Penelitian ini memperkuat penelitian yang dilakukan oleh Cohen dan Sayag (2010) serta Alzeban dan Gwilliam (2014) yang mendapatkan bukti empiris mengenai dukungan manajemen yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap efektivitas audit internal. Ringkasan penelitian terdahulu dapat dilihat di Lampiran 1.

BAB III

KERANGKA KONSEP PENELITIAN

3.1. Kerangka Pemikiran

Teori agensi menyatakan bahwa prinsipal adalah pemberi mandat kepada agen untuk melaksanakan kegiatan atas nama prinsipal. Menurut Jensen dan Meckling (1976), tidak selamanya agen akan mengikuti keinginan prinsipal karena adanya perbedaan kepentingan diantara keduanya. Hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen menunjukkan usaha untuk menyelaraskan perbedaan motivasi dari keduanya. Usaha yang dilakukan oleh agen untuk menunjukkan pada prinsipal bahwa mereka bertanggung jawab sesuai kontrak kerja, diantaranya dengan menanggung *bonding cost* (misalnya untuk biaya audit internal). Audit internal adalah usaha untuk melakukan ikatan pada pihak agen, sebuah usaha untuk menunjukkan bahwa motivasi agen tersebut sesuai dengan prinsipal (Adams, 1994).

Masyarakat sebagai prinsipal menginginkan agen (pemerintah) agar menjalankan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Tuntutan terselenggaranya *good governance* yang mengarah pada *clean government* belum terpenuhi, terbukti dengan masih maraknya tindak pidana korupsi di instansi pemerintah. Kondisi ini dapat menghambat kualitas pelayanan kepada masyarakat. Fenomena ini ditengarai karena pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal maupun eksternal masih dipertanyakan keefektifannya. Salameh, *et al.* (2011) dan Halbouni (2015) menemukan bahwa auditor internal memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan daripada auditor eksternal. Hal ini membuktikan bahwa fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh organisasi audit internal menjadi

sangat penting dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan yang mungkin terjadi di organisasi.

Melalui pengawasan internal di instansi pemerintah dapat diketahui apakah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, sesuai rencana, dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa efektivitas audit internal dapat dicapai ketika hasilnya sama dengan tujuannya. Dalam konteks ini tujuan dan target yang ingin dicapai adalah dapat mengurangi atau mencegah terjadinya praktik korupsi di organisasi sesuai dengan harapan dari masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Salameh, *et al.* (2011) dan Asiedu dan Deffor (2017) membuktikan bahwa efektivitas audit internal dapat mencegah korupsi di organisasi.

Teori kontinjensi menyatakan bahwa sistem pengendalian manajemen bergantung pada karakteristik organisasi dan kondisi lingkungan tempat sistem tersebut akan diterapkan (Lubis, 2010:24). Lebih lanjut Wahyudi (2005) menyampaikan bahwa pemberdayaan peran dan fungsi audit internal yang efektif menjadi suatu hal yang mutlak untuk direalisasikan dalam rangka memperkuat struktur pengendalian manajemen pemerintahan. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas audit internal dalam penelitian ini dikaitkan dengan variabel kontinjensi di antaranya kompetensi auditor internal, independensi organisasi audit internal, hubungan antara auditor internal dan eksternal serta dukungan manajemen. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Ahmad, *et al.* (2009), Alzeban dan Gwilliam (2014), dan Baharud-din, *et al.* (2014), menunjukkan bahwa kompetensi auditor internal merupakan faktor kunci dalam melaksanakan audit internal yang efektif. Al-Twaijry, *et al.* (2003) menambahkan bahwa kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh auditor internal pada gilirannya akan memengaruhi kemampuan auditor dalam melakukan audit dan akan membatasi lingkup tugas yang dilakukan secara internal.

Faktor lain yang banyak terbukti memengaruhi efektivitas audit internal adalah independensi (Al-Twaijry, *et al.*, 2003; Mihret, *et al.*, 2010; Cohen dan Sayag, 2010; Alzeban dan Gwilliam, 2014; Baharud-din, *et al.*, 2014). Penelitian lain memberikan bukti empiris bahwa efektivitas audit internal juga dipengaruhi oleh hubungan antara auditor internal dan eksternal (Alzeban dan Gwilliam, 2014). Auditor internal dapat melaksanakan audit dengan dukungan manajemen puncak. Alzeban dan Gwilliam (2014) menunjukkan bahwa dukungan manajemen merupakan determinan utama efektivitas audit internal. Dukungan manajemen berhubungan erat dengan pemenuhan sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan audit (Cohen dan Sayag, 2010; Alzeban dan Gwilliam, 2014; Baharud-din, *et al.*, 2014).

Penelitian ini menggunakan 6 konstruk, yaitu: kompetensi auditor internal, independensi organisasi audit internal, hubungan antara auditor internal dan eksternal, dukungan manajemen, efektivitas audit internal dan korupsi. Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dapat dijadikan acuan dalam menyusun kerangka konseptual penelitian. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini diuraikan dalam model penelitian yang disajikan pada Gambar 3.1.

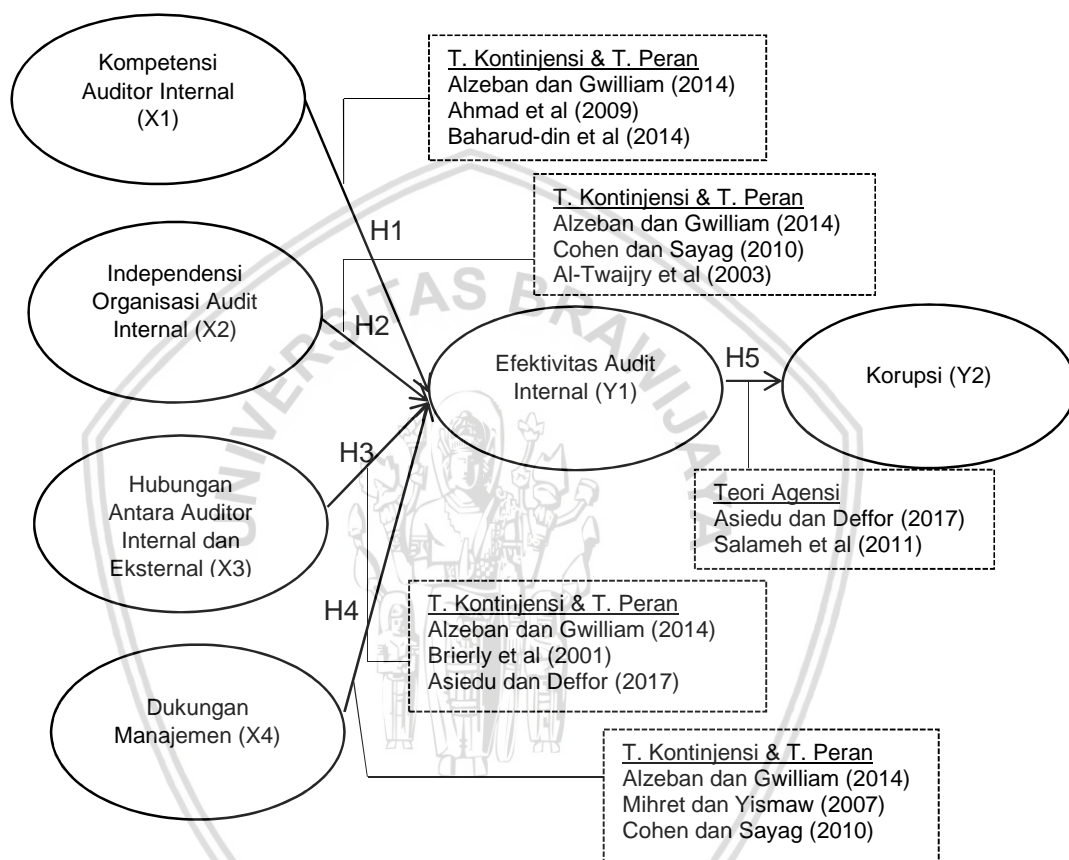
3.2. Pengembangan Hipotesis

3.2.1. Pengaruh Kompetensi Auditor Internal terhadap Efektivitas Audit Internal

Peran auditor internal semakin strategis dan bergerak mengikuti perkembangan zaman. Dengan tuntutan paradigma auditor internal yang dikehendaki pada saat ini, maka auditor harus memiliki kompetensi yang handal. Kompetensi menurut Standar Audit Internal AAPI (2014) harus dimiliki oleh

auditor internal agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kompetensi auditor internal dapat berupa pendidikan, pengetahuan, pengalaman, keahlian dan keterampilan dalam bidang audit secara umum.

Gambar 3.1.
Model Penelitian



Dengan kompetensi yang dimiliki, terutama yang berkaitan dengan bidang tugasnya, auditor internal akan mampu mengerjakan tugasnya dengan profesional sehingga hasilnya juga akan optimal. Hasil audit tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh auditi, dan dengan demikian akan memberikan dampak perbaikan bagi organisasi atau auditan sesuai yang diharapkan. Apabila audit internal dapat memberikan hasil dan dampak sesuai yang diharapkan tersebut, maka dapat dikatakan audit internal telah efektif. Teori peran menyatakan bahwa setiap peran mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial dengan hak,

kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab. Seorang individu yang mempunyai peran sebagai auditor internal dituntut dapat memberikan penilaian yang obyektif pada auditi. Kondisi ini menjadikan auditor internal harus memiliki kompetensi terkait berbagai bidang yang mencakup operasional auditi. Dengan demikian, semakin tinggi kompetensi auditor internal, maka audit internal yang dilakukan juga akan semakin efektif.

Kompetensi berupa kualifikasi pendidikan, profesionalisme, pengalaman audit dan pelatihan atau *training* audit yang diikuti dan penting untuk menunjang efektivitas audit internal (Alzeban dan Gwillian, 2014). Hasil penelitian tersebut diperkuat oleh penelitian Asiedu dan Deffor (2017) dengan menambahkan jumlah auditor yang kompeten sesuai dengan ruang lingkup penugasan audit. Sementara itu, menurut Gamar dan Djamhuri (2015) auditor internal pemerintah belum dapat melaksanakan perannya secara maksimal karena minimnya kompetensi yang dimiliki oleh auditor internal. Mengacu pada teori kontinjensi bahwa proses organisasi harus sesuai konteksnya jika ingin bertahan atau menjadi efektif. Kompetensi auditor internal merupakan salah satu aspek penting yang mampu meningkatkan efektivitas audit internal. Dari uraian tersebut, hipotesis pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Kompetensi auditor Internal berpengaruh terhadap efektivitas audit internal.

3.2.2. Pengaruh Independensi Organisasi Audit Internal terhadap Efektivitas Audit Internal

Kegiatan audit internal pemerintah yang efektif memerlukan independensi organisasi dan objektivitas yang memungkinkan kegiatan audit berjalan tanpa campur tangan dari pihak manapun (Baharud-din, *et al.*, 2014). Sementara itu, Asiedu dan Deffor (2017) menyatakan bahwa independensi dan objektivitas

sebagai elemen kunci dalam memastikan efektivitas organisasi audit internal sektor publik. Independensi diartikan sebagai bebas, tidak terikat, dan tidak memihak. Bagi auditor, independensi dapat berupa tidak memihak kepada siapapun, melakukan pekerjaan tanpa gangguan kepentingan serta bebas dari ikatan ekonomis yang kuat antara auditor dan auditi akibat penugasan non audit. Objektivitas terkait sikap netral dan tidak bias yang ditunjukkan oleh auditor internal untuk menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaan audit.

Menurut Alzeban dan Gwilliam (2014) independensi dan obyektivitas yang tepat dapat dilakukan pada tingkat organisasi audit internal dengan cara: melaksanakan audit bebas dari gangguan, menghindari konflik kepentingan, berhubungan langsung dengan manajemen puncak, memiliki akses tidak terbatas pada data pegawai dan organisasi, pengangkatan pimpinan organisasi audit internal tidak berada dalam kendali langsung manajemen eksekutif, dan tidak melakukan pekerjaan non audit lainnya. Langkah-langkah tersebut perlu mendapat dukungan penuh dari pimpinan organisasi audit internal untuk aktif dan bertanggung jawab atas independensi organisasi yang dipimpinnya (AAIPI, 2014).

Auditor yang dapat menjaga independensinya maka kredibilitas pekerjaannya tidak akan diragukan lagi. Dalam kondisi yang normal, maka pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil pekerjaan audit internal akan sepenuhnya mempercayai dan menjalankan rekomendasi yang diberikan. Apabila rekomendasi dari hasil audit internal dilaksanakan, maka artinya audit internal memberikan dampak perbaikan bagi auditi, sehingga dapat dikatakan audit internal telah efektif. Hal tersebut sesuai dengan independensi yang mengacu pada tujuan yang akan dicapai dan hubungan antara organisasi audit internal dengan auditi.

Teori peran menyatakan bahwa individu yang menduduki posisi tertentu akan berperilaku sesuai perannya untuk berinteraksi sebagai bagian dari pekerjaannya. Pada studi ini untuk menghasilkan audit yang objektif diperlukan independensi auditor internal. Namun hal ini tidak mudah karena auditor internal berstatus sebagai pegawai dari kesatuan organisasi yang diperiksa (Mihret, *et al.* 2010), sehingga memiliki derajat independensi yang lebih rendah dibandingkan dengan auditor eksternal. Kondisi ini dapat menyebabkan efektivitas pelaksanaan audit internal tidak sesuai dengan yang diharapkan. Teori kontinjensi juga memberikan dukungan bahwa struktur organisasi dan proses organisasi akan menjadi efektif bila sesuai konteksnya. Independensi organisasi audit internal merupakan aspek yang dapat memengaruhi efektivitas audit internal.

Pengaruh independensi terhadap efektivitas audit internal telah terbukti secara empiris (Al-Twaijry, *et al.*, 2003; Mihret, *et al.*, 2010; Cohen dan Sayag, 2010; Alzeban dan Gwilliam, 2014; Baharud-din, *et al.*, 2014). Lebih lanjut Alzeban dan Gwilliam (2014) menambahkan bahwa kurangnya independensi sebagai kendala utama kinerja audit internal di sejumlah negara berkembang. Dari uraian di atas, maka hipotesis pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H2: Independensi organisasi audit internal berpengaruh terhadap efektivitas audit internal.

3.2.3. Pengaruh Hubungan Antara Auditor Internal Dan Eksternal terhadap Efektivitas Audit Internal

Hubungan antara auditor internal dan eksternal menurut Alzeban dan Gwilliam (2014) dapat dilihat dari koordinasi (termasuk membahas kepentingan bersama) yang meliputi pembahasan rencana audit, berbagi kertas kerja,

kepercayaan auditor eksternal pada pekerjaan audit internal dan dukungan manajemen atas hubungan yang terjalin antara internal dan eksternal auditor. Seorang auditor internal harus dapat membina hubungan baik dengan auditor eksternal untuk meningkatkan kegiatan audit intern yang efektif dan memberikan nilai tambah bagi auditi ketika memberikan jaminan obyektif dan relevan, dan berkontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian.

Menurut AAPI (2014), bahwa pimpinan organisasi audit internal harus mengelola kegiatan audit internal, di antaranya melakukan koordinasi dan membagi informasi dengan auditor eksternal, koordinasi dilakukan dengan menyampaikan rencana kegiatan audit internal tahunan serta hasil-hasil kegiatan audit internal yang telah dilakukan APIP selama periode yang akan dilakukan pemeriksaan oleh auditor eksternal. Dengan menyampaikan hasil-hasil kegiatan audit internal, auditor eksternal diharapkan akan menggunakan hasil tersebut untuk mengurangi lingkup penugasannya.

Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara auditor internal dan eksternal mempunyai peranan penting dan bermanfaat bagi masing-masing organisasi dan mendukung teori kontinjensi yang menekankan pentingnya kontinjensi eksternal untuk mencapai tujuan organisasi. Faktor hubungan antara auditor internal dan eksternal dapat memengaruhi efektivitas audit internal. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hubungan antara auditor internal dan eksternal yang tepat akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas audit internal (Alzeban dan Gwilliam, 2014). Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Asiedu dan Deffor (2017) yang menemukan bahwa hubungan dengan auditor eksternal berpengaruh pada efektivitas fungsi audit internal. Penelitian lain yang dilakukan Al-Garni (2008) di Arab Saudi, menunjukkan bahwa kurangnya kerjasama antara auditor eksternal dan auditan mempengaruhi

efektivitas auditor eksternal terutama selama pembahasan dan tindak lanjut atas rekomendasi (Alzeban dan Gwilliam, 2014). Dari uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Hubungan antara auditor internal dan eksternal berpengaruh terhadap efektivitas audit internal.

3.2.4. Pengaruh Dukungan Manajemen terhadap Efektivitas Audit Internal

Dukungan manajemen terhadap efektivitas audit internal telah terbukti secara empiris (Cohen dan Sayag, 2010; Alzeban dan Gwilliam, 2014; Baharuddin, *et al.*, 2014). Menurut Sawyer (1988) dukungan manajemen merupakan faktor keberhasilan dari fungsi audit internal (Cohen dan Sayag, 2010). Tanpa dukungan dari manajemen maka efektivitas audit internal tidak akan tercapai. Kondisi ini ditegaskan dalam teori kontinjensi bahwa sistem yang diterapkan dan bersifat efektif pada suatu organisasi belum tentu akan berhasil bila diterapkan pada organisasi lain yang memiliki karakteristik berbeda karena adanya faktor-faktor kontinjensi. Efektivitas audit internal bergantung pada variabel-variabel penghubungnya, salah satunya adalah variabel dukungan manajemen.

Menurut Alzeban dan Gwilliam (2014) dukungan manajemen berupa isyarat kepada semua unsur di organisasi tentang pentingnya peran dan nilai audit internal yang akan memberikan dampak signifikan bagi kelancaran kegiatan audit internal di organisasi. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tanpa dukungan manajemen, proses audit internal cenderung mengalami kegagalan dan hanya membuang waktu dan biaya (Baharuddin, *et al.*, 2014). Hasil penelitian Ahmad, *et al.* (2009) menunjukkan bahwa ketika auditor internal di sektor publik Malaysia tidak mendapatkan dukungan berupa peningkatan kompetensi yang cukup dari manajemen, auditor internal tidak dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini berarti bahwa manajemen dapat

menunjukkan dukungannya dengan cara menyediakan pendanaan untuk meningkatkan kompetensi auditor internal. Dukungan yang lain berupa keterlibatan dalam rencana audit internal tahunan yang akan dilaksanakan dan menerima laporan kerja audit internal yang disampaikan oleh pimpinan organisasi audit internal (Alzeban dan Gwilliam, 2014).

Audit internal tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari manajemen, baik dalam wujud anggaran yang cukup serta sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu dukungan juga dapat berupa kondisi yang kondusif bagi para auditor internal, sehingga dalam menjalankan tugasnya mereka tidak akan terbebani dengan hal-hal di luar ruang lingkup penugasannya. Dengan adanya dukungan tersebut, auditor akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang tepat dan dapat memberikan nilai tambah bagi auditi. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4: Dukungan manajemen berpengaruh terhadap efektivitas audit internal.

3.2.5. Pengaruh Efektivitas Audit Internal terhadap Korupsi

Organisasi sektor publik memiliki jangkauan wilayah yang luas, serta mempunyai sistem yang kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Sumber pendanaan organisasi sektor publik berasal dari pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN/BUMD, dan penjualan asset. Pertanggungjawaban publik tersebut merupakan elemen yang penting dari proses akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2009:9-10). Sehingga wajar apabila masyarakat menuntut pada organisasi sektor publik untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya. Masyarakat berhak memaksa organisasi sektor publik untuk lebih efektif dan efisien, supaya uang rakyat dapat digunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan mengurangi risiko korupsi. Untuk memenuhi harapan masyarakat tersebut, diperlukan komitmen yang lebih kuat dalam

mengelola risiko korupsi agar risiko kerugian akibat korupsi dapat dikurangi. Dampak buruk dari korupsi tidak hanya dari dimensi ekonomi yaitu merugikan hajat hidup masyarakat luas, tetapi juga dari dimensi sosial politik dan etika (Argandona, 2001).

Efektivitas audit internal menjadi hal yang penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Teori agensi menjelaskan bahwa agen akan melaksanakan kegiatan sesuai mandat dari prinsipal. Masyarakat sebagai prinsipal (pemilik) menginginkan agen (pemerintah) melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Agen memiliki motif cenderung mengambil kesempatan untuk bertindak melawan kepentingan prinsipal (Adams, 1994). Namun demikian, agen akan menunjukkan kepada prinsipal bahwa mereka memiliki motivasi yang sama dengan mengeluarkan *bonding cost* (misalnya untuk audit internal). Oleh karena itu, dilakukan efektivitas fungsi audit internal sebagai bagian dari *good governance* (Coram, *et al.* 2008) antara lain untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan yang mungkin terjadi di organisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Salameh, *et al.* (2011) dan Asiedu dan Deffor (2017) membuktikan bahwa efektivitas audit internal dapat mencegah korupsi/kecurangan di organisasi. Pada penelitian ini, peneliti berhipotesis bahwa efektivitas audit internal antara lain tergantung pada kompetensi auditor internal, independensi organisasi audit internal, hubungan antara auditor internal dan eksternal, dan dukungan manajemen. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H5: Efektivitas audit internal berpengaruh terhadap korupsi.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian survei yaitu penelitian yang mengambil sampel secara langsung dari populasi. Dilihat dari tujuan penelitian, penelitian ini merupakan penelitian eksploratori (*exploratory research*). Arikunto (2006: 7) menyatakan penelitian eksploratori bertujuan untuk menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang memengaruhi terjadinya sesuatu. Jenis penelitian ini merupakan salah satu pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti sesuatu (yang menarik perhatian) yang belum diketahui, belum dipahami, atau belum dikenali dengan baik. Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya tentang hubungan antara efektivitas audit internal terhadap korupsi serta pengaruh variabel kompetensi auditor internal, independensi organisasi audit internal, hubungan antara auditor internal dan eksternal, dan dukungan manajemen terhadap efektivitas audit internal.

4.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah auditor internal atau APIP yang memiliki sertifikat Jabatan Fungsional Auditor (JFA) sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (2014) yang mengatur kegiatan audit intern yang wajib dipedomani oleh auditor dan pimpinan APIP berdasarkan kriteria atau mutu yang telah ditentukan. Jumlah seluruh JFA di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama berjumlah 252 auditor Inspektorat (Itjen, 2017).

Penyampelan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik penyampelan acak sederhana (*simple random sampling*) dengan pertimbangan

bahwa teknik penyampelan acak sederhana efektif dan efisien digunakan pada populasi yang bersifat homogen. Populasi pada penelitian ini memiliki kesamaan (homogen) yaitu auditor Inspektorat yang telah memiliki jabatan fungsional sebagai auditor. Homogenitas populasi akan menentukan teknik pemilihan sampel dan jumlah sampel untuk mencapai akurasi dan presisi hasil penelitian (Abdillah dan Hartono, 2015:62). Penentuan besarnya sampel dalam penelitian inidihitung dengan menggunakan rumus Slovin (Silalahi, 2015:389), yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot e^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

= Persentase kelonggaran ketidaktelitian (5%)

Berdasarkan rumus di atas diperoleh sampel sejumlah 154 auditor Inspektorat dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} n &= \frac{252}{1 + 252 (0.05)^2} \\ &= 154 (61 \%) \end{aligned}$$

Itjen Kementerian Agama (Kemenag) saat ini terbagi atas empat Inspektorat Wilayah dan satu Inspektorat Investigasi. Pemilihan sampel di setiap Inspektorat menggunakan *cluster sampling*, yaitu sampel diambil secara acak dengan jumlah populasi auditor di setiap wilayah inspektorat. Adapun jumlah populasi dan sampel penelitian dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Daftar Populasi dan Sampel Penelitian

NO	Wilayah Inspektorat	Populasi	Sampel
1	Wilayah 1	52	32
2	Wilayah 2	51	31
3	Wilayah 3	51	31
4	Wilayah 4	52	32
5	Investigasi	46	28
Jumlah		252	154

Sumber: Itjen Kemenag 2017 (Diolah)

4.3. Metode Pengumpulan Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan teknik survei untuk mendapatkan data primer melalui kuesioner yang diberikan kepada auditor Itjen Kementerian Agama. Kuesioner penelitian disampaikan oleh peneliti secara langsung dengan mendatangi responden (*personally administered questionnaires*). Kuesioner penelitian ini berisi tentang data demografi responden dan bagian lainnya berisi serangkain pernyataan untuk mengukur persepsi responden tentang korupsi, efektivitas audit internal, kompetensi auditor internal, independensi organisasi audit internal, hubungan antara auditor internal dan eksternal, dan dukungan manajemen.

Peneliti melakukan beberapa tahap sebelum menyebarkan kuesioner kepada responden, yaitu:

1. Menerjemahkan instrumen asli penelitian terdahulu yang berbahasa inggris menjadi bahasa Indonesia agar mudah dimengerti dan dipahami oleh responden.

2. Melakukan penyesuaian item pernyataan dalam instrumen penelitian dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, singkat, jelas dan menggunakan istilah yang disesuaikan dengan kondisi sektor publik di Indonesia.
3. Melakukan *pilot test* untuk menguji tingkat validitas dan reabilitas dari instrumen penelitian. *Pilot test* dilakukan pada 30 responden yakni auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. Adapun uji instrumen menggunakan kriteria (*rule of thumb*) pada evaluasi model pengukuran (*outer model*) dalam analisis SEM-PLS.

4.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Konstruk

Definisi operasional menjelaskan karakteristik dari suatu objek ke dalam elemen-elemen yang dapat diamati sehingga konsep tersebut dapat diukur dan dioperasionalkan dalam suatu penelitian (Hartono, 2004:62). Definisi operasional menjelaskan makna dan skala pengukuran dari setiap variabel penelitian, yaitu korupsi, efektivitas audit internal, kompetensi auditor internal, independensi organisasi audit internal, hubungan antara auditor internal dan eksternal, dan dukungan manajemen. Menurut Sholihin dan Ratmono (2013:5) variabel laten atau konstruk diukur melalui indikatornya. Variabel laten dalam SEM dapat berupa variabel eksogen, variabel endogen, variabel mediasi dan variabel intervening.

Penelitian ini menggunakan variabel laten atau konstruk endogen dan konstruk eksogen. Konstruk endogen adalah konstruk yang dipengaruhi oleh konstruk lain disebut juga variabel dependen. Konstruk eksogen adalah konstruk yang tidak dipengaruhi oleh konstruk lain disebut juga variabel independen. Konstruk endogen yang termasuk dalam penelitian ini yaitu Efektivitas Audit Internal (EAI) dan Korupsi (KOR). Konstruk eksogen atau variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari Kompetensi Auditor (KO), Independensi

Organisasi Audit Internal (IN), Hubungan antara Auditor Internal dan Eksternal (HA), dan Dukungan Manajemen (DM).

Berdasarkan tipe operasionalisasi atau pengukuran konstruk, indikator dalam penelitian ini merupakan jenis reflektif karena indikator merupakan perwujudan atau refleksi dari konstraknya (Sholihin dan Ratmono, 2013:19). Konstruk reflektif memiliki tema sama tiap indikator. Hartono dan Abdillah (2009:37) menyatakan bahwa konstruk reflektif memprediksi bahwa pengukuran harus berkorelasi kuat karena memiliki kesamaan penyebab dan konsekuensi yang sama secara konseptual dapat dipertukarkan. Oleh karena itu, membuang salah satu indikator reflektif tidak menjadi masalah dan tidak mengubah esensi konstruk.

4.4.1. Konstruk Korupsi

Korupsi dalam penelitian ini mengacu pada korupsi yang dinyatakan oleh Asiedu dan Deffor (2017) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Instrumen pengukuran merujuk pada penelitian Asiedu dan Deffor (2017) dengan beberapa modifikasi disesuaikan dengan bentuk korupsi menurut UU pemberantasan tindak pidana korupsi. Indikator korupsi adalah benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, perbuatan curang dalam pengadaan barang dan jasa, gratifikasi, pemerasan, penyalahgunaan jabatan, suap-menyuap, kerugian keuangan negara, Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari tata kelola organisasi berperan memerangi korupsi, dan upaya pencegahan korupsi oleh auditor Inspektorat.

Variabel korupsi diukur melalui 9 (Sembilan) pertanyaan dengan 7 skala likert dari sangat tidak setuju (7) sampai sangat setuju (1). Semakin rendah skor konstruk ini menunjukkan korupsi dapat dicegah. Semakin tinggi skor konstruk ini menunjukkan korupsi belum dapat dicegah.

4.4.2. Konstruk Efektivitas Audit Internal

Efektivitas audit internal dalam penelitian ini termasuk dalam konstruk endogen. Efektivitas audit internal yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada efektivitas audit internal yang dinyatakan oleh Alzeban dan Gwilliam (2014), yaitu sejauh mana audit internal dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pengukuran konstruk efektivitas audit internal dalam penelitian ini menggunakan konsep efektivitas audit internal yang digunakan oleh Alzeban dan Gwilliam (2014) yaitu kualitas dari fungsi audit internal.

Konstruk tersebut diukur melalui indikator yang terdiri atas 15 pertanyaan yaitu yang berhubungan dengan: (1) meningkatkan produktivitas, (2) meningkatkan kinerja (3), revidi atau evaluasi kegiatan dan program, (4) revidi ketepatan dan keandalan laporan keuangan, (5) revidi kepatuhan atas kebijakan, rencana, prosedur dan peraturan, (6) revidi atas UU dan peraturan eksternal, (7) revidi keekonomisan, keefektifan dan efisiensi, (8) evaluasi dan efektivitas manajemen risiko, (9) revidi atas aset, metode dan sistem, (10) kecukupan dan keefektifan sistem akuntansi dan kontrol terhadap kegiatan, (11) evaluasi SPI unit kerja, (12) evaluasi dan pembuatan rekomendasi, (13) mengembangkan rencana audit tahunan, (14) rekomendasi dalam laporan hasil audit internal, dan (15) tindak lanjut yang memadai. Variabel efektivitas audit internal diukur melalui 15 (lima belas) pertanyaan dengan 7 skala likert dari sangat tidak setuju (1) sampai sangat setuju (7). Semakin tinggi skor konstruk ini menunjukkan fungsi audit internal semakin efektif. Semakin rendah skor konstruk ini menunjukkan fungsi audit internal tidak efektif.

4.4.3. Konstruk Kompetensi Auditor Internal

Auditor kompeten yang dimaksud adalah yang mempunyai kualifikasi pendidikan, profesionalisme, pengalaman audit dan pelatihan atau *training* audit yang diikuti oleh auditor internal (Alzeban dan Gwilliam, 2014). Indikator untuk

mengukur kompetensi auditor internal diadopsi dari penelitian Alzeban dan Gwilliam (2014) dan telah dikembangkan oleh Aisedu dan Deffor (2017) dan penelitian Baheri (2016) serta dimodifikasi oleh peneliti, disesuaikan dengan objek penelitian. Instrumen penelitian ini menggunakan 9 pertanyaan yang berkaitan dengan pendidikan, pengalaman audit, pelatihan atau *training* yang diikuti, auditor bersertifikat, jumlah auditor bersertifikat, penguasaan auditor pada teknologi modern, prosedur dan pengumpulan bukti audit, audit dan *monitoring* tepat waktu, serta sesuai lingkup penugasan yang direncanakan.

Kompetensi auditor internal diukur melalui 9 pertanyaan dengan 7 skala likert dari sangat tidak setuju (1) sampai sangat setuju (7). Semakin tinggi skor konstruk ini menunjukkan kompetensi auditor internal semakin handal. Semakin rendah skor konstruk ini menunjukkan kompetensi auditor internal semakin buruk.

4.4.4. Konstruk Independensi Organisasi Audit Internal

Independensi organisasi audit internal yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Alzeban dan Gwilliam (2014), yaitu bagaimana independensi organisasi audit internal dapat ditegakkan dalam penugasan audit internal. Indikator untuk mengukur independensi organisasi audit internal diadopsi dari Alzeban dan Gwilliam (2014) yang telah dimodifikasi oleh peneliti untuk disesuaikan dengan objek penelitian. Indikator independensi organisasi audit internal terdiri dari 9 pertanyaan yang berkaitan dengan melaksanakan audit secara mandiri, melapor ke pimpinan kementerian/lembaga, akses langsung dengan pimpinan kementerian/lembaga, konflik kepentingan, tidak mendapat intervensi, memiliki akses tidak terbatas pada unit kerja dan pegawainya, pengangkatan pimpinan organisasi audit internal tidak berada dalam kendali langsung manajemen eksekutif, dan tidak berkewajiban melakukan fungsi non audit.

Independensi organisasi audit internal diukur melalui 9 pertanyaan dengan 7 skala likert dari sangat tidak setuju (1) sampai sangat setuju (7). Semakin tinggi skor konstruk ini menunjukkan independensi organisasi audit internal semakin baik dan sebaliknya semakin rendah skor konstruk ini maka menunjukkan organisasi audit internal kurang independen.

4.4.5. Konstruk Hubungan Antara Auditor Internal Dan Eksternal

Hubungan antara auditor internal dan eksternal ini merujuk pada seberapa baik hubungan yang dapat terjalin antara auditor internal dan eksternal terkait audit di organisasi pemerintah. Indikator pengukuran hubungan antara auditor internal dan eksternal mengacu pada penelitian Alzeban dan Gwilliam (2014) yang terdiri dari 9 pertanyaan yang berhubungan dengan bersikap ramah dan mendukung, memiliki sikap yang sopan, memberi kesempatan kepada Inspektorat untuk menjelaskan kepentingannya, koordinasi (termasuk membahas tentang kepentingan bersama), pembahasan rencana audit, tingkat kepercayaan auditor eksternal terhadap pekerjaan audit internal, frekuensi pertemuan, berbagi kertas kerja, dan dukungan manajemen atas hubungan antara kedua organisasi tersebut.

Konstruk hubungan antara auditor internal dan eksternal diukur melalui 9 pertanyaan dengan 7 skala likert dari sangat tidak setuju (1) sampai sangat setuju (7). Semakin tinggi skor konstruk ini menunjukkan hubungan antara auditor internal dan eksternal semakin baik. Semakin rendah skor konstruk ini menunjukkan hubungan antara auditor internal dan eksternal kurang baik.

4.4.6. Konstruk Dukungan Manajemen

Dukungan manajemen ini menunjuk pada seberapa besar dukungan pimpinan Kementerian Agama pada peran audit internal di Inspektorat. Indikator pengukuran dukungan manajemen mengacu pada penelitian Alzeban dan

Gwilliam (2014) yang terdiri dari 6 pertanyaan yang berhubungan dengan mendukung audit internal, keterlibatan dalam rencana audit internal, laporan kerja tim audit internal disampaikan kepada manajemen, tanggapan manajemen atas laporan audit internal, serta sumber daya dan anggaran yang cukup.

Dukungan manajemen diukur melalui 6 pertanyaan dengan 7 skala likert dari sangat tidak setuju (1) sampai sangat setuju (7). Semakin tinggi skor konstruk ini menunjukkan dukungan manajemen semakin baik. Semakin rendah skor konstruk ini menunjukkan kurangnya dukungan manajemen. Konstruk dan indikator yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 4.2.

4.5. Metode Pengujian Instrumen Penelitian

4.5.1. Metode Pengujian Validitas

Cooper, *et al.* (2006) menyatakan bahwa pengujian validitas konstruk dilakukan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian mampu mengukur konsep yang diuji dalam model penelitian secara valid (Abdillah dan Hartono, 2015:194). Pengujian validitas pada penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui valid tidaknya indikator dalam mengukur variabel korupsi, efektivitas audit internal, kompetensi auditor internal, independensi organisasi audit internal, hubungan antara auditor internal dan eksternal, dan dukungan manajemen. Menurut Hartono (2008) pengujian validitas konstruk tersebut menggambarkan seberapa baik hasil yang didapatkan dari penggunaan suatu pengukuran sesuai teori-teori yang digunakan untuk mendefinisikan suatu konstruk (Abdillah dan Hartono, 2015:59). Validitas konstruk terdiri dari:

- a. Validitas konvergen, yaitu berhubungan dengan prinsip bahwa indikator dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi dan memiliki skor *loading* yang cukup.

Tabel 4.2
Ringkasan Konstruk dan Indikator

No	Konstruk dan Sumber Acuan	Indikator	Kode
1	Kompetensi Auditor (KO) Alzeban dan Gwillian (2014) Asiedu dan Deffor (2017)	1. Pendidikan 2. Pengalaman audit 3. Pelatihan/Training audit yang diikuti 4. Auditor bersertifikat 5. Jumlah auditorbersertifikat 6. Penguasaan teknologi modern 7. prosedur dan pengumpulan bukti audit tepat waktu 8. audit dan monitoring tepat waktu 9. audit dan monitoring sesuai lingkup penugasan yang direncanakan	KO1 KO2 KO3 KO4 KO5 KO6 KO7 KO8 KO9
2	Independensi Organisasi (IN) Alzeban dan Gwillian (2014)	1. Penugasan audit secara mandiri 2. Melapor ke pimpinan kementerian 3. Inspektur memiliki akses langsung ke pimpinan Kementerian 4. Inspektorat memiliki akses langsung ke pimpinan kementerian 5. Konflik kepentingan 6. Tidak terjadi intervensi 7. Akses tdk terbatas ke Unit kerja 8. Pengangkatan dan pemberhentian Inspektur oleh pimpinan kementerian/lembaga 9. Tidak berkewajiban melakukan fungsi non audit.	IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 IN7 IN8 IN9
3	Hubungan antara Auditor Internal dan Eksternal (HA) Alzeban dan Gwillian (2014)	1. Bersikap ramah dan mendukung auditor internal 2. Memiliki sikap yang baik 3. Memberi kesempatan Inspektorat menjelaskan kepentingannya 4. Koordinasi (termasuk membahas tentang kepentingan bersama) 5. Pembahasan rencana audit 6. Kepercayaan auditor eksternal pada pekerjaan auditor internal 7. Frekwensi pertemuan 8. Berbagi kertas kerja 9. Dukungan manajemen atas hubungan antara auditor internal dan eksternal	HA1 HA2 HA3 HA4 HA5 HA6 HA7 HA8 HA9
4	Dukungan Manajemen (DM) Alzeban dan Gwillian (2014)	1. Mendukung audit internal 2. Keterlibatan pada rencana audit 3. Manajemen menerima laporan 4. Tanggapan atas laporan audit 5. Sumber daya yang cukup 6. Anggaran yang cukup	DM1 DM2 DM3 DM4 DM5 DM6

Lanjutan Tabel 4.2 Ringkasan Konstruk dan Indikator

5	Efektivitas Audit Internal (EAI) Alzeban dan Gwillian (2014)	1. Meningkatkan produktivitas 2. Meningkatkan kinerja 3. Reviu kegiatan dan program 4. Reviu ketepatan, keandalan 5. Reviu kepatuhan kebijakan, rencana, prosedur 6. Reviu kepatuhan UU dan peraturan eksternal 7. Reviu keekonomisan, keefektifan dan efisiensi 8. Evaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko 9. Reviu atas aset 10. Kecukupan dan keefektifan sistem akt & pengendalian 11. Evaluasi SPI unit kerja 12. Evaluasi dan rekomendasi 13. Mengembangkan rencana audit tahunan 14. Tindakan rutin audit 15. Tindakan lanjut yg memadai	EAI1 EAI2 EAI3 EAI4 EAI5 EAI6 EAI7 EAI8 EAI9 EAI10 EAI11 EAI12 EAI13 EAI14 EAI15
6	Korupsi (KOR) Asiedu dan Deffor (2017) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001	1. Benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa 2. Perbuatan curang dalam pengadaan barang dan jasa 3. Gratifikasi 4. Pemerasan 5. Penyalahgunaan jabatan 6. Suap menyuap 7. Kerugian keuangan negara 8. Organisasi audit internal 9. Auditor internal	KOR1 KOR2 KOR3 KOR4 KOR5 KOR6 KOR7 KOR8 KOR9

Sumber: Data diolah (2017)

Indikator dari masing-masing konstruk akan diuji validitasnya untuk mengetahui indikator mana saja dari konstruk yang memiliki *loading factor* cukup (> 0.6) dan dapat dinyatakan valid dalam mengukur konstruknya. Validitas konvergen selain dapat dilihat melalui *loading factor*, juga dapat diketahui melalui *Average Variance Extracted* (AVE) dan *Communality*. AVE adalah rata-rata varians keseluruhan indikator yang diekstraksi dari variabel laten. Suatu instrumen dikatakan memenuhi pengujian validitas konvergen apabila memiliki AVE di atas 0.5. Artinya bahwa rata-rata varians keseluruhan indikator yang dijelaskan oleh variabel latennya minimal 50%.

Communality adalah ukuran kualitas model pengukuran pada tiap variabel laten. Sebuah indikator dinyatakan memiliki *convergent validity* apabila nilai *communality* 0.5, artinya bahwa kualitas model pengukuran pada tiap variabel laten minimal 50%.

- b. Validitas diskriminan berhubungan dengan prinsip bahwa indikator pada konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi tinggi. Sebuah indikator dinyatakan memiliki *discriminant validity* apabila *loading factor* tiap indikator yang mengukur variabel latennya lebih besar dari nilai *cross loading* (korelasi indikator dengan variabel laten lainnya) maka indikator tersebut dinyatakan valid dalam mengukur variabel latennya.

4.5.2. Metode Pengujian Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk membuktikan konsistensi, akurasi, dan ketepatan instrumen dalam mengukur konstruk korupsi, efektivitas audit internal, kompetensi auditor internal, independensi organisasi audit internal, hubungan antara auditor internal dan eksternal, dan dukungan manajemen. Hal ini berarti apakah item/indikator dari instrumen tersebut dapat digunakan untuk melakukan pengukuran lebih dari dua kali dengan hasil yang akurat. Menurut Chin (1995) metode yang digunakan dalam uji reliabilitas yaitu *Cronbach's alpha* dan *Composite reliability* (Abdillah dan Hartono, 2015:196). *Cronbach's alpha* digunakan untuk mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk dan *composite reliability* digunakan untuk mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk. Berikut uraian *rule of thumb* validitas dan reliabilitas model pengukuran PLS yang disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Rule of Thumb Validitas dalam Model Pengukuran PLS

Kriteria	Parameter	Rule of Thumb
Uji Validitas		
<i>Convergent Validity</i>	<i>Avarage Variance Extracted</i>	> 0.50 untuk <i>confirmatory research</i> dan <i>exploratory research</i>
	<i>Loading Factor</i>) > 0.70 untuk <i>confirmatory research</i>) 0.60 - 0.70 masih dapat diterima untuk <i>exploratory research</i>
	<i>Communality</i>	> 0.50 untuk <i>confirmatory research</i> dan <i>exploratory research</i>
<i>Discriminant Validity</i>	Akar kuadrat AVE dan korelasi antar variabel laten	Akar kuadrat AVE > Korelasi antar Variabel Laten
	<i>Cross Loading</i>	> 0.70 dalam satu variabel laten
Uji Reabilitas		
<i>Cronbach's Alpha</i>) > 0.70 untuk <i>confirmatory research</i>) > 0.60 untuk <i>exploratory research</i>
<i>Composite Reliability</i>) > 0.70 untuk <i>confirmatory research</i>) 0.60 - 0.70 masih dapat diterima untuk <i>exploratory research</i>

Sumber: Ghazali dan Latan (2014:95)

4.6. Metode Analisa Data

4.6.1. Metode Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah analisa dengan cara mendeskripsikan karakteristik variabel penelitian yang sedang diamati dan data demografi responden. Salah satu metode yang sering digunakan untuk analisis deskriptif adalah statistik deskriptif yang bertujuan untuk memaparkan atau mendeskripsikan profil data penelitian (Abdillah dan Hartono, 2015:87). Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dalam penelitian yang meliputi: usia responden, jenis kelamin responden, tingkat pendidikan responden, latar belakang pendidikan, jabatan auditor, masa kerja, jam pelatihan pertahun dan diklat kompetensi yang pernah diikuti auditor Inspektorat. Selain itu analisis deskriptif juga digunakan untuk menjelaskan persepsi responden terhadap konstruk penelitian kompetensi auditor internal, independensi organisasi audit internal, hubungan antara auditor internal dan eksternal, dukungan manajemen, efektivitas audit internal dan korupsi.

Gambaran atau deskripsi data penelitian dinilai dari rata-rata (*mean*), frekuensi kemunculan terbesar (modus), simpangan baku (standar deviasi), varian minimum dan maksimum. Proses tabulasi data penelitian dilakukan dengan mengkategorikan rata-rata data hasil penelitian ke dalam skala interval sebesar 0,86 yang dihitung dengan skor tertinggi dikurangi skor terendah dibagi 7.

4.6.2. Metode Analisis Inferensial

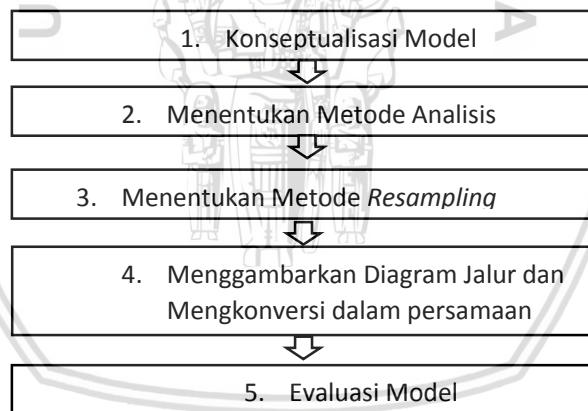
Analisis Inferensial bertujuan menguji hubungan antarvariabel atau indikator dalam suatu model atau data penelitian. Model penelitian ini terdiri dari kompetensi auditor internal, independensi organisasi audit internal, hubungan antara auditor internal dan eksternal serta dukungan manajemen sebagai variabel eksogen, serta efektivitas audit internal dan korupsi sebagai variabel endogen. Model penelitian ini dapat dikatakan sebagai model yang kompleks karena terdapat dua variabel endogen. Mengacu pada pendapat Abdillah dan Hartono (2015:79) bahwa teknik statistika SEM (*Structural Equation Model*) merupakan pilihan yang tepat untuk model penelitian yang kompleks, peneliti menggunakan pendekatan PLS (*Partial Least Square*) untuk menguji pengaruh variabel kompetensi auditor internal, independensi organisasi audit internal, hubungan antara auditor internal dan eksternal serta dukungan manajemen terhadap variabel efektivitas audit internal dan variabel efektivitas audit internal terhadap variabel korupsi dengan mempertimbangkan semua indikator yang mengukur variabel laten tersebut.

Alasan menggunakan SEM-PLS adalah berdasarkan pertimbangan bahwa (1) PLS dapat digunakan untuk memprediksi model dengan landasan teori yang lemah, (2) dapat digunakan pada konstruk reflektif dan formatif, yang dalam hal ini penelitian ini menggunakan konstruk reflektif, dan (3) mampu memodelkan banyak konstruk eksogen dan konstruk endogen (Abdillah dan

Hartono, 2015:164-165). Model spesifikasi dalam PLS terdiri atas tiga tipe hubungan, yaitu model pengukuran (*Measurement Model*) atau sering disebut *Outer Model*, model struktural (*Structural Model*) atau sering disebut *Inner Model* dan *weight relation*.

Model pengukuran merupakan spesifikasi hubungan antara variabel laten dengan indikatornya yang menjelaskan karakteristik variabel laten dengan indikatornya. Model struktural merupakan spesifikasi hubungan antar variabel laten dan *weight relation* adalah pendugaan skor atau pembobot oleh indikator terhadap variabel laten. *Weight relation* digunakan untuk mendapatkan nilai skor untuk variabel laten. Langkah-langkah analisis data menggunakan SEM-PLS menurut Ghazali dan Latan (2015:47) dijelaskan seperti pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1
Langkah-langkah Analisis PLS



Sumber: Ghazali dan Latan (2015:47)

Adapun penjelasan langkah-langkah analisis PLS sebagai berikut:

1. Konseptualisasi model.

Peneliti harus mendefinisikan secara konseptual konstruk korupsi, efektivitas audit internal, kompetensi auditor internal, independensi organisasi audit internal, hubungan antara auditor internal dan eksternal, serta dukungan manajemen. Langkah selanjutnya menentukan dimensionalitas tiap-tiap

konstruk tersebut dan indikator pembentuk konstruk laten apakah berbentuk reflektif, formatif atau kombinasi keduanya, kemudian menentukan arah kausalitas antarkonstruk (Ghozali dan Latan, 2014:54). Konstruk-konstruk dan indikator dalam definisi operasional serta arah kausalitas antarkonstruk telah diuraikan pada bahasan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan 4 konstruk eksogen dan 2 konstruk endogen, yang masing-masing konstruk diukur dengan 6 hingga 15 indikator.

2. Menentukan metode analisis algoritma

Setelah melalui tahapan konseptualisasi model, selanjutnya menentukan metode analisis algoritma. Algoritma yang digunakan adalah SmartPLS 2.0. Dalam PLS-SEM menggunakan program SmartPLS ini, metode analisis algoritma yang disediakan hanyalah algoritma PLS dengan tiga pilihan skema yaitu: *factorial*, *centroid* dan *path* atau struktural *weighting*. Skema algoritma yang disarankan adalah *path* atau struktural *weighting* (Ghozali dan Latan, 2015:51).

3. Menentukan metode *resampling*

Menurut Ghozali dan Latan (2015:52) metode *resampling* (*bootstrapping*) digunakan untuk memperkirakan akurasi pengujian statistik dengan melakukan perulangan pada sampel asli yang akan diestimasi, sehingga diperoleh sampel sebanyak mungkin untuk setiap indikator dari konstruk korupsi, efektivitas audit internal, kompetensi auditor internal, independensi organisasi audit internal, hubungan antara auditor internal dan eksternal, serta dukungan manajemen. Dengan demikian didapatkan sampel yang berdistribusi normal dan tidak perlu dilakukan pengujian asumsi normalitas. Sampel yang dihasilkan dari *bootstrapping* dipilih secara acak kemudian dilakukan pendugaan parameter (estimasi) untuk mendapatkan nilai

parameter duga dan nilai *standard error* (SE), sehingga diperoleh nilai statistik uji t yang stabil.

4. Menggambarkan diagram jalur dan mengkonversi dalam persamaan

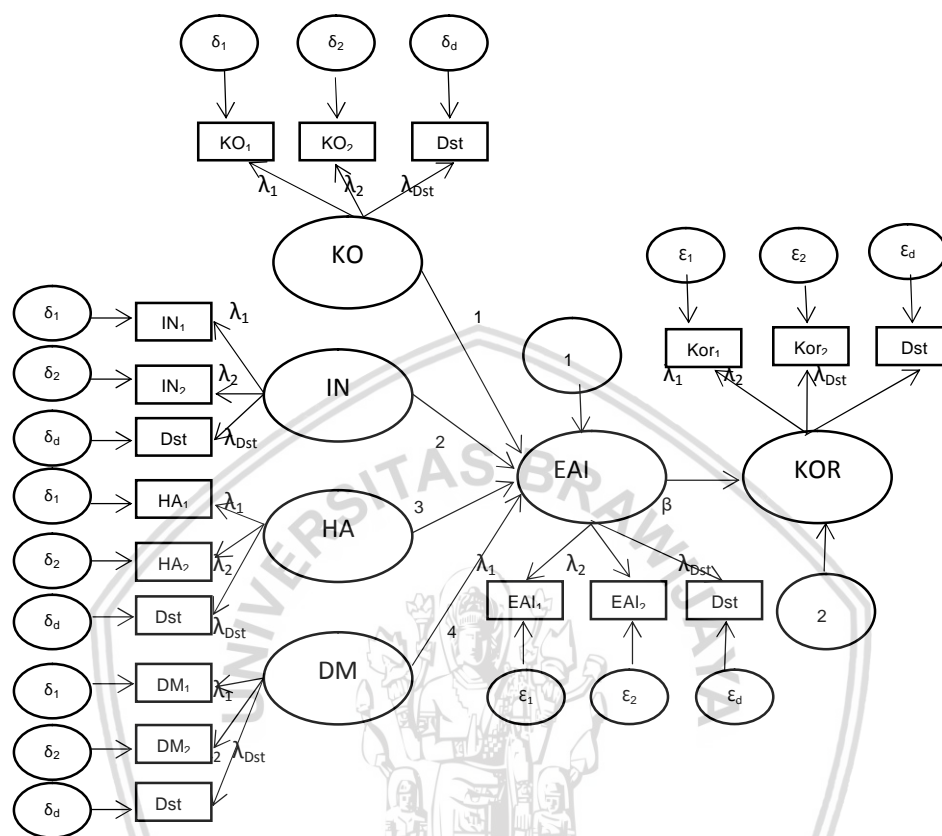
Langkah selanjutnya adalah menggambar diagram jalur dari model yang akan diestimasi. Falk dan Miller (1992) merekomendasikan prosedur *nomogram reticular action modeling* (RAM) sebagai berikut: (Ghozali dan Latan, 2015: 53)

- a. Konstruksi teoritis (*theoretical constructs*) yang menunjukkan variabel laten harus digambar dalam bentuk bulatan elips (*circle*) atau lingkaran.
- b. *Observed variable* atau indikator yang harus digambar dalam bentuk kotak atau *squares*.
- c. Pengaruh antar konstruk yang diteliti digambar seperti arah panah tunggal (*single headed arrow*).

Tujuan menggambar diagram jalur penelitian ini adalah untuk menggambarkan hubungan antarvariabel laten dan hubungan antara variabel laten korupsi, efektivitas audit internal, kompetensi auditor internal, independensi organisasi audit internal, hubungan antara auditor internal dan eksternal, serta dukungan manajemen dengan indikatornya. Diagram jalur penelitian ditunjukkan pada Gambar 4.2.

Berdasarkan konstruksi diagram jalur penelitian, dapat dibuat evaluasi model struktural (*inner model*). Model yang pertama adalah hubungan antara variabel eksogen kompetensi auditor internal (KO), independensi organisasi audit internal (IN), hubungan antara auditor internal dan eksternal (HA), serta dukungan manajemen (DM) terhadap variabel endogen efektivitas audit internal (EAI) dan model yang kedua menunjukkan hubungan antara efektivitas audit internal (EAI) terhadap korupsi (KOR).

Gambar 4.2
Diagram Jalur Penelitian



Keterangan:

- KO = Kompetensi Auditor Internal/konstruk eksogen 1
 IN = Independensi Organisasi/konstruk eksogen 2
 HA = Hubungan Auditor Internal dan Eksternal/konstruk eksogen 3
 DM = Dukungan Manajemen/konstruk eksogen 4
 EAI = Efektivitas Audit Internal/konstruk endogen 1
 KOR = Korupsi/konstruk endogen 2
 1 ... 2 = zeta, Error pada variabel endogen
 1...4 = gamma, koefisien jalur pengaruh variabel mediasi terhadap variabel endogen
 1...4 = gamma, koefisien jalur pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen
 $\lambda_{1...Dst}$ = lamda, koefisien pengukuran indikator reflektif terhadap variabel laten (*Loading Factor*)
 $\delta_{1...33}$ = delta, Error pengukuran variabel eksogen
 1...24 = epsilon, Error pengukuran variabel endogen

Model persamaan dapat ditulis sebagai berikut:

$$EAI = \beta_1 KO + \beta_2 IN + \beta_3 HA + \beta_4 DM + \zeta_1$$

$$KOR = \gamma_1 EAI + \zeta_2$$

Keterangan:

KO = Kompetensi Auditor Internal

IN = Independensi Organisasi Audit Internal

HA = Hubungan Auditor Internal dan Eksternal

DM = Dukungan Manajemen

EAI = Efektivitas Audit Internal

KOR = Korupsi

ζ_1, \dots, ζ_2 = zeta, Error pada variabel endogen

β_1, \dots, β_4 = beta, koefisien jalur pengaruh variabel mediasi terhadap variabel endogen

$\gamma_1, \dots, \gamma_4$ = gamma, koefisien jalur pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen

Persamaan *outer model* atau evaluasi model pengukuran pada setiap konstruk dimaksudkan untuk mengetahui kontribusi indikator dalam mengukur variabel laten kompetensi auditor internal (9 indikator), independensi organisasi audit internal (9 indikator), hubungan antara auditor internal dan eksternal (9 indikator), dukungan manajemen (6 indikator), efektivitas audit internal (15 indikator), dan korupsi (9 indikator). Persamaan *outer model* atau evaluasi model pengukuran pada setiap konstruk dapat dilihat pada Tabel 4.4.

5. Evaluasi model

Evaluasi model dalam analisis SEM-PLS dibagi atas evaluasi model pengukuran (*outer model*) dan evaluasi model struktural (*inner model*), yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Evaluasi model pengukuran (*outer model*)

Outer model atau evaluasi model pengukuran bertujuan untuk menspesifikasi hubungan antarkonstruk korupsi, efektivitas audit internal, kompetensi auditor internal, independensi organisasi audit internal, hubungan antara auditor internal dan eksternal, serta dukungan

manajemen dengan indikator manifestasinya (*measurement model*) untuk menilai validitas dan reliabilitas konstruk (Ghozali dan Latan, 2014:91).

Tabel 4.4
Persamaan *Outer Model*

Jenis Konstruk	Konstruk	Persamaan <i>Outer Model</i>
Konstruk Eksogen (Reflektif)	Kompetensi Auditor Internal (KO)	$KO_1 = \lambda_1 KO + \delta_1$ $KO_2 = \lambda_2 KO + \delta_2$ $KO_3 = \lambda_3 KO + \delta_3$ $KO_4 = \lambda_4 KO + \delta_4$ $KO_5 = \lambda_5 KO + \delta_5$ $KO_6 = \lambda_6 KO + \delta_6$ $KO_7 = \lambda_7 KO + \delta_7$ $KO_8 = \lambda_8 KO + \delta_8$ $KO_9 = \lambda_9 KO + \delta_9$
	Independensi Organisasi (IN)	$IN_1 = \lambda_1 IN + \delta_{10}$ $IN_2 = \lambda_2 IN + \delta_{11}$ $IN_3 = \lambda_3 IN + \delta_{12}$ $IN_4 = \lambda_4 IN + \delta_{13}$ $IN_5 = \lambda_5 IN + \delta_{14}$ $IN_6 = \lambda_6 IN + \delta_{15}$ $IN_7 = \lambda_7 IN + \delta_{16}$ $IN_8 = \lambda_8 IN + \delta_{17}$ $IN_9 = \lambda_9 IN + \delta_{18}$
	Hubungan Antara Auditor Internal dan Eksternal (HA)	$HA_1 = \lambda_1 HA + \delta_{19}$ $HA_2 = \lambda_2 HA + \delta_{20}$ $HA_3 = \lambda_3 HA + \delta_{21}$ $HA_4 = \lambda_4 HA + \delta_{22}$ $HA_5 = \lambda_5 HA + \delta_{23}$ $HA_6 = \lambda_6 HA + \delta_{24}$ $HA_7 = \lambda_7 HA + \delta_{25}$ $HA_8 = \lambda_8 HA + \delta_{26}$ $HA_9 = \lambda_9 HA + \delta_{27}$
	Dukungan Manajemen (DM)	$DM_1 = \lambda_1 DM + \delta_{28}$ $DM_2 = \lambda_2 DM + \delta_{29}$ $DM_3 = \lambda_3 DM + \delta_{30}$ $DM_4 = \lambda_4 DM + \delta_{31}$ $DM_5 = \lambda_5 DM + \delta_{32}$ $DM_6 = \lambda_6 DM + \delta_{33}$
Konstruk Endogen (Reflektif)	Efektivitas Audit Internal (EAI)	$EAI_1 = \lambda_1 EAI + \varepsilon_1$ $EAI_2 = \lambda_2 EAI + \varepsilon_2$ $EAI_3 = \lambda_3 EAI + \varepsilon_3$ $EAI_4 = \lambda_4 EAI + \varepsilon_4$ $EAI_5 = \lambda_5 EAI + \varepsilon_5$ $EAI_6 = \lambda_6 EAI + \varepsilon_6$ $EAI_7 = \lambda_7 EAI + \varepsilon_7$ $EAI_8 = \lambda_8 EAI + \varepsilon_8$ $EAI_9 = \lambda_9 EAI + \varepsilon_9$ $EAI_{10} = \lambda_{10} EAI + \varepsilon_{10}$ $EAI_{11} = \lambda_{11} EAI + \varepsilon_{11}$ $EAI_{12} = \lambda_{12} EAI + \varepsilon_{12}$

Lanjutan Tabel 4.4 Persamaan *Outer Model*

Jenis Konstruk	Konstruk	Persamaan <i>Outer Model</i>
		$EAI_{13} = \lambda_{13}EAI + \varepsilon_{13}$ $EAI_{14} = \lambda_{14}EAI + \varepsilon_{14}$ $EAI_{15} = \lambda_{15}EAI + \varepsilon_{15}$
Konstruk Endogen (Reflektif)	Korupsi (KOR)	$KOR_1 = \lambda_1 KOR + \varepsilon_{16}$ $KOR_2 = \lambda_2 KOR + \varepsilon_{17}$ $KOR_3 = \lambda_3 KOR + \varepsilon_{18}$ $KOR_4 = \lambda_4 KOR + \varepsilon_{19}$ $KOR_5 = \lambda_5 KOR + \varepsilon_{20}$ $KOR_6 = \lambda_6 KOR + \varepsilon_{21}$ $KOR_7 = \lambda_7 KOR + \varepsilon_{22}$ $KOR_8 = \lambda_8 KOR + \varepsilon_{23}$ $KOR_9 = \lambda_9 KOR + \varepsilon_{24}$

Sumber: Data diolah (2017)

Uji validitas dan reabilitas telah diuraikan pada subbab sebelumnya dengan *rule of thumb* yang tertuang dalam Tabel 4.3.

b. Evaluasi model struktural (*inner model*)

Pengujian evaluasi model struktural dilakukan untuk mengetahui tingkat akurasi model struktural dalam kaitannya dengan prediksi yang akan dilakukan yaitu pengaruh positif atau negatif dari variabel kompetensi auditor internal, independensi organisasi audit internal, hubungan antara auditor internal dan eksternal, dan dukungan manajemen terhadap efektivitas audit internal serta pengaruh efektivitas audit internal terhadap korupsi. Pengujian ini dilakukan dengan melihat Koefisien Determinasi (R^2) dan nilai *Q-Square predictive relevance* (Q^2) untuk mengetahui kontribusi variabel eksogen terhadap variabel endogen yang dihitung secara manual dengan rumus:

$$Q^2 = 1 - (1 - R^2) (1 - R^2)$$

Adapun *rule of thumb* evaluasi model struktural dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Rule of Thumb Evaluasi Model Struktural

Kriteria	Rule of Thumb
R-Square atau Adjusted R ²	0.70, 0.45 dan 0.25 menunjukkan model kuat, moderat dan lemah. Menunjukkan besarnya kontribusi variabel eksogen terhadap variabel endogen
Q ² predictive relevance	Q ² >0 menunjukkan model mempunyai predictive relevance dan jika Q ² <0 menunjukkan bahwa model kurang memiliki predictive relevance.

Sumber: Ghozali dan Latan (2014:106)

4.6.3. Pengujian Hipotesis

Pengujian signifikansi model struktural digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel eksogen kompetensi auditor internal, independensi organisasi audit internal, hubungan antara auditor internal dan eksternal, serta dukungan manajemen terhadap variabel endogen efektivitas audit internal dan variabel efektivitas audit internal terhadap variabel korupsi. Pengujian hipotesis (signifikansi) pada PLS dilakukan menggunakan statistik uji t dengan menerapkan metode *resampling (bootstrapping)* agar didapatkan statistik uji t yang stabil. Penerapan metode *resampling* tidak memerlukan distribusi normal dan jumlah sampel yang digunakan tidak besar dan direkomendasikan minimal 30 sampel (Ghozali dan Latan, 2015:51), penelitian ini menggunakan 154 sampel.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian dua sisi (*two-tailed*) untuk hipotesis 1 sampai 5. Pengujian hipotesis 1 sampai 5 diterima jika *t-statistic* > *t*-tabel (1,96) maka dinyatakan ada pengaruh signifikan variabel eksogen terhadap variabel endogen. Sebaliknya, jika *t-statistic* < *t*-tabel (1,96) maka dinyatakan tidak ada pengaruh signifikan variabel eksogen terhadap variabel endogen.

4.7. Pilot Test

Pilot test menggunakan SmartPLS 2.0 untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Peneliti mengevaluasi item-item pertanyaan dalam kuesioner dengan mengambil sampel kecil 30 responden untuk dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas. *Pilot test* dilakukan pada 30 responden yang dianggap mampu memahami tujuan penelitian ini, yakni auditor Itjen Kementerian Agama. Hasil *pilot test* dengan menggunakan *rule of thumbs* pengukuran *outer model* pada PLS menunjukkan bahwa dari 57 (lima puluh tujuh) indikator terdapat 18 (delapan belas) indikator yang harus dihilangkan karena nilai *loading factor*-nya lebih kecil dari 0,5 dan indikator yang valid berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) indikator.

4.7.1. Convergent Validity

Convergent validity dimaksudkan untuk mengetahui valid tidaknya indikator dalam mengukur variabel. *Convergent validity* setiap indikator dalam mengukur variabel ditunjukkan oleh besar kecilnya *loading factor*. Suatu indikator dikatakan valid apabila *loading factor* bernilai positif dan lebih besar 0.6. Hasil pengujian *Convergent Validity* disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Hasil Pengujian *Convergent Validity*

Variabel	Indikator	<i>Loading Factor</i>	SE	T Statistics	Keterangan
Kompetensi Auditor	KO.1	0.941	0.304	3.100	Valid
	KO.2	0.833	0.241	3.457	Valid
	KO.3	0.711	0.221	3.215	Valid
	KO.4	0.796	0.212	3.748	Valid
	KO.5	0.648	0.217	2.985	Valid
	KO.6	0.694	0.227	3.062	Valid
	KO.8	0.688	0.251	2.740	Valid
	KO.9	0.680	0.260	2.619	Valid

Lanjutan Tabel 4.6 *Convergent Validity*

Variabel	Indikator	Loading Factor	SE	T Statistics	Keterangan
Independensi Organisasi Audit Internal	IN.2	0.943	0.020	47.540	Valid
	IN.3	0.956	0.012	78.317	Valid
	IN.4	0.828	0.040	20.902	Valid
	IN.5	0.676	0.072	9.420	Valid
	IN.7	0.735	0.068	10.789	Valid
Hubungan Antara Auditor Internal dan Eksternal	HA.1	0.842	0.077	10.988	Valid
	HA.2	0.788	0.083	9.437	Valid
	HA.3	0.855	0.032	26.512	Valid
	HA.4	0.830	0.030	27.887	Valid
	HA.5	0.893	0.021	43.342	Valid
	HA.7	0.810	0.053	15.351	Valid
	HA.9	0.767	0.050	15.447	Valid
Dukungan Manajemen	DM.2	0.809	0.031	25.961	Valid
	DM.4	0.916	0.008	115.392	Valid
	DM.5	0.889	0.019	46.771	Valid
	DM.6	0.858	0.023	37.737	Valid
Efektivitas Audit Internal	EAI.1	0.804	0.027	29.291	Valid
	EAI.2	0.823	0.022	37.098	Valid
	EAI.3	0.865	0.021	41.911	Valid
	EAI.4	0.871	0.021	41.742	Valid
	EAI.5	0.842	0.027	31.374	Valid
	EAI.7	0.901	0.013	69.554	Valid
	EAI.9	0.879	0.015	58.409	Valid
	EAI.12	0.833	0.023	36.046	Valid
	EAI.13	0.847	0.026	32.871	Valid
	EAI.14	0.763	0.027	28.672	Valid
	EAI.15	0.811	0.018	44.602	Valid
Korupsi	KOR.1	0.867	0.022	40.206	Valid
	KOR.2	0.927	0.008	116.337	Valid
	KOR.3	0.895	0.016	55.256	Valid
	KOR.8	0.731	0.033	22.348	Valid

Sumber: Data diolah, 2017 (Lampiran 3)

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa indikator KO1–KO6, KO8–KO9, IN2 – IN5, IN7, HA1–HA5, HA7, HA9, DM2, DM4 – DM6, EAI1–EAI5, EAI7, EAI9, EAI12 –EAI15, KOR1– KOR3 dan KOR8 menghasilkan *loading factor* yang lebih besar dari 0.6. Dengan demikian indikator-indikator tersebut dinyatakan valid dalam mengukur variabel yang bersesuaian. *Convergent Validity* selain

dapat dilihat melalui *loading factor*, juga dapat diketahui melalui *Average Variance Extracted* (AVE). Suatu instrumen dikatakan memenuhi pengujian validitas konvergen apabila memiliki *Average Variance Extracted* (AVE) di atas 0.5. Hasil pengujian *Convergent Validity* disajikan dalam tabel 4.7.

Tabel 4.7
Hasil Pengujian *Convergent Validity* Nilai AVE

Variabel	AVE	Communality
Kompetensi Auditor	0.570	0.570
Independensi Organisasi Audit Internal	0.697	0.697
Hubungan Antara Auditor Internal dan Eksternal	0.684	0.684
Dukungan Manajemen	0.755	0.755
Efektivitas Audit Internal	0.707	0.707
Korupsi	0.736	0.736

Sumber: Data diolah, 2017 (Lampiran 3)

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa variabel kompetensi auditor internal, independensi organisasi audit internal, hubungan antara auditor internal dan eksternal, dukungan manajemen, efektivitas audit internal, dan korupsi menghasilkan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) maupun *Communality* yang lebih besar dari 0.5. Dengan demikian semua indikator yang mengukur variabel kompetensi auditor internal, independensi organisasi audit internal, hubungan antara auditor internal dan eksternal, dukungan manajemen, efektivitas audit internal, dan korupsi dinyatakan valid.

4.7.2. *Discriminant Validity*

Validitas diskriminan dihitung menggunakan *cross correlation* dengan kriteria bahwa apabila nilai *loading factor* dalam suatu variabel yang bersesuaian lebih besar dari nilai korelasi indikator pada variabel lainnya maka indikator tersebut dinyatakan valid dalam mengukur variabel yang bersesuaian. Hasil perhitungan *cross correlation* disajikan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8
Hasil Perhitungan Cross Correlation

Indikator	KO	IN	HA	DM	EAI	KOR	Keterangan
KO.1	0.941	0.041	-0.080	0.196	0.207	0.359	Valid
KO.2	0.833	0.137	-0.062	0.185	0.086	0.084	Valid
KO.3	0.711	0.202	0.124	0.302	0.040	0.284	Valid
KO.4	0.796	0.126	0.001	0.361	0.043	0.267	Valid
KO.5	0.648	0.036	-0.039	0.007	-0.040	0.242	Valid
KO.6	0.694	-0.098	-0.022	0.171	0.007	0.084	Valid
KO.8	0.688	-0.004	-0.211	-0.067	-0.030	0.045	Valid
KO.9	0.680	-0.084	-0.181	0.217	-0.032	-0.008	Valid
IN.2	0.203	0.943	0.092	-0.092	-0.316	0.032	Valid
IN.3	0.125	0.956	-0.010	-0.258	-0.438	-0.106	Valid
IN.4	0.035	0.828	-0.046	-0.014	-0.203	-0.038	Valid
IN.5	0.210	0.676	0.079	-0.042	-0.035	-0.037	Valid
IN.7	-0.011	0.735	-0.129	-0.201	-0.151	-0.073	Valid
HA.1	-0.060	0.011	0.842	0.363	0.181	0.169	Valid
HA.2	0.058	0.122	0.788	0.249	0.082	0.057	Valid
HA.3	-0.129	-0.032	0.855	0.254	0.178	0.022	Valid
HA.4	-0.062	0.084	0.830	0.182	0.306	0.258	Valid
HA.5	-0.013	-0.135	0.893	0.386	0.261	0.282	Valid
HA.7	0.029	-0.106	0.810	0.275	0.206	0.268	Valid
HA.9	0.169	0.126	0.767	0.457	0.183	0.180	Valid
DM.2	0.305	0.080	0.282	0.809	0.343	0.494	Valid
DM.4	0.348	-0.148	0.281	0.916	0.548	0.513	Valid
DM.5	0.155	-0.260	0.311	0.889	0.341	0.214	Valid
DM.6	0.200	-0.266	0.423	0.858	0.388	0.404	Valid
EAI.1	0.234	-0.250	0.066	0.342	0.804	0.438	Valid
EAI.2	0.178	-0.301	0.243	0.425	0.823	0.336	Valid
EAI.3	0.234	-0.305	0.263	0.541	0.865	0.608	Valid
EAI.4	0.318	-0.098	0.134	0.369	0.871	0.638	Valid
EAI.5	0.229	-0.243	0.150	0.370	0.842	0.549	Valid
EAI.7	0.238	-0.185	0.228	0.414	0.901	0.646	Valid
EAI.9	0.056	-0.331	0.343	0.452	0.879	0.574	Valid
EAI.12	-0.024	-0.392	0.227	0.261	0.833	0.329	Valid
EAI.13	0.313	-0.318	0.206	0.310	0.847	0.428	Valid
EAI.14	0.231	-0.342	0.223	0.396	0.763	0.578	Valid
EAI.15	-0.054	-0.498	0.329	0.510	0.811	0.407	Valid

Lanjutan Tabel 4.8 Hasil Perhitungan *Cross Correlation*

Indikator	KO	IN	HA	DM	EAI	KOR	Keterangan
KOR.1	0.337	0.125	0.155	0.505	0.380	0.867	Valid
KOR.2	0.276	-0.176	0.219	0.528	0.656	0.927	Valid
KOR.3	0.468	-0.092	0.163	0.364	0.567	0.895	Valid
KOR.8	0.108	0.057	0.302	0.233	0.423	0.731	Valid

Sumber: Data diolah, 2017 (Lampiran 3)

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa indikator KO1 –KO6,KO8 – KO9, HA1 – HA5, HA7, HA9, DM2, DM4 – DM6, EAI1 – EAI5, EAI7, EAI9, EAI12 – EAI15, KOR1 – KOR3 dan KOR8 menghasilkan *loading factor* yang lebih besar dibandingkan dengan *cross correlation* indikator tersebut pada variabel lainnya. Dengan demikian indikator – indikator tersebut dinyatakan valid dalam mengukur variabel kompetensi auditor internal (KO), independensi organisasi audit internal (IN), hubungan antara auditor internal dan eksternal (HA), dukungan manajemen (DM), efektivitas audit internal (EAI), dan korupsi (KOR).

4.7.3. Pengujian Reliabilitas

Perhitungan yang dapat digunakan untuk menguji reliabilitas konstruk adalah *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. Kriteria pengujian menyatakan bahwa apabila *Composite Reliability* bernilai lebih besar dari 0.6. dan *Cronbach's Alpha* bernilai lebih besar dari 0.6 maka konstruk tersebut dinyatakan reliabel. Hasil perhitungan *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha* dapat dilihat melalui ringkasan yang disajikan pada Tabel 4.9.

Berdasarkan Tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai *Composite Reliability* pada variabel kompetensi auditor, independensi organisasi audit internal, hubungan antara auditor internal dan eksternal, dukungan manajemen, efektivitas audit internal, dan korupsi lebih besar dari 0.6. Dengan demikian,

berdasarkan perhitungan *Composite Reliability* semua indikator yang mengukur variabel tersebut dinyatakan reliabel.

Tabel 4.9
Nilai *Composite Reliability* dan *Cronbach Alpha*

Variabel	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cronbachs Alpha</i>	Keterangan
Kompetensi Auditor	0.912	0.947	Reliabel
Independensi Organisasi Audit Internal	0.919	0.904	Reliabel
Hub Auditor Internal dan Eksternal	0.938	0.926	Reliabel
Dukungan Manajemen	0.925	0.892	Reliabel
Efektivitas Audit Internal	0.964	0.958	Reliabel
Korupsi	0.917	0.879	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2017 (Lampiran 3)

Selanjutnya nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel kompetensi auditor, independensi organisasi audit internal, hubungan antara auditor internal dan eksternal, dukungan manajemen, efektivitas audit internal, dan korupsi lebih besar dari 0.6. Dengan demikian, berdasarkan perhitungan *Cronbach's Alpha* semua indikator yang mengukur variabel tersebut dinyatakan reliabel.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Deskripsi Obyek Penelitian

Inspektorat Jenderal (Itjen) merupakan unit pengawas internal yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan pada seluruh satuan kerja di bawah koordinasi Kementerian Agama (Kemenag). Struktur Organisasi Itjen Kemenag saat ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 yang merupakan tindak lanjut dari berlakunya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama. Diamanatkan dalam peraturan tersebut, Inspektorat Jenderal terdiri atas Sekretariat Inspektorat Jenderal dan paling banyak 5 (lima) Inspektorat. Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian dan/atau Kelompok Jabatan Fungsional, pada setiap bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian dan/ atau Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun 5 (lima) Inspektorat terdiri dari Inspektorat wilayah I, II, III, IV dan Inspektorat Investigasi yang menangani fungsi ketatausahaan dan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor. Maka dalam pelaksanaannya Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal, dibantu Sekretaris, dan empat Inspektur Wilayah serta satu Inspektur Investigasi. Sekretaris dibantu oleh empat Kepala Bagian dan setiap Kepala Bagian dibantu oleh tiga Kepala Subbagian. Sedangkan setiap Inspektur dibantu oleh satu Kepala Subbagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional auditor.

Itjen Kemenag saat ini terbagi atas empat Inspektorat Wilayah dan satu Inspektorat Investigasi. Inspektorat Wilayah I secara rinci mempunyai tugas merumuskan strategi pengawasan dan melaksanakan pengawasan internal meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, reviu, evaluasi, pemantauan, kegiatan pengawasan lainnya, dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga yang meliputi wilayah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan, Aceh, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Bali, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Maluku.

Tugas pemeriksaan Inspektorat Wilayah II meliputi unit kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Papua. Inspektorat Wilayah III meliputi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara. Inspektorat Wilayah IV memiliki wilayah pemeriksaan pada satuan kerja sebagai berikut: Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Inspektorat Jenderal, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat.

Berbeda dengan Inspektorat Wilayah, Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan strategi pengawasan, melaksanakan audit dengan tujuan tertentu melalui proses investigasi atas dugaan tindak pidana korupsi dan kerugian keuangan negara, pelanggaran disiplin atau penyalahgunaan wewenang, menangani permasalahan yang menjadi perhatian publik pada Kemenag, penyusunan laporan hasil audit investigatif, mengoordinasikan hasil audit investigatif, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat Investigasi. Satuan kerja yang menjadi sasaran dari Inspektorat Investigasi adalah seluruh satuan kerja di bawah Kemenag.

Tugas pokok Itjen Kemenag sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama adalah mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi Itjen adalah penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal di lingkungan Kemenag pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Kemenag terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kemenag; pelaksanaan administrasi Itjen; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 menjelaskan fungsi Itjen sebagai berikut:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal pada Kementerian Agama;
- b. pelaksanaan pengawasan internal pada Kementerian Agama terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan pada Kementerian Agama;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Arah kebijakan dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari setiap misi yang diemban. Misi tersebut merupakan program operasional yang dilaksanakan selama 5 tahun. Selain itu, arah kebijakan juga disinergikan dengan arah kebijakan Kemenag sebagai organisasi induk. Kebijakan Kementerian Agama tahun 2015 – 2019 adalah:

- a. peningkatan kerukunan hidup umat beragama sebagai salah satu pilar kerukunan nasional;
- b. peningkatan kapasitas, kualitas dan akuntabilitas pelayanan bagi umat beragama dalam pemenuhan aktivitas peribadatannya;
- c. peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan;

- d. peningkatan efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
- e. perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
- f. peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama.

Sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Kerja Kementerian Agama tahun 2015-2019, diperlukan perencanaan yang terarah dan terpadu serta dapat menampung seluruh tuntutan kepentingan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam menyikapi tuntutan tersebut, perencanaan harus dilaksanakan secara akomodatif, realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Visi Itjen Kemenag adalah “Menjadi Penegak Integritas dan Akuntabilitas Kementerian Agama”. Sedangkan misi Itjen Kemenag yaitu: Pertama, Melakukan pengawasan fungsional secara profesional dan Independen. Kedua, Melakukan penguatan sistem pengawasan e-audit yang efektif dan terintegrasi. Ketiga, Meningkatkan pelayanan administrasi pengawasan yang cepat, tepat, dan akurat berbasis teknologi informasi. Keempat, Meningkatkan akselerasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan pengaduan masyarakat. Kelima, Meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur pengawasan. Keenam, Meningkatkan peran konsultan dan katalisator bidang pengawasan. Ketujuh, Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait. Delapan, Membangun sistem pencegahan dini melalui Pengawasan dengan Pendekatan Agama (PPA) dan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi, Bersih, Melayani (WBBM).

Untuk menjalankan kegiatan pengawasan dan berperan sebagai aparatur pengawas, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama memiliki Jabatan Fungsional Auditor. Auditor merupakan jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan internal pada instansi pemerintah, lembaga atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Auditor pada Inspektorat Jenderal dibentuk dan dibina oleh Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP). Auditor di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama ini sebanyak 252 orang yang terdiri dari auditor ahli (auditor pertama, auditor muda, auditor madya) dan auditor terampil (auditor pelaksana, auditor pelaksana lanjutan, auditor penyelia).

5.2. Tingkat Pengembalian Kuesioner

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pengambilan data primer secara langsung dari sampel melalui teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Penyebaran kuesioner kepada responden dilakukan pada awal bulan Oktober 2017. Unit kerja auditor Itjen yang tersebar di seluruh Indonesia membuat pengisian kuesioner baru selesai pada awal Nopember 2017. Auditor Itjen Kemenag yang menjadi sampel diminta untuk mengisi kuesioner yang berisi serangkaian pernyataan tentang korupsi, efektivitas audit internal, kompetensi auditor, independensi organisasi audit internal, hubungan antara auditor internal dan eksternal serta dukungan manajemen. Peneliti memberikan secara langsung kuesioner kepada setiap auditor Itjen ketika para auditor kembali ke kantor dari penugasan audit.

Untuk mendapatkan tingkat pengembalian kuesioner (*respon rate*) yang tinggi, peneliti memberikan souvenir kepada setiap auditor Itjen yang mengisi kuesioner. Lebih lanjut untuk mengantisipasi kuesioner yang rusak atau tidak dapat diolah, peneliti menyebarkan kuesioner melebihi jumlah sampel yang ditetapkan yaitu dengan menambahkan 4 kuesioner. Kuesioner yang disebarkan berjumlah 160, sedangkan sampel yang dibutuhkan 154 responden. Dari 160 kuesioner yang disebarkan, kembali sebanyak 158 kuesioner. Dari 158 kuesioner yang kembali, hanya 152 kuesioner yang dapat digunakan dan kemudian dianalisis, sedangkan 6 kuesioner tidak dapat digunakan karena kuesioner tidak

diisi lengkap. Jika dibandingkan dengan jumlah sampel yang dibutuhkan maka terpenuhi sebesar 95 %. Secara rinci perhitungan tingkat pengembalian kuesioner ini dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentase (%)
Jumlah kuesioner yang disebar	160	100,00
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	2	1.25%
Jumlah kuesioner yang kembali	158	98.75%
Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah	6	3.75%
Kuesioner yang dapat diolah	152	95.00%

Sumber: Data primer diolah (2017)

5.3. Deskripsi Karakteristik Responden

Deskripsi karakteristik responden menjelaskan kondisi responden yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, jabatan auditor, masa kerja, jam pelatihan pertahun dan diklat kompetensi yang pernah diikuti. Berikut ini akan diuraikan masing-masing karakteristik responden tersebut.

5.3.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin auditor Itjen dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	
		Orang	Persentase (%)
1	Pria	93	61
2	Wanita	59	39
Jumlah		152	100

Sumber: Data primer diolah (2017)

Dilihat dari kategori jenis kelamin, jumlah responden berjenis kelamin pria merupakan responden terbanyak dalam penelitian ini yaitu sebanyak 93 orang

atau sebesar 61 %. Jumlah reponden berjenis kelamin wanita sebanyak 59 orang atau 39 %.

5.3.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan survei yang dilakukan, karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 5.3.

Tabel 5.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No.	Umur	Frekuensi	
		Orang	Persentase (%)
1	21 - 30 tahun	7	5
2	31 - 40 tahun	65	43
3	41 - 50 tahun	57	38
4	>50 tahun	23	15
Jumlah		152	100

Sumber: Data primer diolah (2017)

Dilihat dari karakteristik responden berdasarkan usia menunjukkan bahwa responden terbanyak berusia 31-40 tahun sebanyak 65 orang atau sebesar 43 %. Selanjutnya responden yang berusia 41-50 tahun sebanyak 57 orang atau sebesar 38%, yang berusia di atas 50 tahun sebanyak 23 orang atau sebesar 15% dan yang berusia 21-30 tahun sebanyak 7 orang atau sebesar 5%. Berdasarkan komposisi tersebut menunjukkan golongan usia produktif 31-40 tahun mendominasi usia auditor Itjen Kemenag.

5.3.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan survei yang dilakukan, karakteristik responden berdasarkan jenjang pendidikan terakhir, yaitu (1) Diploma (D3); (2) Sarjana (S1); (3) Magister (S2); dan (4) Doktor (S3). Latar belakang pendidikan terdiri dari akuntansi dan non akuntansi. Secara rinci data karakteristik responden berdasarkan jenjang pendidikan terakhir dan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	
		Orang	Persentase (%)
1	D3	3	2
2	S1	109	72
3	S2	40	26
4	S3	-	-
Jumlah		152	100

No.	Latar Belakang Pendidikan	Frekuensi	
		Orang	Persentase (%)
1	Akuntansi	22	14
2	Non Akuntansi	130	86
Jumlah		152	100

Sumber: Data primer diolah (2017)

Dari Tabel 5.4 dapat dilihat bahwa dari 152 responden, sebanyak 3 orang atau 2% berpendidikan setingkat Diploma (D3), sebanyak 109 orang (72%) berpendidikan setingkat Sarjana (S1), dan sebanyak 40 orang (26%) berpendidikan setingkat Magister (S2). Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa semua auditor Itjen Kemenag berlatar belakang pendidikan tinggi. Untuk latar belakang pendidikan sebanyak 22 orang (14%) berlatar pendidikan akuntansi dan sebanyak 130 orang (86%) berlatar pendidikan non akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa Itjen Kemenag masih memerlukan auditor yang berlatar belakang pendidikan akuntansi untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan.

5.3.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Responden diklasifikasikan dalam 4 (empat) jabatan fungsional auditor, yaitu (1) Auditor Terampil; (2) Auditor Ahli Pertama; (3) Auditor Ahli Muda; dan (4) Auditor Ahli Madya. Dari tabel 5.5 dapat dilihat bahwa 152 orang atau 100% terdiri dari Auditor Ahli, terdapat 20 orang atau 13% diantaranya adalah Auditor Ahli Madya, 54 orang atau 36% Auditor Ahli Muda dan 78 orang atau 51%

adalah Auditor Ahli Pertama. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua auditor Itjen Kemenag telah memiliki sertifikat ahli sebagai auditor. Karakteristik responden berdasarkan jabatan dapat dilihat pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Frekuensi	
		Orang	Persentase (%)
1	Ahli Madya	20	13
2	Ahli Muda	54	36
3	Ahli Pertama	78	51
4	Terampil	-	-
Jumlah		152	100

Sumber: Data primer diolah (2017)

5.3.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Berdasarkan survei yang dilakukan, karakteristik responden berdasarkan masa kerja. Karakteristik ini menunjukkan jam terbang auditor Itjen Kemenag dalam penugasan audit. Secara rinci data karakteristik responden berdasarkan masa kerja ditampilkan dalam Tabel 5.6.

Tabel 5.6
Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

No.	Masa Kerja	Frekuensi	
		Orang	Persentase (%)
1	5 tahun	14	9
2	5 - 10 tahun	57	38
3	10 - 15 tahun	26	17
4	>15 tahun	55	36
Jumlah		152	100

Sumber: Data primer diolah (2017)

Dilihat dari lamanya bekerja, sebagian besar responden telah bekerja sebagai auditor Itjen Kemenag lebih dari 10 tahun, yaitu sebanyak 81 orang atau 53%. Sebanyak 26 orang atau 17% telah bekerja selama 10 sampai dengan 15 tahun dan 55 orang atau 36% telah bekerja lebih dari 15 tahun. Sisanya 14 orang

atau 9% bekerja kurang dari 5 tahun dan sebanyak 57 orang atau 38% telah bekerja selama 5 sampai dengan 10 tahun. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar auditor Itjen Kemenag memiliki pengalaman bekerja yang cukup untuk menunjang pekerjaan audit di Itjen Kemenag.

5.3.6. Karakteristik Responden Berdasarkan Pelatihan dan Diklat yang Diikuti

Karakteristik responden berdasarkan pelatihan dan diklat kompetensi yang diikuti oleh auditor dapat dilihat pada Tabel 5.7.

Tabel 5.7
Responden Berdasarkan Pelatihan dan Diklat yang Diikuti

No.	Jam Pelatihan Tahunan	Frekuensi	
		Orang	Persentase (%)
1	20 Jam	82	54
2	21-40 Jam	51	34
3	41-80 Jam	14	9
4	80 Jam	5	3
Jumlah		152	100

No.	Diklat Kompetensi	Frekuensi	
		Orang	Persentase (%)
1	Tidak Pernah	-	-
2	1 Kali	47	31
3	2 Kali	49	32
4	3 Kali	26	17
5	4 Kali atau lebih	30	20
Jumlah		152	100

Sumber: Data primer diolah (2017)

Dilihat dari jam pelatihan tahunan yang diikuti oleh responden, jumlah responden yang mengikuti pelatihan 20 jam tahunan dan > 20 jam hampir berimbang, yakni 82 orang atau 54% mengikuti pelatihan 20 jam tahunan dan 70 orang atau 46% mengikuti pelatihan > 20 jam tahunan. Responden yang mengikuti pelatihan > 20 jam tahunan terbagi atas sebanyak 51 orang (34%) mengikuti pelatihan 21-40 jam tahunan, 14 orang atau 9 % mengikuti pelatihan

41-80 jam pertahun dan sebanyak 5 orang atau 3% mengikuti pelatihan 80 Jam pertahun.

Untuk responden yang mengikuti diklat kompetensi, jika dirata-rata sebagian besar responden telah mengikuti diklat kompetensi sebanyak 2 kali atau lebih dengan rincian sebagai berikut: jumlah terbesar 49 orang atau 32% responden mengikuti diklat kompetensi 2 kali; 47 orang atau 31% responden mengikuti 1 kali; terbanyak ketiga yaitu responden yang mengikuti diklat kompetensi sebanyak 4 kali atau lebih dengan jumlah 30 orang atau 20% responden; sisanya sebanyak 26 orang atau 17% mengikuti diklat 3 kali. Hal ini menunjukkan bahwa auditor Itjen Kemenag telah mengikuti pelatihan dan diklat kompetensi yang cukup memadai dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi atau kemampuan sebagai auditor internal.

5.4. Hasil Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan enam variabel penelitian, yaitu: kompetensi auditor internal, independensi organisasi audit internal, hubungan antara auditor internal dan eksternal, dukungan manajemen, efektivitas audit internal, dan korupsi. Deskriptif variabel penelitian bertujuan untuk mengetahui persepsi responden terhadap indikator-indikator yang dipergunakan pada kuesioner penelitian berdasarkan indikator dan skala. Skala likert dengan rentang 7 point digunakan dengan alasan bahwa menggunakan skala 7 point maka pemilihan kategori dalam kuesioner lebih spesifik dan memberikan responden pilihan yang lebih banyak sehingga meningkatkan diferensiasi point. Tingkat nilai rata-rata persepsi responden mengenai variabel penelitian menurut Sudjana (2000:79), diperoleh perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Skala Interval} = \frac{\text{Rentang Nilai}}{\text{Skala}}$$

Dimana:

Rentang Nilai = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah

Banyak Skala = 7

Berdasarkan rumus di atas, maka skala interval adalah:

$$\text{Skala Interval} = \frac{7 - 1}{7} = 0.86$$

Nilai rata-rata skor yang diperoleh selanjutnya dibandingkan dengan kriteria interpretasi skor persepsi responden seperti yang dikemukakan oleh Sudjana (2000:79) ditunjukkan dalam Tabel 5.8.

Tabel 5.8
Interpretasi Nilai Rata-rata Persepsi Responden Mengenai Variabel Penelitian

Nilai	Keterangan
1,00 – 1,86	Sangat Tidak Setuju
1,86 – 2,71	Tidak Setuju
2,71 – 3,57	Agak Tidak Setuju
3,57 – 4,43	Netral
4,43 – 5,29	Agak Setuju
5,29 – 6,14	Setuju
6,14 – 7,00	Sangat Setuju

Sumber: Data primer yang telah diolah

5.4.1. Persepsi Responden pada Variabel Kompetensi Auditor Internal

Kompetensi auditor merujuk pada kualifikasi pendidikan, profesionalisme, pengalaman audit dan pelatihan atau training audit yang diikuti oleh auditor internal (Alzeban dan Gwilliam, 2014). Dalam penelitian ini, variabel kompetensi auditor diukur dengan menggunakan 8 (delapan) indikator. Tabel 5.9 berikut ini menggambarkan persepsi responden pada variabel kompetensi auditor internal.

Tabel 5.9
Sebaran Jawaban Responden Pada Konstruk Kompetensi Auditor (KO)

		Jawaban Responden							Rata-Rata
		SS	S	AS	N	ATS	TS	STS	
KO.1	F	27	91	25	3	5	1	0	5.85
	%	17.8%	59.9%	16.4%	2.0%	3.3%	0.7%	0.0%	
KO.2	F	38	98	10	3	3	0	0	6.09
	%	25.0%	64.5%	6.6%	2.0%	2.0%	0.0%	0.0%	
KO.3	F	63	82	7	0	0	0	0	6.37
	%	41.4%	53.9%	4.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
KO.4	F	77	67	6	2	0	0	0	6.44
	%	50.7%	44.1%	3.9%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	
KO.5	F	25	82	14	4	15	6	6	5.37
	%	16.4%	53.9%	9.2%	2.6%	9.9%	3.9%	3.9%	
KO.6	F	28	94	20	5	4	0	1	5.88
	%	18.4%	61.8%	13.2%	3.3%	2.6%	0.0%	0.7%	
KO.7	F	21	89	34	4	4	0	0	5.78
	%	13.8%	58.6%	22.4%	2.6%	2.6%	0.0%	0.0%	
KO.8	F	24	102	20	3	2	1	0	5.92
	%	15.8%	67.1%	13.2%	2.0%	1.3%	0.7%	0.0%	

Sumber: Data diolah, 2017 (lampiran 4)

Keterangan:

- KO.1: dengan latar belakang pendidikan, auditor mampu melaksanakan tugas sebagai auditor internal dengan baik.
 KO.2: pengalaman kerja yang auditor miliki cukup untuk bertugas sebagai auditor internal.
 KO.3: auditor percaya bahwa mengikuti pelatihan/training audit telah meningkatkan kemampuan sebagai auditor internal.
 KO.4: Itjen mempunyai auditor internal yang bersertifikat.
 KO.5: jumlah auditor yang bersertifikat sudah sesuai dengan ruang lingkup penugasan audit di kementerian/lembaga.
 KO.6: auditor dapat menggunakan teknologi modern (menggunakan alat data terkomputerasi dan perangkat lunak audit internal tertentu).
 KO.7: auditor melakukan audit dan monitoring setiap aktivitas tepat waktu.
 KO.8: auditor melakukan audit dan monitoring setiap aktivitas mencakup lingkup penugasan audit/pengawasan yang direncanakan.

Indikator (KO.1) merupakan latar pendidikan yang dimiliki oleh auditor.

Berdasarkan Tabel 5.9 dapat diketahui bahwa dari 152 responden, paling banyak 59.9% responden menyatakan setuju bahwa dengan latar belakang pendidikan, auditor Itjen mampu melaksanakan tugas sebagai auditor internal dengan baik, dan 17.8% responden menyatakan sangat setuju bahwa dengan latar belakang

pendidikan, auditor Itjen mampu melaksanakan tugas sebagai auditor internal dengan baik. Rata-rata item ini sebesar 5.85 menunjukkan sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa dengan latar belakang pendidikan, auditor Itjen mampu melaksanakan tugas sebagai auditor internal dengan baik.

Indikator (KO.2) merupakan pengalaman kerja yang dimiliki oleh auditor. Pengolahan data yang tersaji dalam Tabel 5.9 menunjukkan bahwa dari 152 responden, paling banyak 64.5% responden menyatakan setuju bahwa pengalaman kerja yang auditor Itjen miliki cukup untuk bertugas sebagai auditor internal, dan 25.0% responden menyatakan sangat setuju bahwa pengalaman kerja yang auditor Itjen miliki cukup untuk bertugas sebagai auditor internal. Rata-rata item ini sebesar 6.09 menunjukkan sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa pengalaman kerja yang auditor Itjen miliki cukup untuk bertugas sebagai auditor internal.

Indikator (KO.3) merupakan pelatihan/training yang telah diikuti oleh auditor. Pengolahan data yang tersaji dalam Tabel 5.9 menunjukkan bahwa dari 152 responden, paling banyak 53.9% responden menyatakan setuju bahwa auditor Itjen percaya bahwa mengikuti pelatihan/training audit telah meningkatkan kemampuan sebagai auditor internal, dan 41.4% responden menyatakan sangat setuju bahwa auditor Itjen percaya bahwa mengikuti pelatihan/training audit telah meningkatkan kemampuan sebagai auditor internal. Rata-rata item ini sebesar 6.37 menunjukkan sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa auditor Itjen percaya bahwa mengikuti pelatihan/training audit telah meningkatkan kemampuan sebagai auditor internal.

Indikator (KO.4) merupakan Itjen mempunyai auditor yang bersertifikat. Pengolahan data yang tersaji dalam Tabel 5.9 menunjukkan bahwa dari 152 responden, paling banyak 50.7% responden menyatakan sangat setuju bahwa Itjen mempunyai auditor internal yang bersertifikat (sertifikat JFA dan/atau

sertifikat lain di bidang Pengawasan Intern Pemerintah), dan 44.1% responden menyatakan setuju bahwa Inspektorat Jenderal mempunyai auditor internal yang bersertifikat (sertifikat JFA dan/atau sertifikat lain di bidang Pengawasan Intern Pemerintah). Rata-rata item ini sebesar 6.44 menunjukkan sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa Itjen mempunyai auditor internal yang bersertifikat (sertifikat JFA dan/atau sertifikat lain di bidang Pengawasan Intern Pemerintah). Auditor bersertifikat berarti auditor telah memiliki kualifikasi profesional sebagai auditor untuk meningkatkan kualitas kerja audit internal.

Indikator (KO.5) merupakan jumlah auditor yang bersertifikat sesuai ruang lingkup penugasan audit. Hasil pengolahan data dari 152 responden yang tersaji pada Tabel 5.9 menunjukkan bahwa paling banyak 53.9% responden menyatakan setuju bahwa jumlah auditor yang bersertifikat sesuai ruang lingkup penugasan audit di kementerian/lembaga, dan 16.4% responden menyatakan sangat setuju bahwa jumlah auditor Inspektorat Jenderal yang bersertifikat sesuai ruang lingkup penugasan audit di kementerian/lembaga. Rata-rata item ini sebesar 5.37 menunjukkan sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa jumlah auditor Inspektorat Jenderal yang bersertifikat sesuai ruang lingkup penugasan audit di kementerian/lembaga.

Indikator (KO.6) merupakan auditor dapat menggunakan teknologi modern. Hasil pengolahan data dari 152 responden yang tersaji pada Tabel 5.9 menunjukkan bahwa paling banyak 61.8% responden menyatakan setuju bahwa auditor Itjen dapat menggunakan teknologi modern (menggunakan alat data terkomputerasi dan perangkat lunak audit internal tertentu), dan 18.4% responden menyatakan sangat setuju bahwa auditor Itjen dapat menggunakan teknologi modern (menggunakan alat data terkomputerasi dan perangkat lunak audit internal tertentu). Rata-rata item ini sebesar 5.88 menunjukkan sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa auditor Itjen dapat menggunakan

teknologi modern (menggunakan alat data terkomputerasi dan perangkat lunak audit internal tertentu) untuk menunjang proses audit internal.

Indikator (KO.7) menunjukkan hasil dari 152 responden yang tersaji pada Tabel 5.9 menunjukkan bahwa paling banyak 58.6% responden menyatakan setuju bahwa auditor Itjen melakukan audit dan monitoring setiap aktivitas tepat waktu, dan 22.4% responden menyatakan sangat setuju bahwa auditor Itjen melakukan audit dan monitoring setiap aktivitas tepat waktu. Rata-rata item ini sebesar 5.78 menunjukkan sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa auditor Itjen melakukan audit dan monitoring setiap aktivitas tepat waktu.

Indikator (KO.8) menunjukkan hasil dari 152 responden yang tersaji pada Tabel 5.9 menunjukkan bahwa paling banyak 67.1% responden menyatakan setuju bahwa auditor Itjen melakukan audit dan monitoring setiap aktivitas mencakup lingkup penugasan audit/pengawasan yang direncanakan, dan 15.8% responden menyatakan sangat setuju bahwa auditor Itjen melakukan audit dan monitoring setiap aktivitas mencakup lingkup penugasan audit/pengawasan yang direncanakan. Rata-rata item ini sebesar 5.92 menunjukkan sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa auditor Itjen melakukan audit dan monitoring setiap aktivitas mencakup lingkup penugasan audit/pengawasan yang direncanakan.

5.4.2. Persepsi Responden pada Variabel Independensi Organisasi Audit Internal

Independensi organisasi audit internal yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Alzeban dan Gwilliam (2014), yaitu bagaimana independensi organisasi audit internal dapat ditegakkan dalam penugasan audit internal. Ada 5 (lima) indikator untuk mengukur variabel Independensi organisasi audit internal. Tabel 5.10 menggambarkan persepsi responden pada variabel independensi organisasi audit internal.

Tabel 5.10
Sebaran Jawaban Responden Pada Konstruk Independensi Organisasi
Audit Internal(IN)

		Jawaban Responden							Rata-Rata
		SS	S	AS	N	ATS	TS	STS	
IN.1	F	54	85	13	0	0	0	0	6.27
	%	35.5%	55.9%	8.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
IN.2	F	48	89	9	4	1	0	1	6.15
	%	31.6%	58.6%	5.9%	2.6%	0.7%	0.0%	0.7%	
IN.3	F	40	90	12	5	3	1	1	6.00
	%	26.3%	59.2%	7.9%	3.3%	2.0%	0.7%	0.7%	
IN.4	F	23	56	34	16	13	7	3	5.18
	%	15.1%	36.8%	22.4%	10.5%	8.6%	4.6%	2.0%	
IN.5	F	27	71	23	6	9	11	5	5.32
	%	17.8%	46.7%	15.1%	3.9%	5.9%	7.2%	3.3%	

Sumber: Data diolah, 2017 (lampiran 4)

Keterangan:

IN.1: Itjen melapor ke pimpinan kementerian/lembaga sebagai bentuk tanggung jawab atas pengawasan internal yang telah dilakukan oleh Itjen.

IN.2: Inspektur memiliki akses langsung dengan pimpinan kementerian.

IN.3: Itjen memiliki akses langsung dengan pimpinan kementerian/lembaga selain Ka Biro Keuangan.

IN.4: konflik kepentingan dalam penugasan audit internal tidak terjadi.

IN.5: auditor mempunyai akses tidak terbatas pada seluruh unit kerja dan para pegawai unit kerja di lingkungan kementerian/lembaga

Indikator (IN.1) adalah Itjen melapor ke pimpinan kementerian/lembaga sebagai bentuk tanggung jawab atas pengawasan internal yang telah dilakukan oleh Itjen. Tabel 5.10 menyajikan bahwa dari 152 responden, paling banyak 55.9% responden menyatakan setuju bahwa Itjen melapor ke pimpinan kementerian/lembaga dan 35.5% responden menyatakan sangat setuju bahwa Itjen melapor ke pimpinan kementerian/lembaga. Rata-rata item ini sebesar 6.27 menunjukkan sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa Inspektur Jenderal melapor ke Pimpinan kementerian/lembaga sebagai bentuk tanggung jawab atas pengawasan internal yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal.

Indikator (IN.2) adalah Inspektur (pimpinan organisasi audit internal) memiliki akses langsung dengan pimpinan kementerian/lembaga. Hasil

pengolahan data dari 152 responden yang tersaji pada Tabel 5.10 menunjukkan bahwa paling banyak 58.6%% responden menyatakan setuju bahwa Inspektur memiliki akses langsung dengan pimpinan kementerian/lembaga, dan 31.6% responden menyatakan sangat setuju bahwa Inspektur memiliki akses langsung dengan pimpinan kementerian/lembaga. Rata-rata item ini sebesar 6.15 menunjukkan sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa Inspektur memiliki akses langsung dengan pimpinan kementerian/lembaga.

Indikator (IN.3) adalah Itjen memiliki akses langsung dengan pimpinan kementerian/lembaga. Tabel 5.10 menyajikan hasil pengolahan data dari 152 responden, paling banyak 59.2% responden menyatakan setuju bahwa Itjen memiliki akses langsung dengan pimpinan kementerian/lembaga selain Ka Biro Keuangan, dan 26.3% responden menyatakan sangat setuju bahwa Inspektorat Jenderal memiliki akses langsung dengan Pimpinan kementerian/lembaga selain Ka Biro Keuangan. Rata-rata item ini sebesar 6.00 menunjukkan sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa Inspektorat Jenderal memiliki akses langsung dengan Pimpinan kementerian/lembaga selain Ka Biro Keuangan.

Indikator (IN.4) adalah auditor dapat menghindari konflik kepentingan. Hasil pengolahan data dari 152 responden yang tersaji pada Tabel 5.10 menunjukkan bahwa paling banyak 36.8% responden menyatakan setuju bahwa konflik kepentingan dalam penugasan audit tidak terjadi, dan 22.4% responden menyatakan agak setuju bahwa konflik kepentingan dalam penugasan audit tidak terjadi. Rata-rata item ini sebesar 5.18 menunjukkan sebagian besar responden menyatakan agak setuju bahwa konflik kepentingan dalam penugasan audit tidak terjadi.

Indikator (IN.5) adalah auditor dapat mengakses data dan pegawai pada seluruh unit kerja. Tabel 5.10 menyajikan hasil pengolahan data dari 152 responden yang menunjukkan bahwa paling banyak 46.7% responden

menyatakan setuju bahwa auditor mempunyai akses tidak terbatas pada seluruh unit kerja dan para pegawai unit kerja di lingkungan kementerian/lembaga, dan 17.8% responden menyatakan sangat setuju bahwa auditor mempunyai akses tidak terbatas pada seluruh unit kerja dan para pegawai unit kerja di lingkungan kementerian/lembaga. Rata-rata item ini sebesar 5.32 menunjukkan sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa auditor mempunyai akses tidak terbatas pada seluruh unit kerja dan para pegawai unit kerja di lingkungan kementerian/lembaga.

5.4.3. Persepsi Responden pada Variabel Hubungan Antara Auditor Internal dan Eksternal

Hubungan antara auditor internal dan eksternal ini menunjuk pada seberapa baik hubungan yang dapat terjalin antara auditor internal dan eksternal terkait audit di organisasi pemerintah. Menurut Alzeban dan Gwilliam (2014), hubungan antara auditor internal dan eksternal dapat dilihat dari koordinasi dan kerjasama yang meliputi perencanaan bersama, pertukaran informasi, pendapat, dan laporan untuk memfasilitasi audit yang berkualitas tinggi dan mencegah duplikasi kerja yang tidak perlu. Ada 7 (tujuh) indikator untuk mengukur variabel hubungan antara auditor internal dan eksternal. Persepsi responden pada variabel hubungan antara auditor internal dan eksternal dapat dilihat melalui Tabel 5.11.

Indikator (HA.1) merupakan sikap ramah dan mendukung dari auditor eksternal kepada auditor Itjrn. Berdasarkan Tabel 5.11 dapat diketahui bahwa dari 152 responden, paling banyak 33.6% responden menyatakan setuju bahwa auditor eksternal bersikap ramah dan mendukung auditor Itjen, dan 23.0% responden menyatakan agak setuju bahwa auditor eksternal bersikap ramah dan mendukung auditor Itjen. Rata-rata item ini sebesar 5.01 menunjukkan sebagian

besar responden menyatakan agak setuju bahwa auditor eksternal bersikap ramah dan mendukung auditor Itjen.

Tabel 5.11
Sebaran Jawaban Responden Pada Konstruk Hubungan Antara Auditor Internal dan Eksternal (HA)

		Jawaban Responden							Rata-Rata
		SS	S	AS	N	ATS	TS	STS	
HA.1	F	16	51	35	25	20	4	1	5.01
	%	10.5%	33.6%	23.0%	16.4%	13.2%	2.6%	0.7%	
HA.2	F	10	64	42	28	4	4	0	5.24
	%	6.6%	42.1%	27.6%	18.4%	2.6%	2.6%	0.0%	
HA.3	F	12	58	44	14	14	7	3	5.05
	%	7.9%	38.2%	28.9%	9.2%	9.2%	4.6%	2.0%	
HA.4	F	12	58	40	16	19	5	2	5.03
	%	7.9%	38.2%	26.3%	10.5%	12.5%	3.3%	1.3%	
HA.5	F	11	47	41	24	18	7	4	4.82
	%	7.2%	30.9%	27.0%	15.8%	11.8%	4.6%	2.6%	
HA.6	F	8	27	42	26	37	6	6	4.35
	%	5.3%	17.8%	27.6%	17.1%	24.3%	3.9%	3.9%	
HA.7	F	26	68	24	20	6	7	1	5.41
	%	17.1%	44.7%	15.8%	13.2%	3.9%	4.6%	0.7%	

Sumber: Data diolah, 2017 (lampiran 4)

Keterangan:

HA.1: auditor eksternal bersikap ramah dan mendukung auditor Itjen

HA.2: auditor eksternal memiliki sikap yang baik terhadap auditor Itjen

HA.3: auditor eksternal bersedia memberi kesempatan kepada Itjen untuk menjelaskan kepentingan mereka

HA.4: auditor eksternal dan auditor Itjen berkonsultasi mengenai hal-hal yang menjadi kepentingan bersama termasuk mengenai waktu kerja

HA.5: auditor eksternal mendiskusikan rencana mereka dengan auditor Itjen

HA.6: auditor eksternal dan auditor Itjen bertemu secara berkala

HA.7: pimpinan kementerian/lembaga membantu mendukung terjalinnya hubungan antara auditor Itjen dengan auditor eksternal

Indikator (HA.2) merupakan sikap yang baik auditor eksternal terhadap auditor Itjen. Hasil pengolahan data yang disajikan pada Tabel 5.11 menunjukkan bahwa paling banyak 42.1% responden menyatakan setuju bahwa auditor eksternal memiliki sikap yang baik terhadap auditor Itjen, dan 27.6% responden menyatakan agak setuju bahwa auditor eksternal memiliki sikap yang baik terhadap auditor Itjen. Rata-rata item ini sebesar 5.24 menunjukkan

sebagian besar responden menyatakan agak setuju bahwa auditor eksternal memiliki sikap yang baik terhadap auditor Itjen.

Indikator (HA.3) menyatakan auditor eksternal memberi kesempatan kepada auditor Itjen menjelaskan kepentingannya terkait audit. Selanjutnya dari 152 responden, Tabel 5.11 menyajikan bahwa paling banyak 38.2% responden menyatakan setuju bahwa auditor eksternal bersedia memberi kesempatan kepada Itjen untuk menjelaskan kepentingan mereka, dan 28.9% responden menyatakan agak setuju bahwa auditor eksternal bersedia memberi kesempatan kepada Itjen untuk menjelaskan kepentingan mereka. Rata-rata item ini sebesar 5.05 menunjukkan sebagian besar responden menyatakan agak setuju bahwa auditor eksternal bersedia memberi kesempatan kepada Itjen untuk menjelaskan kepentingan mereka.

Indikator (HA.4) merupakan koordinasi antara auditor eksternal dan auditor Itjen. Hasil pengolahan data yang disajikan pada Tabel 5.11 menjelaskan bahwa dari 152 responden, paling banyak 38.2% responden menyatakan setuju bahwa auditor eksternal dan auditor Itjen berkonsultasi mengenai hal-hal yang menjadi kepentingan bersama termasuk mengenai waktu kerja, dan 26.3% responden menyatakan agak setuju bahwa auditor eksternal dan auditor Itjen berkonsultasi mengenai hal-hal yang menjadi kepentingan bersama termasuk mengenai waktu kerja. Rata-rata item ini sebesar 5.03 menunjukkan sebagian besar responden menyatakan agak setuju bahwa auditor eksternal dan auditor Itjen berkonsultasi mengenai hal-hal yang menjadi kepentingan bersama termasuk mengenai waktu kerja.

Indikator (HA.5) merupakan pembahasan rencana audit yang dilakukan oleh auditor eksternal dan auditor Itjen. Tabel 5.11 mengungkapkan bahwa dari 152 responden, paling banyak 30.9% responden menyatakan setuju bahwa auditor eksternal mendiskusikan rencana mereka dengan auditor Itjen, dan

27.0% responden menyatakan agak setuju bahwa auditor eksternal mendiskusikan rencana mereka dengan auditor Itjen. Rata-rata item ini sebesar 4.82 menunjukkan sebagian besar responden menyatakan agak setuju bahwa auditor eksternal mendiskusikan rencana mereka dengan auditor Itjen.

Indikator (HA.6) merupakan frekwensi pertemuan antara auditor eksternal dan auditor Itjen. Tabel 5.11 menyajikan data bahwa dari 152 responden, paling banyak 27.6% responden menyatakan agak setuju bahwa auditor eksternal dan auditor Itjen bertemu secara berkala, dan 24.3% responden menyatakan agak tidak setuju bahwa auditor eksternal dan auditor Itjen bertemu secara berkala. Rata-rata item ini sebesar 4.35 menunjukkan sebagian besar responden menyatakan biasa saja bahwa auditor eksternal dan auditor Itjen bertemu secara berkala.

Indikator (HA.7) merupakan dukungan pimpinan kementerian/lembaga pada hubungan antara auditor eksternal dan auditor Itjen. Selanjutnya dari 152 responden, Tabel 5.11 menyajikan bahwa paling banyak 44.7% responden menyatakan setuju bahwa pimpinan kementerian/lembaga membantu mendukung terjalannya hubungan antara auditor Itjen dengan auditor eksternal, dan 17.1% responden menyatakan sangat setuju bahwa pimpinan kementerian/lembaga membantu mendukung terjalannya hubungan antara auditor Itjen dengan auditor eksternal. Rata-rata item ini sebesar 5.41 menunjukkan sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa pimpinan kementerian/lembaga membantu mendukung terjalannya hubungan antara auditor Itjen dengan auditor eksternal.

5.4.4. Persepsi Responden pada Variabel Dukungan Manajemen

Dukungan manajemen ini menunjuk pada seberapa besar dukungan pimpinan Kementerian Agama pada peran audit internal di Inspektorat Jenderal. Ada 5 (lima) indikator untuk mengukur variabel dukungan manajemen yang

mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Alzeban dan Gwilliam (2014) yaitu pimpinan Kemenag dilibatkan dalam rencana-rencana kegiatan audit, memberi tanggapan atas laporan audit internal, Itjen mempunyai sumber daya dan anggaran yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Persepsi responden pada variabel dukungan manajemen dapat dilihat melalui Tabel 5.12 berikut :

Tabel 5.12
Sebaran Jawaban Responden Pada Konstruk Dukungan Manajemen (DM)

		Jawaban Responden							Rata-Rata
		SS	S	AS	N	ATS	TS	STS	
DM.1	F	22	91	20	13	4	1	1	5.70
	%	14.5%	59.9%	13.2%	8.6%	2.6%	0.7%	0.7%	
DM.2	F	28	106	9	5	2	1	1	5.96
	%	18.4%	69.7%	5.9%	3.3%	1.3%	0.7%	0.7%	
DM.3	F	18	77	19	6	15	12	5	5.14
	%	11.8%	50.7%	12.5%	3.9%	9.9%	7.9%	3.3%	
DM.4	F	15	53	22	15	21	16	10	4.59
	%	9.9%	34.9%	14.5%	9.9%	13.8%	10.5%	6.6%	

Sumber: Data diolah, 2017 (lampiran 4)

Keterangan:

DM.1: pimpinan kementerian/lembaga dilibatkan dalam rencana-rencana kegiatan audit intern tahunan Itjen

DM.2: pimpinan kementerian/lembaga memberi tanggapan terhadap laporan audit internal.

DM.3: Itjen mempunyai sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya

DM.4: Itjen memiliki anggaran yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Indikator (DM.1) menyatakan pimpinan kementerian/lembaga dilibatkan dalam rencana-rencana audit intern tahunan. Berdasarkan Tabel 5.12 dapat diketahui bahwa dari 152 responden, paling banyak 59.9% responden menyatakan setuju bahwa pimpinan kementerian/lembaga dilibatkan dalam rencana - rencana kegiatan audit intern tahunan Itjen, dan 14.5% responden menyatakan sangat setuju bahwa pimpinan kementerian/lembaga dilibatkan

dalam rencana - rencana kegiatan audit intern tahunan Itjen. Rata-rata item ini sebesar 5.70 menunjukkan sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa pimpinan kementerian/lembaga dilibatkan dalam rencana - rencana kegiatan audit intern tahunan Itjen.

Indikator (DM.2) merupakan tanggapan pimpinan kementerian/lembaga atas laporan audit. Hasil pengolahan data yang disajikan pada Tabel 5.12 menjelaskan bahwa dari 152 responden, paling banyak 69.7% responden menyatakan setuju bahwa pimpinan kementerian/lembaga memberi tanggapan terhadap laporan audit internal, dan 18.4% responden menyatakan sangat setuju bahwa pimpinan kementerian/lembaga memberi tanggapan terhadap laporan audit internal. Rata-rata item ini sebesar 5.96 menunjukkan sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa pimpinan kementerian/lembaga memberi tanggapan terhadap laporan audit internal.

Indikator (DM.3) merupakan Itjen memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tabel 5.12 menjelaskan dari 152 responden, paling banyak 50.7% responden menyatakan setuju bahwa Itjen memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dan 12.5% responden menyatakan agak setuju bahwa Itjen memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Rata-rata item ini sebesar 5.14 menunjukkan sebagian besar responden menyatakan agak setuju bahwa Itjen memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Indikator (DM.4) Itjen memiliki anggaran yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Berdasarkan Tabel 5.12 menyajikan bahwa dari 152 responden, paling banyak 34.9% responden menyatakan setuju bahwa Itjen memiliki anggaran yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, dan 14.5% responden menyatakan sangat setuju bahwa Itjen memiliki

anggaran yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Rata-rata item ini sebesar 4.59 menunjukkan sebagian besar responden menyatakan agak setuju bahwa Itjen memiliki anggaran yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

5.4.5. Persepsi Responden pada Variabel Efektivitas Audit Internal

Efektivitas audit internal adalah sejauh mana audit internal dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Variabel ini terdiri dari 11 (sebelas) indikator/item pernyataan. Adapun persepsi responden pada variabel efektivitas audit internal dapat dilihat melalui Tabel 5.13.

Tabel 5.13
Sebaran Jawaban Responden Pada Konstruk Efektivitas Audit Internal (EAI)

		Jawaban Responden							Rata-Rata
		SS	S	AS	N	ATS	TS	STS	
EAI.1	F	43	87	19	2	1	0	0	6.11
	%	28.3%	57.2%	12.5%	1.3%	0.7%	0.0%	0.0%	
EAI.2	F	49	88	13	1	1	0	0	6.20
	%	32.2%	57.9%	8.6%	0.7%	0.7%	0.0%	0.0%	
EAI.3	F	36	101	12	3	0	0	0	6.12
	%	23.7%	66.4%	7.9%	2.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
EAI.4	F	44	96	10	1	0	1	0	6.18
	%	28.9%	63.2%	6.6%	0.7%	0.0%	0.7%	0.0%	
EAI.5	F	42	94	12	2	1	1	0	6.13
	%	27.6%	61.8%	7.9%	1.3%	0.7%	0.7%	0.0%	
EAI.6	F	41	92	12	1	5	1	0	6.05
	%	27.0%	60.5%	7.9%	0.7%	3.3%	0.7%	0.0%	
EAI.7	F	29	88	24	7	3	1	0	5.86
	%	19.1%	57.9%	15.8%	4.6%	2.0%	0.7%	0.0%	
EAI.8	F	43	91	15	1	1	1	0	6.13
	%	28.3%	59.9%	9.9%	0.7%	0.7%	0.7%	0.0%	
EAI.9	F	28	93	19	3	6	2	1	5.82
	%	18.4%	61.2%	12.5%	2.0%	3.9%	1.3%	0.7%	
EAI.10	F	33	87	21	8	3	0	0	5.91
	%	21.7%	57.2%	13.8%	5.3%	2.0%	0.0%	0.0%	
EAI.11	F	37	82	27	4	2	0	0	5.97
	%	24.3%	53.9%	17.8%	2.6%	1.3%	0.0%	0.0%	

Sumber: Data diolah, 2017 (lampiran 4)

Keterangan:

- EAI.1: audit internal yang dilakukan Itjen meningkatkan produktivitas kementerian.
- EAI.2: audit internal yang dilakukan Itjen meningkatkan kinerja kementerian.
- EAI.3: auditor Itjen melakukan review/evaluasi terhadap kegiatan dan program audit untuk memastikan bahwa hasilnya konsisten dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
- EAI.4: auditor Itjen melakukan review terhadap ketepatan dan keandalan laporan keuangan.
- EAI.5: auditor Itjen melakukan review terhadap kepatuhan atas kebijakan, rencana, prosedur dan peraturan yang ada.
- EAI.6: auditor Itjen melakukan review terhadap unit kerja atas keekonomisan, keefektifan dan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada
- EAI.7: auditor Itjen melakukan review terhadap peralatan, metode dan sistem pengamanan asset unit kerja.
- EAI.8: auditor Itjen melakukan evaluasi dan membuat rekomendasi untuk meningkatkan sistem pengendalian internal jika diperlukan
- EAI.9: Itjen mengembangkan rencana audit/pengawasan tahunan dengan baik
- EAI.10: tindakan rutin diambil untuk mengimplementasikan rekomendasi dalam laporan hasil audit
- EAI.11: Itjen menyediakan tindak lanjut yang memadai untuk memastikan tindakan koreksi telah dilakukan dan efektif

Indikator (EAI.1) menyatakan audit intern yang dilakukan oleh Itjen meningkatkan produktivitas kementerian. Berdasarkan Tabel 5.13 dapat diketahui bahwa dari 152 responden, paling banyak 57.2% responden menyatakan setuju bahwa audit internal yang dilakukan Itjen meningkatkan produktivitas kementerian, dan 28.3% responden menyatakan sangat setuju bahwa audit internal yang dilakukan Itjen meningkatkan produktivitas kementerian. Rata-rata item ini sebesar 6.11 menunjukkan sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa audit internal yang dilakukan Itjen meningkatkan produktivitas kementerian.

Indikator (EAI.2) menyatakan audit intern yang dilakukan oleh Itjen meningkatkan kinerja kementerian. Hasil pengolahan data yang disajikan pada Tabel 5.13 menunjukkan bahwa dari 152 responden, paling banyak 57.9% responden menyatakan setuju bahwa audit internal yang dilakukan Itjen meningkatkan kinerja kementerian, dan 32.2% responden menyatakan sangat setuju bahwa audit internal yang dilakukan Itjen meningkatkan kinerja

kementerian. Rata-rata item ini sebesar 6.20 menunjukkan sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa audit internal yang dilakukan Itjen meningkatkan kinerja kementerian.

Indikator (EAI.3) menyatakan auditor melakukan review/evaluasi terhadap kegiatan dan program audit. Berdasarkan Tabel 5.13 dapat dijelaskan bahwa dari 152 responden, paling banyak 66.4% responden menyatakan setuju bahwa auditor Inspektorat melakukan review/evaluasi terhadap kegiatan dan program audit untuk memastikan bahwa hasilnya konsisten dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, dan 23.7% responden menyatakan sangat setuju bahwa auditor Inspektorat melakukan review/evaluasi terhadap kegiatan dan program audit untuk memastikan bahwa hasilnya konsisten dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Rata-rata item ini sebesar 6.12 menunjukkan sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa auditor Inspektorat melakukan review/evaluasi terhadap kegiatan dan program audit untuk memastikan bahwa hasilnya konsisten dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Indikator (EAI.4) menyatakan auditor melakukan review terhadap ketepatan dan keandalan laporan keuangan. Tabel 5.13 menyajikan data bahwa dari 152 responden, paling banyak 63.2% responden menyatakan setuju bahwa auditor Itjen melakukan review terhadap ketepatan dan keandalan laporan keuangan, dan 28.9% responden menyatakan sangat setuju bahwa auditor Itjen melakukan review terhadap ketepatan dan keandalan laporan keuangan. Rata-rata item ini sebesar 6.18 menunjukkan sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa auditor Itjen melakukan review terhadap ketepatan dan keandalan laporan keuangan.

Indikator (EAI.5) menyatakan auditor melakukan review kepatuhan kebijakan, rencana, prosedur dan peraturan. Berdasarkan pengolahan data dari 152 responden yang disajikan pada Tabel 5.13, paling banyak 61.8% responden

menyatakan setuju bahwa auditor Itjen melakukan review terhadap kepatuhan atas kebijakan, rencana, prosedur dan peraturan yang ada, dan 27.6% responden menyatakan sangat setuju bahwa auditor Itjen melakukan review terhadap kepatuhan atas kebijakan, rencana, prosedur dan peraturan yang ada. Rata-rata item ini sebesar 6.13 menunjukkan sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa auditor Itjen melakukan review terhadap kepatuhan atas kebijakan, rencana, prosedur dan peraturan yang ada.

Indikator (EAI.6) menyatakan auditor melakukan review atas keekonomisan, keefektifan dan efisiensi penggunaan sumber daya. Hasil pengolahan data yang ditampilkan pada Tabel 5.13 menemukan bahwa dari 152 responden, paling banyak 60.5% responden menyatakan setuju bahwa auditor Inspektorat melakukan review terhadap unit kerja atas keekonomisan, keefektifan dan efisiensi penggunaan sumber daya, dan 27.0% responden menyatakan sangat setuju bahwa auditor Inspektorat melakukan review terhadap unit kerja atas keekonomisan, keefektifan dan efisiensi penggunaan sumber daya. Rata-rata item ini sebesar 6.05 menunjukkan sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa auditor Inspektorat melakukan review terhadap unit kerja atas keekonomisan, keefektifan dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Indikator (EAI.7) menyatakan auditor melakukan review terhadap peralatan, metode dan sistem pengamanan asset. Tabel 5.13 dapat menjelaskan bahwa dari 152 responden, paling banyak 57.9% responden menyatakan setuju bahwa auditor Inspektorat melakukan review terhadap peralatan, metode dan sistem pengamanan asset unit kerja, dan 19.1% responden menyatakan sangat setuju bahwa auditor Inspektorat melakukan review terhadap peralatan, metode dan sistem pengamanan asset unit kerja. Rata-rata item ini sebesar 5.86 menunjukkan sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa auditor

Inspektorat melakukan review terhadap peralatan, metode dan sistem pengamanan asset unit kerja.

Indikator (EAI.8) menyatakan auditor melakukan evaluasi dan membuat rekomendasi untuk meningkatkan sistem pengendalian internal (SPI). Tabel 5.13 menyajikan data, dari 152 responden paling banyak 59.9% responden menyatakan setuju bahwa auditor Inspektorat melakukan evaluasi dan membuat rekomendasi untuk meningkatkan SPI jika diperlukan, dan 28.3% responden menyatakan sangat setuju bahwa auditor Inspektorat melakukan evaluasi dan membuat rekomendasi untuk meningkatkan SPI jika diperlukan. Rata-rata item ini sebesar 6.13 menunjukkan sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa auditor Inspektorat melakukan evaluasi dan membuat rekomendasi untuk meningkatkan SPI jika diperlukan.

Indikator (EAI.9) merupakan pengembangan rencana audit/pengawasan tahunan yang akan dilakukan oleh Itjen. Tabel 5.13 menampilkan data, dari 152 responden paling banyak 61.2% responden menyatakan setuju bahwa Itjen mengembangkan rencana audit/pengawasan tahunan dengan baik, dan 18.4% responden menyatakan sangat setuju bahwa Itjen mengembangkan rencana audit/pengawasan tahunan dengan baik. Rata-rata item ini sebesar 5.82 menunjukkan sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa Itjen mengembangkan rencana audit/pengawasan tahunan dengan baik.

Indikator (EAI.10) menyatakan auditor mengambil tindakan rutin untuk mengimplementasikan rekomendasi dalam laporan hasil audit. Kemudian dari 152 responden yang disajikan pada Tabel 5.13, paling banyak 57.2% responden menyatakan setuju bahwa tindakan rutin diambil untuk mengimplementasikan rekomendasi dalam laporan hasil audit, dan 21.7% responden menyatakan sangat setuju bahwa tindakan rutin diambil untuk mengimplementasikan rekomendasi dalam laporan hasil audit. Rata-rata item ini sebesar 5.91

menunjukkan sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa tindakan rutin diambil untuk mengimplementasikan rekomendasi dalam laporan hasil audit.

Indikator (EAI.11) menyatakan Itjen melakukan tindaklanjut audit. Selanjutnya dari 152 responden yang ditampilkan pada Tabel 5.13, paling banyak 53.9% responden menyatakan setuju bahwa Itjen menyediakan tindaklanjut yang memadai untuk memastikan tindakan koreksi telah dilakukan dan efektif, dan 24.3% responden menyatakan sangat setuju bahwa Itjen menyediakan tindaklanjut yang memadai untuk memastikan tindakan koreksi telah dilakukan dan efektif. Rata-rata item ini sebesar 5.97 menunjukkan sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa Itjen menyediakan tindaklanjut yang memadai untuk memastikan tindakan koreksi telah dilakukan dan efektif.

5.4.6. Persepsi Responden pada Variabel Korupsi

Korupsi merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum, memperkaya diri, orang atau badan lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Korupsi adalah perbuatan yang menyebabkan kerugian negara, perbuatan suap-menyuap, pengelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang dalam pengadaan barang dan jasa, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, dan gratifikasi (UU No 31 Tahun 1999). Variabel ini terdiri dari 4 (empat) indikator/item pernyataan. Adapun persepsi responden pada variabel korupsi dapat dilihat melalui Tabel 5.14.

Indikator (KOR.1) menyatakan bahwa peningkatan efektivitas fungsi audit/pengawasan internal dapat menurunkan tingkat benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan Tabel 5.14 dapat diketahui bahwa dari 152 responden, paling banyak 49.3% responden menyatakan setuju

bahwa auditor Itjen percaya bahwa peningkatan efektivitas fungsi audit/pengawasan internal dapat menurunkan tingkat benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, dan 40.1% responden menyatakan sangat setuju bahwa auditor Itjen percaya bahwa peningkatan efektivitas fungsi audit/pengawasan internal dapat menurunkan tingkat benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Rata-rata item ini sebesar 6.29 menunjukkan sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa auditor Itjen percaya bahwa peningkatan efektivitas fungsi audit/pengawasan internal dapat menurunkan tingkat benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.

Tabel 5.14
Sebaran Jawaban Responden Pada Konstruk Korupsi (KOR)

		Jawaban Responden							Rata-Rata
		SS	S	AS	N	ATS	TS	STS	
KOR.1	F	61	75	15	1	0	0	0	6.29
	%	40.1%	49.3%	9.9%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	
KOR.2	F	57	86	7	2	0	0	0	6.30
	%	37.5%	56.6%	4.6%	1.3%	0.0%	0.0%	0.0%	
KOR.3	F	57	80	14	1	0	0	0	6.27
	%	37.5%	52.6%	9.2%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	
KOR.4	F	71	76	4	1	0	0	0	6.43
	%	46.7%	50.0%	2.6%	0.7%	0.0%	0.0%	0.0%	

Sumber: Data diolah, 2017 (lampiran 4)

Keterangan:

KOR.1: auditor Itjen percaya bahwa peningkatan efektivitas fungsi audit/pengawasan internal dapat menurunkan tingkat benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa

KOR.2: auditor Itjen percaya bahwa peningkatan efektivitas fungsi audit/pengawasan internal dapat menurunkan tingkat perbuatan curang dalam pengadaan barang dan jasa

KOR.3: auditor Itjen percaya bahwa peningkatan efektivitas fungsi audit/pengawasan internal dapat menurunkan gratifikasi

KOR.4: Itjen sebagai bagian dari tata kelola organisasi kementerian/lembaga, dapat membantu dalam memerangi korupsi

Indikator (KOR.2) menyatakan bahwa peningkatan efektivitas fungsi audit/pengawasan internal dapat menurunkan tingkat perbuatan curang dalam pengadaan barang dan jasa. Hasil pengolahan data yang ditampilkan pada Tabel

5.14 menunjukkan dari 152 responden, paling banyak 56.6% responden menyatakan setuju bahwa auditor Itjen percaya bahwa peningkatan efektivitas fungsi audit/pengawasan internal dapat menurunkan tingkat perbuatan curang dalam pengadaan barang dan jasa, dan 37.5% responden menyatakan sangat setuju bahwa auditor Itjen percaya bahwa peningkatan efektivitas fungsi audit/pengawasan internal dapat menurunkan tingkat perbuatan curang dalam pengadaan barang dan jasa. Rata-rata item ini sebesar 6.30 menunjukkan sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa auditor Itjen percaya bahwa peningkatan efektivitas fungsi audit/pengawasan internal dapat menurunkan tingkat perbuatan curang dalam pengadaan barang dan jasa.

Indikator (KOR.3) menyatakan bahwa peningkatan efektivitas fungsi audit/pengawasan internal dapat menurunkan gratifikasi. Selanjutnya dari 152 responden yang ditampilkan pada Tabel 5.14, paling banyak 52.6% responden menyatakan setuju bahwa auditor Itjen percaya bahwa peningkatan efektivitas fungsi audit/pengawasan internal dapat menurunkan gratifikasi, dan 37.5% responden menyatakan sangat setuju bahwa auditor Itjen percaya bahwa peningkatan efektivitas fungsi audit/pengawasan internal dapat menurunkan gratifikasi. Rata-rata item ini sebesar 6.27 menunjukkan sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa auditor Itjen percaya bahwa peningkatan efektivitas fungsi audit/pengawasan internal dapat menurunkan gratifikasi.

Indikator (KOR.4) menyatakan bahwa Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari tata kelola organisasi kementerian/lembaga, dapat membantu dalam memerangi korupsi. Berdasarkan Tabel 5.14, dari 152 responden paling banyak 50.0% responden menyatakan setuju bahwa Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari tata kelola organisasi kementerian/lembaga, dapat membantu dalam memerangi korupsi, dan 46.7% responden menyatakan sangat setuju bahwa

Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari tata kelola organisasi kementerian/lembaga, dapat membantu dalam memerangi korupsi. Rata-rata item ini sebesar 6.43 menunjukkan sebagian besar responden menyatakan sangat setuju bahwa Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari tata kelola organisasi kementerian/lembaga, dapat membantu dalam memerangi korupsi.

5.5. Analisis Partial Least Square (PLS)

5.5.1. Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Pengujian evaluasi model pengukuran dilakukan untuk mengetahui kelayakan atau validitas dan realibilitas konstruk korupsi, efektivitas audit internal, kompetensi auditor internal, independensi organisasi audit internal, hubungan antara auditor internal dan eksternal, dan dukungan manajemen yang telah dikembangkan. Tiga pengujian dilakukan untuk menilai *outer model* pada indikator reflektif pada penelitian ini, yaitu: *convergent validity*, *discriminant validity* dan pengujian reliabilitas.

5.5.1.1 Convergent Validity

Convergent validity dimaksudkan untuk mengetahui valid tidaknya indikator dalam mengukur variabel. *Convergent validity* setiap indikator dalam mengukur variabel ditunjukkan oleh besar kecilnya *loading factor*. Suatu indikator dikatakan valid apabila *loading factor* bernilai positif dan lebih besar 0.6. Hasil pengujian *Convergent Validity* dapat dilihat melalui Tabel 5.15.

Berdasarkan tabel 5.15 hasil analisis *Convergent Validity* dapat diketahui bahwa indikator KO1, KO6 - KO8, IN2 – IN5, HA1 – HA7, DM1 - DM2, EAI1 – EAI11 dan KOR1 – KOR4 menghasilkan *loading factor* yang lebih besar dari 0.6. Dengan demikian indikator-indikator tersebut dinyatakan valid dalam mengukur variabel yang bersesuaian.

Tabel 5.15
Hasil Pengujian *Convergent Validity*

Variabel	Indikator	<i>Loading Factor</i>	SE	T Statistics	Keterangan
Kompetensi Auditor Internal	KO.1	0.761	0.045	16.941	Valid
	KO.6	0.715	0.103	6.953	Valid
	KO.7	0.733	0.055	13.416	Valid
	KO.8	0.787	0.056	14.081	Valid
Independensi Organisasi	IN.2	0.701	0.094	7.433	Valid
	IN.3	0.697	0.118	5.886	Valid
	IN.4	0.821	0.054	15.187	Valid
	IN.5	0.844	0.045	18.936	Valid
Hubungan Antara Auditor Internal dan Eksternal	HA.1	0.711	0.053	13.538	Valid
	HA.2	0.711	0.055	12.869	Valid
	HA.3	0.870	0.017	50.582	Valid
	HA.4	0.815	0.037	22.144	Valid
	HA.5	0.788	0.052	15.046	Valid
	HA.6	0.799	0.038	21.013	Valid
	HA.7	0.721	0.042	17.300	Valid
Dukungan Manajemen	DM.1	0.894	0.044	20.384	Valid
	DM.2	0.824	0.054	15.146	Valid
Efektivitas Audit Internal	EAI.1	0.730	0.042	17.287	Valid
	EAI.2	0.826	0.026	32.201	Valid
	EAI.3	0.768	0.034	22.520	Valid
	EAI.4	0.711	0.032	22.009	Valid
	EAI.5	0.813	0.035	22.980	Valid
	EAI.6	0.733	0.082	8.953	Valid
	EAI.7	0.717	0.060	12.046	Valid
	EAI.8	0.679	0.041	16.619	Valid
	EAI.9	0.628	0.091	6.873	Valid
	EAI.10	0.746	0.044	17.129	Valid
	EAI.11	0.730	0.027	26.695	Valid
Korupsi	KOR.1	0.894	0.025	36.224	Valid
	KOR.2	0.918	0.016	57.393	Valid
	KOR.3	0.776	0.032	23.952	Valid
	KOR.4	0.894	0.025	36.224	Valid

Sumber: Data diolah, 2017 (Lampiran 5)

Convergent Validity selain dapat dilihat melalui *loading factor*, juga dapat diketahui melalui *Average Variance Extracted* (AVE). Suatu instrumen dikatakan memenuhi pengujian validitas konvergen apabila memiliki *Average Variance*

Extracted (AVE) diatas 0.5. Hasil pengujian *Convergent Validity* disajikan dalam Tabel 5.16 berikut :

Tabel 5.16
Hasil Pengujian *Convergent Validity* Nilai AVE

Variabel	AVE	Communality
Kompetensi Auditor Internal	0.562	0.562
Independensi Organisasi	0.591	0.591
Hubungan Antara Auditor Internal dan Eksternal	0.602	0.602
Dukungan Manajemen	0.739	0.739
Efektivitas Audit Internal	0.543	0.543
Korupsi	0.743	0.743

Sumber: Data diolah, 2017 (Lampiran 5)

Berdasarkan Tabel 5.16 dapat diketahui bahwa variabel kompetensi auditor internal, independensi organisasi audit internal, hubungan antara auditor internal dan eksternal, dukungan manajemen, efektivitas audit internal, dan korupsi menghasilkan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) yang lebih besar dari 0.5. Dengan demikian indikator yang mengukur variabel kompetensi auditor internal, independensi organisasi, hubungan antara auditor internal dan eksternal, dukungan manajemen, efektivitas audit internal, dan korupsi dinyatakan valid.

5.5.1.2 Discriminant Validity

Validitas diskriminan dihitung menggunakan *cross correlation* dengan kriteria bahwa apabila nilai *loading faktor* dalam suatu variabel yang bersesuaian lebih besar dari nilai korelasi indikator pada variabel lainnya maka indikator tersebut dinyatakan valid dalam mengukur dimensi dan variabel yang bersesuaian. Hasil perhitungan *cross correlation* disajikan dalam Tabel 5.17 berikut :

Tabel 5.17
Hasil Perhitungan Cross Correlation

Indikator	KO	IN	HA	DM	EAI	KOR	Keterangan
KO.1	0.761	0.163	0.335	0.148	0.450	-0.201	Valid
KO.6	0.715	0.238	0.390	0.383	0.448	-0.222	Valid
KO.7	0.733	0.186	0.331	0.175	0.353	-0.149	Valid
KO.8	0.787	0.111	0.373	0.270	0.449	-0.240	Valid
IN.2	0.084	0.701	0.085	0.038	0.168	-0.141	Valid
IN.3	0.115	0.697	0.092	0.079	0.202	-0.140	Valid
IN.4	0.184	0.821	0.233	0.206	0.352	-0.217	Valid
IN.5	0.261	0.844	0.283	0.157	0.382	-0.255	Valid
HA.1	0.373	0.137	0.711	0.137	0.453	-0.303	Valid
HA.2	0.378	0.145	0.711	0.141	0.451	-0.366	Valid
HA.3	0.417	0.304	0.870	0.261	0.661	-0.478	Valid
HA.4	0.373	0.203	0.815	0.272	0.636	-0.329	Valid
HA.5	0.372	0.204	0.788	0.246	0.581	-0.418	Valid
HA.6	0.407	0.184	0.799	0.169	0.563	-0.372	Valid
HA.7	0.286	0.179	0.721	0.227	0.534	-0.400	Valid
DM.1	0.322	0.156	0.294	0.894	0.426	-0.134	Valid
DM.2	0.239	0.150	0.164	0.824	0.337	-0.128	Valid
EAI.1	0.359	0.280	0.559	0.304	0.730	-0.490	Valid
EAI.2	0.465	0.260	0.650	0.417	0.826	-0.488	Valid
EAI.3	0.407	0.259	0.527	0.386	0.768	-0.499	Valid
EAI.4	0.400	0.369	0.501	0.250	0.711	-0.357	Valid
EAI.5	0.539	0.281	0.540	0.371	0.813	-0.384	Valid
EAI.6	0.408	0.249	0.519	0.332	0.733	-0.354	Valid
EAI.7	0.386	0.249	0.507	0.295	0.717	-0.442	Valid
EAI.8	0.395	0.362	0.498	0.299	0.679	-0.375	Valid
EAI.9	0.512	0.279	0.489	0.360	0.628	-0.263	Valid
EAI.10	0.425	0.239	0.512	0.338	0.746	-0.373	Valid
EAI.11	0.346	0.344	0.532	0.260	0.730	-0.450	Valid

Lanjutan Tabel Tabel 5.17 Hasil Perhitungan *Cross Correlation*

Indikator	KO	IN	HA	DM	EAI	KOR	Keterangan
KOR.1	-0.249	-0.252	-0.401	-0.145	-0.479	0.853	Valid
KOR.2	-0.250	-0.207	-0.471	-0.148	-0.487	0.894	Valid
KOR.3	-0.240	-0.197	-0.446	-0.134	-0.493	0.918	Valid
KOR.4	-0.206	-0.241	-0.378	-0.095	-0.461	0.776	Valid

Sumber: Data diolah, 2017 (Lampiran 5)

Berdasarkan pengukuran *cross correlation* pada Tabel 5.17, dapat diketahui bahwa secara keseluruhan variabel kompetensi auditor internal, independensi organisasi audit internal, hubungan antara auditor internal dan eksternal, dukungan manajemen, efektivitas audit internal, dan korupsi menghasilkan *loading factor* yang lebih besar dibandingkan dengan *cross correlation* indikator pada variabel lainnya. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa indikator yang mengukur variabel kompetensi auditor, independensi organisasi, hubungan antara auditor internal dan eksternal, dukungan manajemen, efektivitas audit internal, dan korupsi dinyatakan valid.

5.5.1.3. Pengujian Reliabilitas

Perhitungan yang dapat digunakan untuk menguji reliabilitas konstruk adalah *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. Kriteria pengujian menyatakan bahwa apabila *Composite Reliability* bernilai lebih besar dari 0.6 dan *Cronbach's Alpha* bernilai lebih besar dari 0.6 maka konstruk tersebut dinyatakan reliabel. Hasil perhitungan *Composite Reliability* dan *cronbach alpha* dapat dilihat melalui ringkasan yang disajikan dalam Tabel 5.18.

Berdasarkan Tabel 5.18 dapat diketahui bahwa nilai *Composite Reliability* pada variabel kompetensi auditor internal, independensi organisasi, hubungan antara auditor internal dan eksternal, dukungan manajemen, efektivitas audit internal, dan korupsi lebih besar dari 0.6. Dengan demikian,

berdasarkan perhitungan *Composite Reliability* semua indikator yang mengukur variabel kompetensi auditor internal, independensi organisasi audit internal, hubungan antara auditor internal dan eksternal, dukungan manajemen, efektivitas audit internal, dan korupsi dinyatakan reliabel.

Tabel 5.18
Nilai *Composite Reliability* dan *Cronbach Alpha*

Variabel	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cronbachs Alpha</i>	Keterangan
Kompetensi Auditor	0.837	0.741	Reliabel
Independensi Organisasi Audit Internal	0.852	0.789	Reliabel
Hubungan Antara Auditor Internal dan Eksternal	0.913	0.889	Reliabel
Dukungan Manajemen	0.850	0.651	Reliabel
Efektivitas Audit Internal	0.928	0.915	Reliabel
Korupsi	0.920	0.883	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2017 (Lampiran 5)

Selanjutnya nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel kompetensi auditor internal, independensi organisasi audit internal, hubungan antara auditor internal dan eksternal, dukungan manajemen, efektivitas audit internal, dan korupsi lebih besar dari 0.6. Dengan demikian, berdasarkan perhitungan *Cronbach's Alpha* semua indikator yang mengukur variabel kompetensi auditor internal, independensi organisasi, hubungan antara auditor internal dan eksternal, dukungan manajemen, efektivitas audit internal, dan korupsi dinyatakan reliabel.

5.5.1.4. Model Pengukuran

Konversi diagram jalur ke dalam model pengukuran dapat diketahui melalui penjelasan berikut :

5.5.1.4.1. Model Pengukuran Variabel Kompetensi Auditor Internal

Indikator pengukur variabel kompetensi auditor dapat dilihat melalui Tabel 5.19 berikut ini:

Tabel 5.19
Nilai *Loading Factor* Indikator Variabel Kompetensi Auditor Internal

Variabel Eksogen	Indikator	<i>Loading Factor</i>
Kompetensi Auditor Internal	KO.1	0.761
	KO.6	0.715
	KO.7	0.733
	KO.8	0.787

Sumber: Data diolah, 2017 (Lampiran 5)

Model pengukuran variabel kompetensi auditor adalah sebagai berikut :

$$KO.1 = 1 KO + 1 \Rightarrow KO.1 = 0.761 KO$$

$$KO.6 = 6 KO + 6 \Rightarrow KO.6 = 0.715 KO$$

$$KO.7 = 7 KO + 7 \Rightarrow KO.7 = 0.733 KO$$

$$KO.8 = 8 KO + 8 \Rightarrow KO.8 = 0.787 KO$$

Berdasarkan model pengukuran di atas diketahui bahwa nilai *loading* indikator pendidikan (KO.1) sebesar 0.761. Hal ini berarti keragaman variabel kompetensi auditor internal mampu dijelaskan oleh indikator pendidikan (KO.1) sebesar 76.1%. Dengan kata lain, kontribusi indikator pendidikan (KO.1) dalam mengukur variabel kompetensi auditor internal sebesar 76.1%.

Nilai *loading* indikator penguasaan teknologi modern (KO.6) sebesar 0.715. Hal ini berarti keragaman variabel kompetensi auditor internal mampu dijelaskan oleh indikator penguasaan teknologi modern (KO.6) sebesar 71.5%. Dengan kata lain, kontribusi indikator penguasaan teknologi modern (KO.6) dalam mengukur variabel kompetensi auditor internal sebesar 71.5%.

Nilai *loading* indikator audit dan monitoring tepat waktu (KO.7) sebesar 0.733. Hal ini berarti keragaman variabel kompetensi auditor internal mampu dijelaskan oleh indikator audit dan monitoring tepat waktu (KO.7) sebesar 73.3%. Dengan kata lain, kontribusi indikator audit dan monitoring tepat waktu (KO.7) dalam mengukur variabel kompetensi auditor internal sebesar 73.3%.

Nilai *loading* indikator audit dan monitoring sesuai lingkup penugasan yang direncanakan (KO.8) sebesar 0.787. Hal ini berarti keragaman variabel kompetensi auditor internal mampu dijelaskan oleh indikator audit dan monitoring sesuai lingkup penugasan (KO.8) sebesar 78.8%. Dengan kata lain, kontribusi indikator audit dan monitoring sesuai lingkup penugasan (KO.8) dalam mengukur variabel kompetensi auditor internal sebesar 78.8%.

Model pengukuran variabel kompetensi auditor internal juga menginformasikan bahwa indikator audit dan monitoring sesuai lingkup penugasan yang direncanakan (KO.8) memiliki nilai *loading* yang paling tinggi yaitu sebesar 0.787. Hal ini berarti indikator audit dan monitoring sesuai lingkup penugasan (KO.8) merupakan indikator yang paling mendekati dalam mengukur variabel kompetensi auditor internal.

5.5.1.4.2. Model Pengukuran Variabel Independensi Organisasi Audit Internal

Indikator pengukur variabel independensi organisasi dapat dilihat melalui Tabel 5.20.

Tabel 5.20
Nilai *Loading Factor* Indikator Variabel Independensi Organisasi Audit Internal

Variabel Eksogen	Indikator	<i>Loading Factor</i>
Independensi Organisasi Audit Internal	IN.2	0.701
	IN.3	0.697
	IN.4	0.821
	IN.5	0.844

Sumber: Data diolah, 2017 (Lampiran 5)

Model pengukuran variabel independensi organisasi adalah sebagai berikut :

$$IN.2 = 10 IN + 10 \quad \rightarrow \quad IN.2 = 0.701 IN$$

$$IN.3 = 11 IN + 11 \quad \rightarrow \quad IN.3 = 0.697 IN$$

$$\text{IN.4} = .12 \text{ IN} + .12 \quad \rightarrow \quad \text{IN.4} = 0.821 \text{ IN}$$

$$\text{IN.5} = .13 \text{ IN} + .13 \quad \rightarrow \quad \text{IN.5} = 0.844 \text{ IN}$$

Berdasarkan model pengukuran di atas diketahui bahwa nilai *loading* indikator inspektur memiliki akses langsung ke pimpinan kementerian (IN.2) sebesar 0.701. Hal ini berarti keragaman variabel independensi organisasi audit internal mampu dijelaskan oleh indikator inspektur memiliki akses langsung ke pimpinan kementerian (IN.2) sebesar 70.1%. Dengan kata lain, kontribusi indikator inspektur memiliki akses langsung ke pimpinan kementerian (IN.2) dalam mengukur variabel independensi organisasi audit internal sebesar 70.1%.

Nilai *loading* indikator inspektorat memiliki akses langsung ke pimpinan kementerian (IN.3) sebesar 0.697. Hal ini berarti keragaman variabel independensi organisasi audit internal mampu dijelaskan oleh indikator inspektorat memiliki akses langsung ke pimpinan kementerian (IN.3) sebesar 69.7%. Dengan kata lain, kontribusi indikator inspektorat memiliki akses langsung ke pimpinan kementerian (IN.3) dalam mengukur variabel independensi organisasi audit internal sebesar 69.7%.

Nilai *loading* indikator konflik kepentingan (IN.4) sebesar 0.821. Hal ini berarti keragaman variabel independensi organisasi audit internal mampu dijelaskan oleh indikator konflik kepentingan (IN.4) sebesar 82.1%. Dengan kata lain, kontribusi indikator konflik kepentingan (IN.4) dalam mengukur variabel independensi organisasi audit internal sebesar 82.1%.

Nilai *loading* indikator akses tidak terbatas ke unit kerja (IN.5) sebesar 0.844. Hal ini berarti keragaman variabel independensi organisasi audit internal mampu dijelaskan oleh indikator akses tidak terbatas ke unit kerja (IN.5) sebesar 84.4%. Dengan kata lain, kontribusi indikator akses tidak terbatas ke unit kerja (IN.5) dalam mengukur variabel independensi organisasi audit internal sebesar 84.4%.

Model pengukuran variabel independensi organisasi audit internal juga menginformasikan bahwa akses tidak terbatas ke unit kerja (IN.5) memiliki nilai *loading* yang paling tinggi yaitu sebesar 0.844. Hal ini berarti indikator akses tidak terbatas ke unit kerja (IN.5) merupakan indikator yang paling mendekati dalam mengukur variabel independensi organisasi audit internal.

5.5.1.4.3. Model Pengukuran Variabel Hubungan antara Auditor Internal dan Eksternal

Indikator pengukur variabel hubungan antara auditor internal dan eksternal dapat dilihat melalui Tabel 5.21.

Tabel 5.21
Nilai *Loading Factor* Indikator Variabel Hubungan antara Auditor Internal dan Eksternal

Variabel Eksogen	Indikator	<i>Loading Factor</i>
Hubungan Antara Auditor Internal dan Eksternal	HA.1	0.711
	HA.2	0.711
	HA.3	0.870
	HA.4	0.815
	HA.5	0.788
	HA.6	0.799
	HA.7	0.721

Sumber: Data diolah, 2017 (Lampiran 5)

Model pengukuran variabel hubungan antara auditor internal dan eksternal adalah sebagai berikut :

$$HA.1 = 14 HA + 14 \rightarrow HA.1 = 0.711 HA$$

$$HA.2 = 15 HA + 15 \rightarrow HA.2 = 0.711 HA$$

$$HA.3 = 16 HA + 16 \rightarrow HA.3 = 0.870 HA$$

$$HA.4 = 17 HA + 17 \rightarrow HA.4 = 0.815 HA$$

$$HA.5 = 18 HA + 18 \rightarrow HA.5 = 0.788 HA$$

$$HA.6 = 19 HA + 19 \rightarrow HA.6 = 0.799 HA$$

$$HA.7 = 20 HA + 20 \rightarrow HA.7 = 0.721 HA$$

Berdasarkan model pengukuran di atas diketahui bahwa nilai *loading* indikator bersikap ramah dan mendukung auditor internal (HA.1) sebesar 0.711. Hal ini berarti keragaman variabel hubungan antara auditor internal dan eksternal mampu dijelaskan oleh indikator bersikap ramah dan mendukung auditor internal (HA.1) sebesar 71.1%. Dengan kata lain, kontribusi indikator bersikap ramah dan mendukung auditor internal (HA.1) dalam mengukur variabel hubungan antara auditor internal dan eksternal sebesar 71.1%.

Nilai *loading* indikator memiliki sikap yang baik (HA.2) sebesar 0.711. Hal ini berarti keragaman variabel hubungan antara auditor internal dan eksternal mampu dijelaskan oleh indikator memiliki sikap yang baik (HA.2) sebesar 71.1%. Dengan kata lain, kontribusi indikator memiliki sikap yang baik (HA.2) dalam mengukur variabel hubungan antara auditor internal dan eksternal sebesar 71.1%.

Nilai *loading* indikator memberi kesempatan inspektorat menjelaskan kepentingannya (HA.3) sebesar 0.870. Hal ini berarti keragaman variabel hubungan antara auditor internal dan eksternal mampu dijelaskan oleh indikator memberi kesempatan inspektorat menjelaskan kepentingannya (HA.3) sebesar 87.0%. Dengan kata lain, kontribusi indikator memberi kesempatan inspektorat menjelaskan kepentingannya (HA.3) dalam mengukur variabel hubungan antara auditor internal dan eksternal sebesar 87.0%.

Nilai *loading* indikator koordinasi antara auditor Itjen dan auditor eksternal (termasuk membahas tentang kepentingan bersama) (HA.4) sebesar 0.815. Hal ini berarti keragaman variabel hubungan antara auditor internal dan eksternal mampu dijelaskan oleh indikator koordinasi (termasuk membahas tentang kepentingan bersama) (HA.4) sebesar 81.5%. Dengan kata lain, kontribusi indikator koordinasi (termasuk membahas tentang kepentingan bersama) (HA.4)

dalam mengukur variabel hubungan antara auditor internal dan eksternal sebesar 81.5%.

Nilai *loading* indikator pembahasan rencana audit (HA.5) sebesar 0.788. Hal ini berarti keragaman variabel hubungan antara auditor internal dan eksternal mampu dijelaskan oleh indikator pembahasan rencana audit (HA.5) sebesar 78.8%. Dengan kata lain, kontribusi indikator pembahasan rencana audit (HA.5) dalam mengukur variabel hubungan antara auditor internal dan eksternal sebesar 78.8%.

Nilai *loading* indikator frekwensi pertemuan (HA.6) sebesar 0.799. Hal ini berarti keragaman variabel hubungan antara auditor internal dan eksternal mampu dijelaskan oleh indikator frekwensi pertemuan (HA.6) sebesar 79.9%. Dengan kata lain, kontribusi indikator frekwensi pertemuan (HA.6) dalam mengukur variabel hubungan antara auditor internal dan eksternal sebesar 79.9%.

Nilai *loading* indikator dukungan manajemen atas hubungan antara auditor internal dan eksternal (HA.7) sebesar 0.721. Hal ini berarti keragaman variabel hubungan antara auditor internal dan eksternal mampu dijelaskan oleh indikator dukungan manajemen atas hubungan antara auditor internal dan eksternal (HA.7) sebesar 72.1%. Dengan kata lain, kontribusi indikator dukungan manajemen atas hubungan antara auditor internal dan eksternal (HA.7) dalam mengukur variabel hubungan antara auditor internal dan eksternal sebesar 72.1%.

Model pengukuran variabel hubungan antara auditor internal dan eksternal juga menginformasikan bahwa indikator memberi kesempatan inspektorat menjelaskan kepentinganya (HA.3) memiliki nilai *loading* yang paling tinggi yaitu sebesar 0.870. Hal ini berarti indikator memberi kesempatan inspektorat menjelaskan kepentinganya (HA.3) merupakan indikator yang paling

mendekati dalam mengukur variabel hubungan antara auditor internal dan eksternal.

5.5.1.4.4. Model Pengukuran Variabel Dukungan manajemen

Indikator pengukur variabel dukungan manajemen dapat dilihat melalui Tabel 5.22.

Tabel 5.22
Nilai *Loading Factor* Indikator Variabel Dukungan manajemen

Variabel Eksogen	Indikator	<i>Loading Factor</i>
Dukungan Manajemen	DM.1	0.894
	DM.2	0.824

Sumber: Data diolah, 2017 (Lampiran 5)

Model pengukuran variabel dukungan manajemen adalah sebagai berikut :

$$\text{DM.1} = .21 \text{ DM} + .21 \rightarrow \text{DM.1} = 0.894 \text{ DM}$$

$$\text{DM.2} = .22 \text{ DM} + .22 \rightarrow \text{DM.2} = 0.824 \text{ DM}$$

Berdasarkan model pengukuran di atas diketahui bahwa nilai *loading* indikator keterlibatan pimpinan kementerian pada rencana audit (DM.1) sebesar 0.894. Hal ini berarti keragaman variabel dukungan manajemen mampu dijelaskan oleh indikator keterlibatan pimpinan kementerian pada rencana audit (DM.1) sebesar 89.4%. Dengan kata lain, kontribusi indikator keterlibatan pimpinan kementerian pada rencana audit (DM.1) dalam mengukur variabel dukungan manajemen sebesar 89.4%.

Nilai *loading* indikator tanggapan atas laporan audit (DM.2) sebesar 0.824. Hal ini berarti keragaman variabel dukungan manajemen mampu dijelaskan oleh indikator tanggapan atas laporan audit (DM.2) sebesar 82.4%. Dengan kata lain, kontribusi indikator tanggapan atas laporan audit (DM.2) dalam mengukur variabel dukungan manajemen sebesar 82.4%.

Model pengukuran variabel dukungan manajemen juga menginformasikan bahwa indikator keterlibatan pada rencana audit (DM.1)

memiliki nilai *loading* yang paling tinggi yaitu sebesar 0.894. Hal ini berarti indikator keterlibatan pada rencana audit (DM.1) merupakan indikator yang paling mendekati dalam mengukur variabel dukungan manajemen.

5.5.1.4.5. Model Pengukuran Variabel Efektivitas Audit Internal

Indikator pengukur variabel efektivitas audit internal dapat dilihat melalui Tabel 5.23.

Tabel 5.23
Nilai *Loading Factor* Indikator Variabel Efektivitas Audit Internal

Variabel Eksogen	Indikator	<i>Loading Factor</i>
Efektivitas Audit Internal	EAI.1	0.730
	EAI.2	0.826
	EAI.3	0.768
	EAI.4	0.711
	EAI.5	0.813
	EAI.6	0.733
	EAI.7	0.717
	EAI.8	0.679
	EAI.9	0.628
	EAI.10	0.746
	EAI.11	0.730

Sumber: Data diolah, 2017 (Lampiran 5)

Model pengukuran variabel efektivitas audit internal adalah sebagai berikut :

$$EAI.1 = 25 EAI + 1 \quad \rightarrow \quad EAI.1 = 0.730 EAI$$

$$EAI.2 = 26 EAI + 2 \quad \rightarrow \quad EAI.2 = 0.826 EAI$$

$$EAI.3 = 27 EAI + 3 \quad \rightarrow \quad EAI.3 = 0.768 EAI$$

$$EAI.4 = 28 EAI + 4 \quad \rightarrow \quad EAI.4 = 0.711 EAI$$

$$EAI.5 = 29 EAI + 5 \quad \rightarrow \quad EAI.5 = 0.813 EAI$$

$$EAI.6 = 30 EAI + 6 \quad \rightarrow \quad EAI.6 = 0.733 EAI$$

$$EAI.7 = 31 EAI + 7 \quad \rightarrow \quad EAI.7 = 0.717 EAI$$

$$EAI.8 = 32 EAI + 8 \quad \rightarrow \quad EAI.8 = 0.679 EAI$$

$$EAI.9 = 33 EAI + 9 \quad \rightarrow \quad EAI.9 = 0.628 EAI$$

$$\text{EAI.10} = 34 \text{ EAI} + 10 \rightarrow \text{EAI.10} = 0.746 \text{ EAI}$$

$$\text{EAI.11} = 35 \text{ EAI} + 11 \rightarrow \text{EAI.11} = 0.730 \text{ EAI}$$

Berdasarkan model pengukuran di atas diketahui bahwa nilai *loading* indikator meningkatkan produktivitas kementerian (EAI.1) sebesar 0.730. Hal ini berarti keragaman variabel efektivitas audit internal mampu dijelaskan oleh indikator meningkatkan produktivitas kementerian (EAI.1) sebesar 73.0%. Dengan kata lain, kontribusi indikator meningkatkan produktivitas kementerian (EAI.1) dalam mengukur variabel efektivitas audit internal sebesar 73.0%.

Nilai *loading* indikator meningkatkan kinerja kementerian (EAI.2) sebesar 0.826. Hal ini berarti keragaman variabel efektivitas audit internal mampu dijelaskan oleh indikator meningkatkan kinerja kementerian (EAI.2) sebesar 82.6%. Dengan kata lain, kontribusi indikator meningkatkan kinerja kementerian (EAI.2) dalam mengukur variabel efektivitas audit internal sebesar 82.6%.

Nilai *loading* indikator review kegiatan dan program (EAI.3) sebesar 0.768. Hal ini berarti keragaman variabel efektivitas audit internal mampu dijelaskan oleh indikator review kegiatan dan program (EAI.3) sebesar 76.8%. Dengan kata lain, kontribusi indikator review kegiatan dan program (EAI.3) dalam mengukur variabel efektivitas audit internal sebesar 76.8%.

Nilai *loading* indikator review ketepatan, keandalan (EAI.4) sebesar 0.711. Hal ini berarti keragaman variabel efektivitas audit internal mampu dijelaskan oleh indikator review ketepatan, keandalan (EAI.4) sebesar 71.1%. Dengan kata lain, kontribusi indikator review ketepatan, keandalan (EAI.4) dalam mengukur variabel efektivitas audit internal sebesar 71.1%.

Nilai *loading* indikator review kepatuhan kebijakan, rencana, prosedur (EAI.5) sebesar 0.813. Hal ini berarti keragaman variabel efektivitas audit internal mampu dijelaskan oleh indikator review kepatuhan kebijakan, rencana, prosedur (EAI.5) sebesar 81.3%. Dengan kata lain, kontribusi indikator review kepatuhan

kebijakan, rencana, prosedur (EAI.5) dalam mengukur variabel efektivitas audit internal sebesar 81.3%.

Nilai *loading* indikator review keekonomisan, keefektifan dan efisiensi (EAI.6) sebesar 0.733. Hal ini berarti keragaman variabel efektivitas audit internal mampu dijelaskan oleh indikator review keekonomisan, keefektifan dan efisiensi (EAI.6) sebesar 73.3%. Dengan kata lain, kontribusi indikator review keekonomisan, keefektifan dan efisiensi (EAI.6) dalam mengukur variabel efektivitas audit internal sebesar 73.3%.

Nilai *loading* indikator review atas asset (EAI.7) sebesar 0.717. Hal ini berarti keragaman variabel efektivitas audit internal mampu dijelaskan oleh indikator review atas asset (EAI.7) sebesar 71.7%. Dengan kata lain, kontribusi indikator review atas asset (EAI.7) dalam mengukur variabel efektivitas audit internal sebesar 71.7%.

Nilai *loading* indikator evaluasi dan rekomendasi (EAI.8) sebesar 0.679. Hal ini berarti keragaman variabel efektivitas audit internal mampu dijelaskan oleh indikator evaluasi dan rekomendasi (EAI.8) sebesar 67.9%. Dengan kata lain, kontribusi indikator evaluasi dan rekomendasi (EAI.8) dalam mengukur variabel efektivitas audit internal sebesar 67.9%.

Nilai *loading* indikator mengembangkan rencana audit tahunan (EAI.9) sebesar 0.628. Hal ini berarti keragaman variabel efektivitas audit internal mampu dijelaskan oleh indikator mengembangkan rencana audit tahunan (EAI.9) sebesar 62.8%. Dengan kata lain, kontribusi indikator mengembangkan rencana audit tahunan (EAI.9) dalam mengukur variabel efektivitas audit internal sebesar 62.8%.

Nilai *loading* indikator tindakan rutin audit (EAI.10) sebesar 0.746. Hal ini berarti keragaman variabel efektivitas audit internal mampu dijelaskan oleh indikator tindakan rutin audit (EAI.10) sebesar 74.6%. Dengan kata lain,

kontribusi indikator tindakan rutin audit (EAI.10) dalam mengukur variabel efektivitas audit internal sebesar 74.6%.

Nilai *loading* indikator tindak lanjut yg memadai (EAI.11) sebesar 0.730. Hal ini berarti keragaman variabel efektivitas audit internal mampu dijelaskan oleh indikator tindak lanjut yg memadai (EAI.11) sebesar 73.0%. Dengan kata lain, kontribusi indikator tindak lanjut yg memadai (EAI.11) dalam mengukur variabel efektivitas audit internal sebesar 73.0%.

Model pengukuran variabel efektivitas audit internal juga menginformasikan bahwa indikator meningkatkan kinerja (EAI.2) memiliki nilai *loading* yang paling tinggi yaitu sebesar 0.826. Hal ini berarti indikator meningkatkan kinerja (EAI.2) merupakan indikator yang paling mendekati dalam mengukur variabel efektivitas audit internal.

5.5.1.4.6. Model Pengukuran Variabel Korupsi

Indikator pengukur variabel korupsi dapat dilihat melalui Tabel 5.24 berikut ini:

Tabel 5.24
Nilai *Loading Factor* Indikator Variabel Korupsi

Eksogen	Indikator	<i>Loading Factor</i>
Korupsi	KOR.1	0.853
	KOR.2	0.894
	KOR.3	0.918
	KOR.4	0.776

Sumber: Data diolah, 2017 (Lampiran 5)

Model pengukuran variabel korupsi adalah sebagai berikut :

$$\text{KOR.1} = 36 \text{ KOR} + 12 \rightarrow \text{KOR.1} = 0.853 \text{ KOR}$$

$$\text{KOR.2} = 37 \text{ KOR} + 13 \rightarrow \text{KOR.2} = 0.894 \text{ KOR}$$

$$\text{KOR.3} = 38 \text{ KOR} + 14 \rightarrow \text{KOR.3} = 0.918 \text{ KOR}$$

$$\text{KOR.4} = 39 \text{ KOR} + 15 \rightarrow \text{KOR.4} = 0.776 \text{ KOR}$$

Berdasarkan model pengukuran di atas diketahui bahwa nilai *loading* indikator benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa (KOR.1) sebesar 0.853. Hal ini berarti keragaman variabel korupsi mampu dijelaskan oleh indikator benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa (KOR.1) sebesar 85.3%. Dengan kata lain, kontribusi indikator benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa (KOR.1) dalam mengukur variabel korupsi sebesar 85.3%.

Nilai *loading* indikator perbuatan curang dalam pengadaan barang dan jasa (KOR.2) sebesar 0.894. Hal ini berarti keragaman variabel korupsi mampu dijelaskan oleh indikator perbuatan curang dalam pengadaan barang dan jasa (KOR.2) sebesar 89.4%. Dengan kata lain, kontribusi indikator perbuatan curang dalam pengadaan barang dan jasa (KOR.2) dalam mengukur variabel korupsi sebesar 89.4%.

Nilai *loading* indikator gratifikasi (KOR.3) sebesar 0.918. Hal ini berarti keragaman variabel korupsi mampu dijelaskan oleh indikator gratifikasi (KOR.3) sebesar 91.8%. Dengan kata lain, kontribusi indikator gratifikasi (KOR.3) dalam mengukur variabel korupsi sebesar 91.8%.

Nilai *loading* indikator organisasi audit internal (KOR.4) sebesar 0.776. Hal ini berarti keragaman variabel korupsi mampu dijelaskan oleh indikator organisasi audit internal (KOR.4) sebesar 77.6%. Dengan kata lain, kontribusi indikator organisasi audit internal (KOR.4) dalam mengukur variabel korupsi sebesar 77.6%.

Model pengukuran variabel korupsi juga menginformasikan bahwa indikator gratifikasi (KOR.3) memiliki nilai *loading* yang paling tinggi yaitu sebesar 0.918. Hal ini berarti indikator gratifikasi (KOR.3) merupakan indikator yang paling mendekati dalam mengukur variabel korupsi.

5.5.2. Evaluasi Model Struktural

5.5.2.1. Goodness of Fit Model

Pengujian yang dilakukan selanjutnya adalah pengujian model struktural yang dalam analisis PLS disebut dengan uji *Goodness of fit Model* untuk mengetahui besarnya kemampuan variabel endogen untuk menjelaskan keragaman variabel eksogen, atau dengan kata lain untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel eksogen terhadap variabel endogen. Pada penelitian ini variabel eksogen terdiri dari kompetensi auditor internal, independensi organisasi audit internal, hubungan antara auditor internal dan eksternal, dan dukungan manajemen untuk variabel endogen efektivitas audit internal. Sedangkan variabel eksogen efektivitas audit internal untuk variabel endogen korupsi. *Goodness of fit Model* dalam analisis PLS dilakukan dengan menggunakan *Q-Square predictive relevance* (Q^2). Model dikatakan memiliki *predictive relevance* apabila nilai $Q^2 > 0$. Adapun hasil *Goodness of fit Model* di tampilkan pada Tabel 5.25.

Tabel 5.25
Hasil Perhitungan Nilai *R-Square* (R^2) dan Nilai *Q-Square predictive relevance* (Q^2)

Variabel	Nilai <i>R-Square</i> (R^2)
Efektivitas Audit Internal	0.657
Korupsi	0.311
$Q^2 = 1 - (1 - R_1^2) (1 - R_2^2)$ $Q^2 = 1 - (1 - 0.657) (1 - 0.311) = 0.763$	

Sumber: Data diolah, 2017 (Lampiran 5)

Tabel 5.25 menunjukkan bahwa nilai *R-square* variabel efektivitas audit internal bernilai 0.657 atau 657 %. Hal ini dapat menunjukkan bahwa keragaman efektivitas audit internal mampu dijelaskan oleh kompetensi auditor internal, independensi organisasi audit internal, hubungan antara auditor internal dan eksternal, dan dukungan manajemen sebesar 65.7 %, atau dengan kata lain kontribusi kompetensi auditor internal internal, independensi organisasi audit

internal, hubungan antara auditor internal dan eksternal, dan dukungan manajemen terhadap efektivitas audit internal sebesar 65.7 %, sedangkan sisanya sebesar 34.3% merupakan kontribusi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Selanjutnya nilai *R-square* variabel korupsi yang disajikan pada tabel 5.25 bernilai 0.311 atau 31.1%. Hal ini dapat menunjukkan bahwa keragaman korupsi mampu dijelaskan oleh efektivitas audit internal sebesar 31.1%, atau dengan kata lain kontribusi efektivitas audit internal terhadap korupsi sebesar 31.1%, sedangkan sisanya sebesar 68.9% merupakan kontribusi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil perhitungan nilai *Q-Square predictive relevance* (Q^2) variabel korupsi yang ditampilkan pada tabel 5.25 bernilai 0.763 atau 76.3%. Hal ini dapat menunjukkan bahwa keragaman korupsi mampu dijelaskan oleh model secara keseluruhan sebesar 76.3%, atau dengan kata lain kontribusi kompetensi auditor internal, independensi organisasi audit internal, hubungan antara auditor internal dan eksternal, dukungan manajemen dan efektivitas audit internal secara keseluruhan terhadap korupsi sebesar 76.3%, sedangkan sisanya sebesar 23.7% merupakan kontribusi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5.5.2.2. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk menguji ada tidaknya pengaruh kompetensi auditor internal internal, independensi organisasi audit internal, hubungan antara auditor internal dan eksternal, dan dukungan manajemen terhadap efektivitas audit internal serta pengaruh efektivitas audit internal terhadap korupsi. Dalam penelitian ini ada lima hipotesis yang akan diuji. Hipotesis satu sampai dengan lima merupakan hipotesis dua arah (*two-tailed*). Pengujian signifikansi dapat diketahui melalui *t-statistics*. Kriteria pengujian menyebutkan bahwa apabila *t-statistics* > t-tabel (1.96) maka dinyatakan terdapat

pengaruh signifikan variabel eksogen terhadap variabel endogen dan sebaliknya jika nilai $t\text{-statistics} < t\text{-tabel}$ (1.96) maka dinyatakan tidak terdapat pengaruh signifikan variabel eksogen terhadap variabel endogen. Hasil analisis dapat diketahui melalui ringkasan pada Tabel 5.26.

Tabel 5.26
Direct Coefficient Model Struktural

Eksogen	Endogen	Direct Coefficient	Standard Error	T Statistics	Keterangan
KO	EAI	0.217	0.045	4.796	Signifikan
IN	EAI	0.170	0.053	3.228	Signifikan
HA	EAI	0.520	0.041	12.718	Signifikan
DM	EAI	0.203	0.051	4.010	Signifikan
EAI	KOR	-0.557	0.046	12.212	Signifikan

Sumber: Data diolah, 2017 (Lampiran 5)

Keterangan :

- KO : Kompetensi Auditor Internal
- IO : Independensi Organisasi Audit Internal
- HA : Hubungan Antara Auditor Internal dan Eksternal
- DM : Dukungan Manajemen
- EAI : Efektivitas Audit Internal
- KOR : Korupsi

Berdasarkan Tabel 5.26 dapat dijelaskan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

- Hipotesis 1 menyatakan bahwa kompetensi auditor internal berpengaruh terhadap efektivitas audit internal. Hasil perhitungan *software SmartPLS 2.0* menghasilkan $t\text{-statistics}$ sebesar 4.796. Hal ini menunjukkan bahwa $t\text{-statistics} > t\text{-tabel}$ (1.96). Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh kompetensi auditor internal terhadap efektivitas audit internal.
- Hipotesis 2 menyatakan bahwa independensi organisasi audit internal berpengaruh terhadap efektivitas audit internal. Hasil perhitungan menghasilkan $t\text{-statistics}$ sebesar 3.228. Hal ini menunjukkan bahwa $t\text{-statistics} > t\text{-tabel}$ (1.96). Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa terdapat

pengaruh independensi organisasi audit internal terhadap efektivitas audit internal.

3. Hipotesis 3 menyatakan bahwa hubungan antara auditor internal dan eksternal berpengaruh terhadap efektivitas audit internal. Hasil perhitungan menghasilkan *t-statistics* sebesar 12.718. Hal ini menunjukkan bahwa *t-statistics* > *t*-tabel (1.96). Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh hubungan antara auditor internal dan eksternal terhadap efektivitas audit internal.
4. Hipotesis 4 menyatakan bahwa dukungan manajemen berpengaruh terhadap efektivitas audit internal. Hasil perhitungan menghasilkan *t-statistics* sebesar 4.010. Hal ini menunjukkan bahwa *t-statistics* > *t*-tabel (1.96). Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh dukungan manajemen terhadap efektivitas audit internal.
5. Hipotesis 5 menyatakan bahwa efektivitas audit internal berpengaruh terhadap korupsi. Hasil perhitungan menghasilkan *t-statistics* sebesar 12.212. Hal ini menunjukkan bahwa *t-statistics* > *t*-tabel (1.96). Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh efektivitas audit internal terhadap korupsi.

5.5.3. Konversi Diagram Jalur ke dalam Model Struktural

Konversi diagram jalur ke dalam model struktural dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Berdasarkan tabel 5.26 dapat disusun persamaan struktural sebagai berikut:

$$EAI = 0.217KO + 0.170 IN + 0.520 HA + 0.203 DM$$

$$KOR = -0.557 EAI$$

Dari persamaan di atas dapat diinformasikan bahwa :

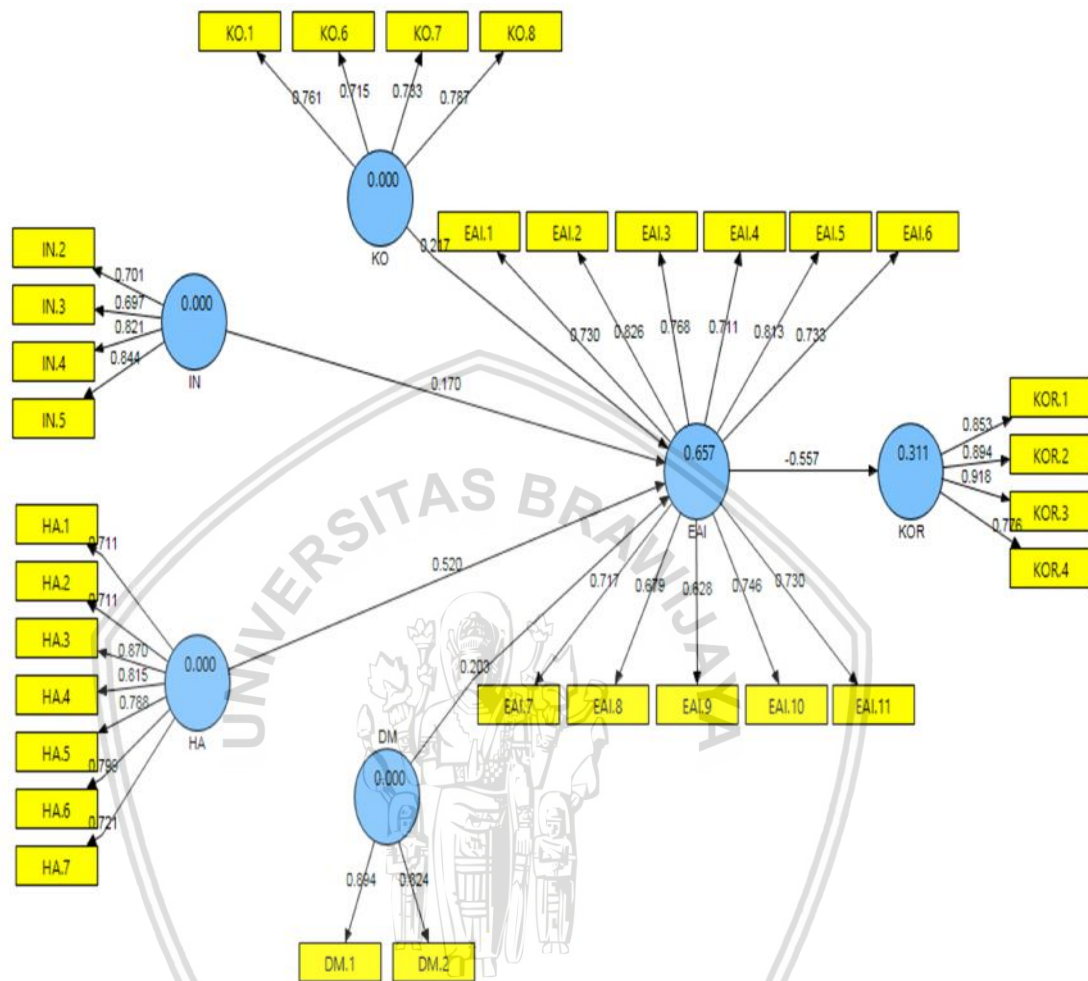
1. Koefisien jalur pengaruh kompetensi auditor internal terhadap efektivitas audit internal sebesar 0.217* menyatakan bahwa kompetensi

auditor internal berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal. Hal ini berarti semakin tinggi kompetensi auditor internal maka cenderung dapat meningkatkan efektivitas audit internal.

2. **Koefisien jalur pengaruh independensi organisasi audit internal terhadap efektivitas audit internal** sebesar 0.170 menyatakan bahwa independensi organisasi audit internal berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal. Hal ini berarti semakin tinggi independensi organisasi audit internal maka cenderung dapat meningkatkan efektivitas audit internal.
3. **Koefisien jalur pengaruh hubungan antara auditor internal dan eksternal terhadap efektivitas audit internal** sebesar 0.520* menyatakan bahwa hubungan antara auditor internal dan eksternal berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal. Hal ini berarti semakin baik hubungan antara auditor internal dan eksternal maka cenderung dapat meningkatkan efektivitas audit internal.
4. **Koefisien jalur pengaruh dukungan manajemen terhadap efektivitas audit internal** sebesar 0.203* menyatakan bahwa dukungan manajemen berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal. Hal ini berarti semakin tinggi dukungan manajemen maka cenderung dapat meningkatkan efektivitas audit internal.
5. **Koefisien jalur pengaruh efektivitas audit internal terhadap korupsi** sebesar -0.557* menyatakan bahwa efektivitas audit internal berpengaruh negatif terhadap korupsi. Hal ini berarti semakin tinggi efektivitas audit internal maka cenderung dapat menurunkan korupsi.

Model struktural penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 5.1.

Gambar 5.1
Model Struktural



5.5.4. Pengaruh Dominan

Variabel eksogen yang memiliki pengaruh dominan terhadap variabel endogen dapat diketahui melalui total efek yang paling besar. Hasil analisis menginformasikan variabel yang memiliki total efek paling besar terhadap efektivitas audit internal adalah hubungan antara auditor internal dan eksternal dengan total efek sebesar 0.520. Dengan demikian hubungan antara auditor internal dan eksternal merupakan variabel yang paling berpengaruh atau memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap efektivitas audit internal.

5.5.5. Pembahasan

5.5.5.1. Pengaruh Kompetensi Auditor Internal Terhadap Efektivitas Audit Internal

Hasil pengujian memperoleh bukti empiris bahwa kompetensi auditor internal berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal. Hal ini berarti semakin tinggi kompetensi auditor internal maka cenderung dapat meningkatkan efektivitas audit internal. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad, *et al.* (2009), Alzeban dan Gwilliam (2014) dan Baharuddin, *et al.* (2014) yang menunjukkan bahwa kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal. Peran auditor Itjen yang efektif dapat terwujud karena didukung oleh auditor yang kompeten. Elliot, *et al.* (2007) yang mensitir hasil penelitian Beckmerhargen, *et al.* (2004) menyatakan pula bahwa audit yang efektif dilakukan oleh auditor internal yang kompeten.

Penelitian ini mendukung teori peran yang menyatakan bahwa individu yang menduduki sebuah posisi dalam organisasi akan berperilaku yang sesuai dengan perannya. Auditor internal harus memiliki kompetensi terkait bidang yang mencakup operasional auditi, sehingga dapat memberikan penilaian yang obyektif pada auditi. Hasil penelitian ini juga mengkonfirmasi aplikasi teori kontinjensi yang menyatakan bahwa struktur suatu organisasi tergantung pada faktor-faktor kontekstual (Drazin, *et al.*, 1985). Itjen dapat melaksanakan penugasan audit internal yang efektif karena didukung oleh kompetensi auditor internal. Oleh karena itu, kompetensi auditor internal yang diukur melalui pendidikan, pengalaman audit, pelatihan atau training yang diikuti, auditor bersertifikat, jumlah auditor bersertifikat, penguasaan auditor pada teknologi modern, audit dan *monitoring* tepat waktu, serta audit dan monitoring sesuai lingkup penugasan yang direncanakan adalah faktor penting untuk mencapai efektivitas audit internal Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Semakin

tinggi kompetensi auditor internal maka semakin tinggi pula efektivitas audit internal.

Hasil analisis menginformasikan bahwa audit dan monitoring sesuai lingkup penugasan yang direncanakan paling mencerminkan kompetensi auditor internal. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Al-Twaijry, *et al.* (2003) yang menyatakan bahwa kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh auditor internal pada gilirannya akan memengaruhi kemampuan auditor dalam melakukan audit dan akan membatasi lingkup tugas yang dilakukan secara internal. Hal ini berarti bahwa auditor Itjen Kemenag memiliki kompetensi untuk melakukan audit dan monitoring setiap aktivitas mencakup lingkup penugasan yang direncanakan.

Inspektorat Jenderal Kemenag memaparkan tentang permasalahan jumlah auditor yang kurang dan tidak sebanding dengan auditi yang menjadi beban tugas pengawasan (Renstra Itjen Kemenag 2015-2019:15). Menurut Ahmad, *et al.* (2009), kekurangan staf auditor menjadi salah satu problem utama dari fungsi audit internal sektor publik. Sementara itu, Ramachandran, *et al.* (2012) mengungkapkan bahwa persentase jumlah auditor internal atas keseluruhan jumlah auditi akan menentukan efektivitas audit internal pada bank komersial di Tanzania. Oleh karena itu, jumlah auditor Itjen Kemenag harus ditambah agar sesuai dengan ruang lingkup penugasan audit internal di Kemenag, sehingga fungsi pengawasan internal dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini sesuai dengan harapan responden yang tercermin dari hasil analisis deskriptif bahwa jumlah auditor sesuai dengan ruang lingkup penugasan audit di Kemenag.

5.5.5.2. Pengaruh Independensi Organisasi Audit Internal Terhadap Efektivitas Audit Internal

Hasil pengujian menyatakan bahwa independensi organisasi audit internal berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal. Hal ini berarti semakin tinggi independensi organisasi audit internal maka cenderung dapat meningkatkan efektivitas audit internal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Al-Twajry, *et al.* (2003), Mihret, *et al.* (2010), Cohen dan Sayag (2010), Alzeban dan Gwilliam (2014), serta Baharud-din, *et al.* (2014) yang menunjukkan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal. Hasil berbeda ditunjukkan oleh Sari (2014) yang menemukan bahwa Independensi inspektorat sangat dipengaruhi oleh dukungan pimpinan daerah. Jika pimpinan kurang bekerja sama atau tidak memahami keberadaan inspektorat, maka fungsi audit internal tidak dapat independen dan berakibat kerja inspektorat tidak efektif.

Hasil penelitian ini memperkuat teori kontinjensi yang menyatakan bahwa diperlukan penyesuaian yang merupakan proses adaptasi yang menjamin bahwa hanya organisasi terbaik yang akan bertahan. Independensi dari organisasi audit internal merupakan aspek yang menentukan baik tidaknya efektivitas audit internal. Kondisi ini tidak mudah karena organisasi audit internal pada dasarnya adalah bagian dari organisasi yang diperiksa (Mihret, *et al.* 2010). Kedudukan Itjen Kemenag secara struktural berada sejajar dengan eselon satu lainnya di bawah Menteri Agama. Persetujuan anggaran masih bergantung pada manajemen dan pengangkatan/pemberhentian Inspektur oleh Menteri Agama. Fenomena ini dikritik oleh Schyf (2000) yang menyatakan bahwa organisasi audit internal agar memiliki garis pelaporan yang tidak tergantung pada manajemen (Asiedu dan Deffor, 2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi Itjen Kemenag mampu ditegakkan untuk meningkatkan efektivitas audit internal.

Hasil penelitian menemukan bahwa auditor mempunyai akses tidak terbatas pada seluruh unit kerja dan para pegawai unit kerja di lingkungan kementerian/lembaga paling mencerminkan independensi organisasi audit internal. Hal ini berarti bahwa auditor Itjen dapat melakukan penugasan audit tanpa ada intervensi atau gangguan dari auditan (Cohen dan Sayag, 2010). Menurut Al-Twaijry, *et al.* (2003) salah satu aspek penting independensi yang berpengaruh pada efektivitas audit internal adalah kemudahan akses terhadap data yang merupakan kekuatan penugasan audit yang tidak terbatas. Hal ini memungkinkan auditor inspektorat dapat merencanakan, melaksanakan program audit, dan melaporkan hasil audit secara leluasa tanpa adanya intervensi dan tekanan dari pihak luar. Terbentuknya lingkungan organisasi yang mendukung adanya independensi tersebut tidak lepas dari dukungan yang diberikan oleh manajemen (Cohen dan Sayag, 2010; Alzeban dan Gwilliam, 2014; Baharud-din, *et al.*, 2014) yaitu dukungan dari pimpinan Kemenag.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan rata-rata terendah persepsi responden terhadap independensi organisasi audit internal adalah sebesar 5.18 yang berarti bahwa sebagian besar responden menyatakan agak setuju bahwa konflik kepentingan dalam penugasan audit tidak terjadi. Hasil ini menggambarkan bahwa konflik kepentingan masih ada dalam penugasan audit, dan seharusnya auditor Itjen dapat menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaan audit. Menurut Alzeban dan Gwilliam (2014) auditor internal dapat bersikap netral dan tidak bias untuk menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penugasan yang dilakukannya.

5.5.5.3. Pengaruh Hubungan Antara Auditor Internal Dan Eksternal Terhadap Efektivitas Audit Internal

Hasil pengujian memperoleh bukti empiris bahwa hubungan antara auditor internal dan eksternal berpengaruh positif terhadap efektivitas audit

internal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik hubungan antara auditor internal dan eksternal maka cenderung dapat meningkatkan efektivitas audit internal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alzeban dan Gwilliam (2014) dan Asiedu dan Deffor (2017) yang menunjukkan bahwa hubungan antara auditor internal dan eksternal berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal.

Penelitian ini mendukung teori peran yang menyatakan bahwa individu harus dapat menyesuaikan perannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab secara profesional. Auditor Itjen antara lain dapat menjalin hubungan dengan auditor eksternal untuk mendukung kegiatan audit intern yang efektif dan memastikan bahwa kegiatan audit intern dapat memberikan nilai tambah bagi auditi. Hasil penelitian juga mengkonfirmasi aplikasi teori kontinjensi yang menekankan pentingnya kontinjensi eksternal untuk mencapai tujuan organisasi. Hubungan antara auditor internal dan eksternal menjadi salah satu faktor yang menentukan efektivitas audit internal.

Hasil analisis menginformasikan bahwa hubungan antara auditor internal dan eksternal memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap efektivitas audit internal dengan total efek sebesar 0.520. Dengan demikian hubungan antara auditor internal dan eksternal memiliki peran yang penting untuk meningkatkan efektivitas audit internal Itjen Kemenag. Hasil penelitian ini senada dengan hasil penelitian Alzeban dan Gwilliam (2014) yang mengungkapkan bahwa kerjasama antara auditor internal dan eksternal yang tepat akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas audit dan membantu manajemen memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Hasil pengujian menginformasikan juga bahwa indikator memberi kesempatan inspektorat menjelaskan kepentingannya paling mencerminkan hubungan antara auditor internal dan eksternal. Kondisi ini merefleksikan bahwa

telah terjalin hubungan yang baik antara auditor eksternal dan internal terkait audit di Kemenag. Auditor Itjen Kemenag melakukan koordinasi dengan auditor eksternal untuk menyampaikan rencana kegiatan audit intern tahunan serta hasil-hasil kegiatan audit intern yang telah dilakukan auditor Itjen selama periode yang akan dilakukan pemeriksaan oleh auditor eksternal. Dengan menyampaikan hasil-hasil kegiatan audit intern Itjen, auditor eksternal diharapkan akan menggunakan hasil tersebut untuk mengurangi lingkup penugasannya.

5.5.5.4. Pengaruh Dukungan Manajemen Terhadap Efektivitas Audit Internal

Hasil pengujian memperoleh bukti empiris bahwa dukungan manajemen berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dukungan manajemen maka cenderung dapat meningkatkan efektivitas audit internal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Cohen dan Sayag (2010), Alzeban dan Gwilliam (2014), dan Baharud-din, *et al.* (2014) yang menemukan bahwa dukungan manajemen berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal. Hasil berbeda disampaikan oleh Baheri (2016) yang melakukan penelitian efektivitas audit internal di Perguruan Tinggi Negeri.

Hasilnya menunjukkan bahwa lemahnya komitmen pimpinan perguruan tinggi terhadap penguatan unit audit internal dan respon pimpinan terhadap temuan dan rekomendasi menjadi penyebab pengaruh dukungan manajemen tidak signifikan terhadap efektivitas audit internal. Penelitian Gamar dan Djamhuri (2015) menemukan bahwa kurangnya komitmen dan pemahaman pimpinan eksekutif tertinggi mengenai arti pentingnya pengawasan menyebabkan fungsi auditor internal tidak maksimal di daerah. Hasil penelitian ini memberikan dukungan pada teori kontinjensi yang menekankan pentingnya kontinjensi

internal selain kontinjensi eksternal dalam memahami perilaku organisasi untuk bertahan atau menjadi efektif. Hasil penelitian menemukan bahwa dukungan dari pihak yang memiliki kewenangan merupakan faktor penentu efektif tidaknya suatu audit internal.

Hasil analisis mengemukakan bahwa indikator keterlibatan pada rencana audit paling mencerminkan dukungan manajemen. Inspektur Jenderal mengkomunikasikan dan meminta persetujuan rencana kegiatan audit intern tahunan kepada pimpinan Kemenag. Hal ini merupakan langkah awal dalam pemberian dukungan pimpinan Kemenag kepada Inspektorat Jenderal. Pimpinan Kemenag memberikan persetujuan rencana audit intern tahunan, dilanjutkan dengan pemberian dukungan berupa sumber daya dan anggaran yang cukup kepada Itjen untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Hasil penelitian ini didukung oleh Cohen dan Sayag (2010), Alzeban dan Gwilliam (2014), dan Baharud-din, *et al.* (2014) yang menyatakan bahwa audit internal tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dari manajemen, baik dalam wujud anggaran yang cukup serta sarana prasarana yang memadai.

Bentuk dukungan pimpinan Kemenag lainnya adalah memberikan tanggapan atas laporan audit internal. Pimpinan Kemenag memberikan sinyal kepada seluruh jajaran Kemenag tentang pentingnya peran dan fungsi audit internal, salah satunya dengan cara menindaklanjuti temuan dan rekomendasi hasil audit internal. Data Itjen tahun 2016 menunjukkan bahwa masih ada 340 (tiga ratus empat puluh) temuan berupa pelanggaran dan penyimpangan yang memerlukan rekomendasi tindak lanjut terjadi di tingkat satuan kerja nasional. Jumlah temuan tersebut relatif kecil jika dibandingkan dengan jumlah satuan kerja Kemenag di seluruh Indonesia yang mencapai lebih dari 4000 satuan kerja. Namun demikian, temuan dan rekomendasi audit yang kurang atau tidak ditindaklanjuti oleh auditi akan mengurangi kredibilitas audit internal yang telah

dilakukan (Mihret dan Yisway, 2007). Penelitian Mahmudah (2014) menemukan bahwa implementasi rekomendasi Inspektorat Daerah oleh auditi merupakan salah satu penguatan untuk fungsi audit internal dan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan program OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Hal ini berarti bahwa menindaklanjuti temuan dan rekomendasi audit akan meningkatkan kredibilitas dan fungsi audit internal Itjen Kemenag.

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini dukungan manajemen bukan merupakan faktor yang dominan dalam memengaruhi efektivitas audit internal. Beberapa penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Cohen dan Sayag (2010), Alzeban dan Gwilliam (2014), dan Baharud-din, *et al.* (2014) mengungkapkan bahwa dukungan manajemen menjadi faktor yang dominan dalam memengaruhi efektivitas audit internal. Menurut Ahmad, *et al.* (2009) kurangnya dukungan manajemen menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi oleh fungsi audit internal di sektor publik Malaysia. Oleh karena itu, dukungan manajemen berupa keterlibatan dalam rencana audit internal, tanggapan manajemen atas laporan audit internal, sumber daya dan anggaran yang cukup perlu ditingkatkan.

5.5.5.5. Pengaruh Efektivitas Audit Internal Terhadap Korupsi

Hasil pengujian memperoleh bukti empiris bahwa efektivitas audit internal berpengaruh negatif terhadap korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi efektivitas audit internal maka cenderung dapat menurunkan korupsi. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Salameh, *et al.* (2011) dan Asiedu dan Deffor (2017) yang menunjukkan bahwa efektivitas audit internal berpengaruh negatif terhadap korupsi.

Penelitian ini mendukung teori agensi yang menjelaskan bahwa agen mendapat mandat dari prinsipal untuk melaksanakan kegiatan atas nama

prinsipal. Masyarakat (prinsipal) menginginkan adanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Pemerintah (agen) menunjukkan kepada masyarakat (prinsipal) memiliki komitmen yang sama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui fungsi audit internal yang efektif. Kementerian Agama sebagai salah satu organisasi pemerintah, harus mulai membangun dan menerapkan tata kelola yang baik. Untuk mencapai tata kelola yang baik dengan lingkungan yang bersih dari korupsi di Kemenag, diperlukan komitmen yang lebih kuat dalam mengelola resiko korupsi agar kerugian akibat korupsi dapat dihindari. Menurut Coram, *et al.* (2008) salah satu bagian penting dari *good governance* adalah fungsi audit internal.

Inspektorat Jenderal (Itjen) mempunyai tugas dan fungsi pengawasan internal pada seluruh satuan kerja di bawah koordinasi Kementerian Agama (Kemenag). Peran ini sangat strategis karena menjadi salah satu bagian penting dari *good governance*. Tuntutan peran yang diharapkan pada Itjen Kemenag dapat dilakukan melalui fungsi audit/pengawasan internal yang efektif. Hasil penelitian mengkonfirmasi bahwa efektivitas audit internal Itjen dapat menurunkan tingkat benturan kepentingan dan perbuatan curang dalam pengadaan barang dan jasa, serta dapat menurunkan gratifikasi. Hal ini menegaskan peran penting Itjen dalam rangka mencegah terjadinya korupsi di Kementerian Agama. Namun demikian penelitian ini tidak memberikan obat mujarab untuk mengurangi korupsi di Kementerian Agama. Hasil analisis menunjukkan *R-square* variabel korupsi bernilai 0.311 atau 31.1% yang berarti bahwa kontribusi efektivitas audit internal terhadap korupsi sebesar 31.1%, sedangkan sisanya sebesar 68.9% merupakan kontribusi variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini

Hasil analisis menginformasikan bahwa indikator meningkatkan kinerja kementerian paling mencerminkan efektivitas audit internal. Efektivitas audit

internal terletak pada kemampuan auditor Itjen dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan atau ditetapkan sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi. Tujuan yang ingin dicapai adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan di Kemenag yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Hasil penelitian ini didukung oleh Eden dan Moriah (1996) yang menemukan pengaruh peningkatan kinerja cabang bank di mana audit internal dilakukan dibandingkan dengan cabang bank yang tidak dilakukan audit internal.



BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh kompetensi auditor internal (KO), independensi organisasi audit internal (IN), hubungan antara auditor internal dan eksternal (HA), dan dukungan manajemen (DM) terhadap efektivitas audit internal (EAI) serta pengaruh efektivitas audit internal terhadap korupsi (KOR) di Itjen Kementerian Agama RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi auditor internal, independensi organisasi audit internal, hubungan antara auditor internal dan eksternal, dan dukungan manajemen memberikan pengaruh positif terhadap efektivitas audit internal. Hasil ini menunjukkan semakin tinggi kompetensi auditor internal, independensi organisasi audit internal, hubungan antara auditor internal dan eksternal, dan dukungan manajemen maka cenderung dapat meningkatkan efektivitas audit internal.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas audit internal berpengaruh negatif terhadap korupsi. Hal ini berarti semakin tinggi efektivitas audit internal cenderung dapat menurunkan korupsi. Peningkatan kompetensi auditor internal, independensi organisasi audit internal, hubungan antara auditor internal dan eksternal, serta dukungan manajemen yang dapat memengaruhi efektivitas audit internal maka secara tidak langsung cenderung dapat menurunkan korupsi.

6.2. Implikasi Penelitian

Hasil penelitian yang didasarkan pada kajian teori dan didukung dengan bukti empiris memiliki tiga implikasi, yaitu: implikasi teoretis, implikasi praktis dan implikasi kebijakan.

6.2.1. Implikasi Teoretis

Hasil penelitian memberikan dukungan pada temuannya yang terkait dengan teori agensi dan kontinjensi. Hal ini terlihat dari hasil pengujian yang membuktikan bahwa efektivitas audit internal berpengaruh negatif terhadap korupsi. Hal ini berarti bahwa meningkatnya efektivitas audit internal cenderung dapat menurunkan korupsi. Upaya yang dilakukan untuk mencapai efektivitas audit internal Itjen Kemenag adalah merencanakan audit dengan baik; meningkatkan produktivitas organisasi; menjamin konsistensi antara hasil dengan tujuan dan sasaran audit yang ditetapkan; memastikan audit mengimplementasikan rekomendasi audit; mengevaluasi dan meningkatkan manajemen risiko; mengevaluasi sistem pengendalian intern serta memberikan rekomendasi perbaikan. Upaya tersebut diiringi dengan meningkatkan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas audit internal Itjen Kemenag.

Hasil penelitian mengkonfirmasi teori kontinjensi yang mempunyai implikasi pada penelitian ini bahwa efektivitas audit internal akan terwujud jika didukung oleh faktor-faktor yang memengaruhinya. Dalam penelitian ini efektivitas audit internal mampu dijelaskan oleh kompetensi auditor internal, independensi organisasi audit internal, hubungan antara auditor internal dan eksternal, serta dukungan manajemen. Hal ini berarti bahwa meningkatnya faktor-faktor tersebut cenderung dapat menurunkan korupsi melalui efektivitas audit internal di Kemenag. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa auditor Itjen telah berperan sesuai posisinya melaksanakan penilaian yang obyektif untuk peningkatan operasi organisasi Kemenag.

6.2.2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian memberikan implikasi praktis pada Kemenag, yakni bukti empiris bahwa untuk mencegah atau menurunkan korupsi perlu ditingkatkan

efektivitas audit internal Itjen. Fungsi pengawasan/audit internal yang efektif terbukti dapat meningkatkan kinerja Kemenag. Bukti empiris lainnya menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas audit internal Itjen Kemenag perlu ditingkatkan kompetensi auditor Itjen, independensi Itjen, hubungan antara auditor Itjen dan eksternal, dan dukungan pimpinan Kemenag.

Kompetensi auditor Itjen akan meningkat bila pendidikan, pengalaman audit, jumlah auditor bersertifikat dan diklat yang diikuti auditor ditingkatkan. Untuk meningkatkan kompetensi auditor Itjen perlu adanya dukungan pimpinan Kemenag berupa sumber daya, anggaran, sarana dan prasarana yang cukup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi Itjen memiliki pengaruh yang paling kecil terhadap efektivitas audit internal. Menurut Al-Twaijry, *et al.* (2003) fungsi audit internal tidak akan berkembang dengan baik apabila memiliki keterbatasan pada independensi organisasi audit internal. Pimpinan Kemenag perlu memberikan ruang seluas-luasnya kepada Itjen untuk memiliki akses langsung dengan pimpinan Kemenag dan jajarannya. Selain itu, pimpinan Kemenag juga harus menjamin auditor Itjen mempunyai akses pada seluruh unit kerja dan pegawai di lingkungan Kemenag. Dukungan pimpinan Kemenag lainnya diperlukan untuk meningkatkan hubungan antara auditor Itjen dan auditor eksternal. Semua upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas audit internal Itjen dan mencegah atau mengurangi korupsi di Kemenag.

Implikasi praktis bagi Itjen Kemenag adalah supaya dapat memanfaatkan sumber daya, anggaran, sarana dan prasarana yang ada untuk meningkatkan kompetensi auditor internal, independensi dan menjaga hubungan baik dengan auditor eksternal. Peningkatan kompetensi auditor Itjen perlu diiringi dengan sistem penggajian yang proporsional untuk mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh auditor Itjen pada saat penugasan audit. Menurut Brierley, *et al.* (2001) menuntut kompetensi auditor internal saja tidak cukup jika tidak diiringi

dengan sistem penggajian yang proporsional/remunerasi. Salah satu penyebab kegagalan audit internal di Sudan adalah karena rendahnya tingkat gaji auditor internal. Hal lainnya adalah meminimalisasi konflik kepentingan dalam penugasan audit sehingga auditor Itjen dapat melaksanakan tugasnya secara independen dan obyektif.

Implikasi praktis bagi APIP adalah selalu memotivasi diri untuk meningkatkan kompetensi, menjaga independensi dan hubungan baik dengan auditor eksternal. Auditor Itjen dapat memanfaatkan kesempatan untuk meraih pendidikan/pengetahuan yang lebih tinggi, mengikuti diklat kompetensi auditor dan memiliki sikap yang netral dan tidak bias serta menghindari konflik dalam penugasan audit. Semua usaha tersebut dilakukan untuk menunjang tugas dan tanggung jawab auditor Itjen menghadapi tuntutan peran saat ini, salah satunya adalah berperan dalam mencegah atau mengurangi terjadinya praktik korupsi di Kemenag. Hal ini sejalan dengan peran strategis APIP dalam melakukan pengawasan seperti yang diamanatkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 17-20 yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh APIP.

6.2.3. Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian diharapkan dapat memperkuat kebijakan terkait pemberantasan praktik korupsi melalui pencegahan, yaitu dengan memperkuat fungsi lembaga pengawasan internal yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Penelitian ini membuktikan bahwa untuk mencegah atau menurunkan korupsi perlu meningkatkan efektivitas audit internal. Hal ini berarti bahwa fungsi audit internal yang efektif yang dilakukan oleh organisasi audit internal dapat membantu dalam mencegah atau mengurangi terjadinya korupsi di instansi pemerintah dengan meningkatkan kompetensi auditor internal,

independensi, hubungan dengan auditor eksternal dan mendapatkan dukungan dari pimpinan instansi.

6.3. Keterbatasan dan Saran Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas dari adanya keterbatasan yang perlu dipertimbangkan oleh peneliti berikutnya. Keterbatasan pada penelitian ini adalah peneliti kesulitan dalam memperoleh data secara cepat dan tepat yang diakibatkan kesibukan responden dan lokasi penugasan audit yang tersebar diberbagai unit kerja sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dalam pengumpulan kuesioner. Peneliti selanjutnya agar dapat mengantisipasi lamanya waktu pengumpulan kuesioner dengan melakukan pendekatan kepada pejabat terkait yang dapat membantu mempercepat pengumpulan kuesioner secara lengkap dan tepat waktu dari responden.

Penelitian berikutnya dapat menguji pengaruh *indirect* kompetensi auditor internal, independensi organisasi audit internal, hubungan antara auditor internal dan eksternal, dan dukungan manajemen terhadap korupsi melalui efektivitas audit internal. Hal ini karena hasil pengujian menemukan pengaruh signifikan kompetensi auditor internal, independensi organisasi audit internal, hubungan antara auditor internal dan eksternal, dan dukungan manajemen terhadap efektivitas audit internal dan pengaruh signifikan efektivitas audit internal terhadap korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- AAIPI. 2014a. Keputusan Nomor: KEP-005/AAIPI/DPN/2014 Tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia.
- AAIPI. 2014b. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.
- Abdillah, W., & Hartono, J. 2015. *Partial Least Square (PLS): Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Adams, M. B. 1994. Agency Theory and the Internal Audit. *Managerial Auditing Journal*, **9** (8), 8-12. doi: 10.1108/02686909410071133
- Adetoso, J., Oladejo, K., & Akeseinro, A. 2013. Effectiveness of internal auditor in controlling fraud and other financial irregularities in private universities in South-West, Nigeria. *Research Journal of Finance and Accounting*, **4** (13), 106-110.
- Ahmad, N., Othman, R., Othman, R., & Jusoff, K. 2009. The effectiveness of internal audit in Malaysian public sector. *Journal of Modern Accounting and Auditing*, **5** (9), 53.
- Ahmad, Z., & Taylor, D. 2009. Commitment to independence by internal auditors: the effects of role ambiguity and role conflict. *Managerial Auditing Journal*, **24** (9), 899-925.
- Al-Twaijry, A. A., Brierley, J. A., & Gwilliam, D. R. 2003. The development of internal audit in Saudi Arabia: an institutional theory perspective. *Critical Perspectives on Accounting*, **14** (5), 507-531.
- Alfan, R. 2015. Fraud dan Pencegahannya di Sektor Publik. *Tesis Tidak di Publikasikan*, Universitas Brawijaya, Malang.
- Alzeban, A., & Gwilliam, D. 2014. Factors affecting the internal audit effectiveness: A survey of the Saudi public sector. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, **23** (2), 74-86. doi: <http://dx.doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2014.06.001>
- Anto, A. T. 2016. Determinan Efektivitas Audit Internal Pemerintah di Indonesia.
- Arena, M., & Azzone, G. 2009a. Identifying organizational drivers of internal audit effectiveness. *International Journal of Auditing*, **13** (1), 43-60.
- Arena, M., & Azzone, G. 2009b. Internal Audit effectiveness: relevant drivers of auditees' satisfaction. *International Journal of Auditing*, **13** (1), 43-60.
- Argandona, A. 2001. Corruption: the corporate perspective. *Business Ethics: A European Review*, **10** (2), 163-175.

- Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu. *Pendekatan Praktek*.
- Asiedu, K. F., & Deffor, E. W. 2017. Fighting Corruption by Means of Effective Internal Audit Function: Evidence from the Ghanaian Public Sector. *International Journal of Auditing*.
- Badara, M., & Saidin, S. Z. 2014. Empirical evidence of antecedents of internal audit effectiveness from Nigerian perspective. *Middle-East Journal of Scientific Research*, **19** (4), 460-469.
- Baharud-din, Z., Shokiyah, A., & Ibrahim, M. S. 2014. Factors that contribute to the effectiveness of internal audit in public sector. *International Proceedings of Economics Development and Research*, **70**, 126.
- Baheri, J. 2016. Analisis Determinan Efektivitas Internal Audit Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Kota Malang. *Tesis Tidak Dipublikasikan*, Universitas Brawijaya, Malang.
- Brierley, J. A., El-Nafabi, H. M., & Gwilliam, D. R. 2001. The problems of establishing internal audit in the Sudanese public sector. *International Journal of Auditing*, **5** (1), 73-87.
- Chetwynd, E., Chetwynd, F., & Spector, B. 2003. Corruption and poverty: a review of recent literature. *Management Systems International*, **600**, 5-16.
- Cohen, A., & Sayag, G. 2010. The effectiveness of internal auditing: an empirical examination of its determinants in Israeli organisations. *Australian Accounting Review*, **20** (3), 296-307.
- Coram, P., Ferguson, C., & Moroney, R. 2008. Internal audit, alternative internal audit structures and the level of misappropriation of assets fraud. *Accounting & Finance*, **48** (4), 543-559.
- D'Onza, G., Selim, G. M., Melville, R., & Allegrini, M. 2015. A study on internal auditor perceptions of the function ability to add value. *International Journal of Auditing*, **19** (3), 182-194.
- D'Silva, K., & Ridley, J. 2007. Internal auditing's international contribution to governance. *International Journal of Business Governance and Ethics*, **3** (2), 113-126.
- Dittenhofer, M. 2001. Internal auditing effectiveness: an expansion of present methods. *Managerial Auditing Journal*, **16** (8), 443-450.
- Drazin, R., & Van de Ven, A. H. 1985. Alternative forms of fit in contingency theory. *Administrative science quarterly*, 514-539.
- Eden, D., & Moriah, L. 1996. Impact of Internal Auditing on Branch Bank Performance: A Field Experiment. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, **68** (3), 262-271. doi: <http://dx.doi.org/10.1006/obhd.1996.0104>

- Elliott, M., Dawson, R., & Edwards, J. 2007. An improved process model for internal auditing. *Managerial Auditing Journal*, **22** (6), 552-565.
- Firdaus, F. 2016. Suryadharma Ali di Vonis 6 Tahun Penjara. Diunduh dari <https://www.rappler.com/indonesia/118621-vonis-suryadharma-ali-kasus-haji> website:
- Gamar, N., & Djamhuri, A. 2015. Auditor Internal Sebagai “Dokter” Fraud Di Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, **6** (1), 107-123.
- Getie Mihret, D., & Wondim Yismaw, A. 2007. Internal audit effectiveness: an Ethiopian public sector case study. *Managerial Auditing Journal*, **22** (5), 470-484.
- Ghozali, I., & Latan, H. 2014. *Partial Least Squares Konsep, Metode dan Aplikasi Menggunakan Program WarpPLS 4.0*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Ghozali, I., & Latan, H. 2015. *Partial Least Squares, Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program Smartpls 3.0 Untuk Penelitian Empiris*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Gibson, J. L., M., Ivance, & J.H. Donnely, J. 2000. *Organization*. New York: The McGraw-Hill Companies.
- Halbouni, S. S. 2015. The role of auditors in preventing, detecting, and reporting fraud: the case of the United Arab Emirates (UAE). *International Journal of Auditing*, **19** (2), 117-130.
- Hartono, J. 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE.
- International, T. 2017. Corruption Perceptions Index 2016. Diunduh dari http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016 website:
- Irianto, G. 2015. *Spirit Profetik, Akuntan, dan Pencegahan Fraud, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Akuntansi Sektor Publik pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Universitas Brawijaya, Malang, 24 April.
- Itjen, K. A. R. I. 2016. Matrik Temuan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Di Lingkungan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics*, **3** (4), 305-360.
- Kayo, A. S. 2013. *Audit forensik: penggunaan dan kompetensi auditor dalam pemberantasan tindak pidana korupsi*. Graha Ilmu.
- Kementerian Agama, R. I. 2015. *Renstra Kementerian Agama Tahun 2015-2019*. Jakarta: Kementerian Agama RI.

- KPK. 2017. Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi. Diunduh dari <http://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi/tpk-berdasarkan-instansi> website:
- Kuntadi, C. 2015 *SIKENCUR (Sistem Kendali Kecurangan)*. Jakarta: PT. Elek Media Komputindo.
- Labuschagne, H., & Els, G. 2006. Corruption and fraud: any lessons for the auditor? *Meditari: Research Journal of the School of Accounting Sciences*, **14** (1), 29-47.
- Lee, T., & Stone, M. 1995. Competence and independence: the congenial twins of auditing? *Journal of Business Finance & Accounting*, **22** (8), 1169-1177.
- Lenz, R. 2013. Insights into the effectiveness of internal audit: a multi-method and multi-perspective study.
- Lubis, A. I. 2010. *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahmudah, H., & Bambang Riyanto, L. 2014. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Dukungan Manajemen, Dan Audit Professionalism Terhadap Keefektifan Audit Internal Pemerintah Daerah*. Universitas Gadjah Mada.
- Mardiasmo, D., & MBA, A. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mihret, D. G., James, K., & Mula, J. M. 2010. Antecedents and organisational performance implications of internal audit effectiveness: some propositions and research agenda. *Pacific Accounting Review*, **22** (3), 224-252.
- Omar, N., & Bakar, K. M. A. 2012. Fraud prevention mechanisms of Malaysian government-linked companies: An assessment of existence and effectiveness. *Journal of Modern Accounting and Auditing*, **8** (1), 15.
- Othman, R., Aris, N. A., Mardziah, A., Zainan, N., & Amin, N. M. 2015. Fraud Detection and Prevention Methods in the Malaysian Public Sector: Accountants' and Internal Auditors' Perceptions. *Procedia Economics and Finance*, **28**, 59-67.
- Ramachandran, J., Subramanian, R., & Kisoka, I. 2012. Effectiveness of internal audit in Tanzanian commercial banks. *British Journal of Arts and Social Sciences*, **8** (1), 32-44.
- Ristiyo, N. 2013. Menyimak Persamaan dan Perbedaan antara Audit Eksternal dan Internal Pemerintah. Diunduh dari <http://pusdiklatwas.bpkp.go.id> website:
- Rose-Ackerman, S. 1997. The political economy of corruption. *Corruption and the global economy*, **31**, 60.

- Salameh, R., Al-Weshah, G., Al-Nsour, M., & Al-Hiyari, A. 2011. Alternative Internal Audit Structures and Perceived Effectiveness of Internal Audit in Fraud Prevention: Evidence from Jordanian Banking Industry/Les Structures Alternative D'audit Interne Et L'efficacite Percue De L'audit Interne Dans La Prevention Contre La Fraude: Une Preuve Dans L'industrie Bancaire Jordanienne. *Canadian Social Science*, **7** (3), 40.
- Sandholtz, W., & Koetzle, W. 2000. Accounting for corruption: Economic structure, democracy, and trade. *International studies quarterly*, **44** (1), 31-50.
- Santoso, U., & Pambelum, Y. J. 2008. Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. *Jurnal Administrasi Bisnis*, **4** (1).
- SARI, D. F., & Suwardi, E. 2015. *Pengaruh Profesionalisme Auditor Terhadap Keefektifan Audit Internal Dengan Independensi Sebagai Variabel Pemoderasi (Survei Pada Auditor Internal Perguruan Tinggi Di Indonesia)*. Universitas Gadjah Mada.
- Sholihin, M., & Ratmono, D. 2013. *Analisis SEM-PLS Dengan WarpPLS 3.0*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Silalahi, U., & Atif, N. F. 2015. *Metode penelitian sosial kuantitatif*. Refika Aditama.
- Sudjana, N. 2000. *Metode statistika*. Bandung: Tarsito.
- Tuanakotta, T. M. 2010. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif* (2 ed.). Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (2004).
- Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (1999).
- Wahyudi. 2005. Pemberdayaan Peran Audit Internal Dalam Mewujudkan Good Governance. Diunduh dari <http://pusdiklatwas.bkp.go.id> website:
- Widyawati, W. 2017. Analisis Dukungan Manajemen Puncak Sebagai Pemoderasi Pengaruh Profesionalisme Auditor Dan Independensi Audit Terhadap Keefektifan Audit Internal. *Tesis tidak dipublikasikan*, Universitas Brawijaya, Malang.

Lampiran 1

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Peneliti/Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan/ Perbedaan
1	2	3	4	5	6
1.	Fighting Corruption by Means of Effective Internal Audit Function: Evidence from the Ghanaian Public Sector	Kofi Fred Asiedu and Eric Worlanyo Deffor 2017	Variabel Independen : Relation, Law, Size, Variabel Dependen : Efektivitas Audit Internal, Independensi,Kompetensi dan Korupsi	- Efektivitas fungsi audit internal yang berdampak negatif pada korupsi. - Implementasi UU Audit, Hubungan dengan auditor eksternal, ukuran organisasi audit internal, dan independensi organisasi audit secara signifikan memengaruhi efektivitas fungsi audit	Persamaan : Menggunakan variabel korupsi sebagai variabel dependen dan variabel efektivitas sebagai variabel independen Perbedaan: Variabel independen yang digunakan
2.	Analisis Determinan Efektivitas Internal Audit Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Kota Malang	Jusbair Baheri 2016	Variabel Independen : Dukungan Manajemen, Kompetensi,Independensi Variabel Dependen : Efektivitas Audit Internal	- Dukungan manajemen dan independensi auditor berpengaruh tidak signifikan terhadap efektivitas audit internal, sedangkan kompetensi auditor berpengaruh signifikan terhadap efektivitas audit internal	Persamaan : Menggunakan variabel independen: dukungan manajemen, kompetensi, independensi Perbedaan: - Penambahan variabel independen hubungan antara auditor internal dan eksternal - Penambahan variabel dependen Korupsi pada penelitian yang akan

No	Judul Penelitian	Peneliti/Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan/ Perbedaan
1	2	3	4	5	6
					dilakukan diukur dengan - variabel independen efektivitas audit internal. Perbedaan penelitian ini berlaku juga untuk penelitian-penelitian di bawah ini.
3.	Factors Affecting The Internal Audit Effectiveness: A Survei Of The Saudi Public Sector	Abdulaziz Alzeban David Gwilliam 2014	Variabel Independen : Dukungan Manajemen, Ukuran Organisasi Audit Internal, Hubungan Antara Auditor Internal dan Eksternal Kompetensi, Independensi Variabel Dependen : Efektivitas Audit Internal	Penelitian ini membuktikan Kompetensi, Ukuran Organisasi Audit Internal, Independensi, Hubungan Antara Internal dan Eksternal Audit Dan Dukungan Manajemen Berkontribusi Pada Efektivitas Fungsi Audit Internal pada Organisasi Sektor Publik di Saudi Arabia	Persamaan : Menggunakan variabel independen: dukungan manajemen, kompetensi, independensi Perbedaan: Penambahan variabel independen hubungan antara auditor internal dan eksternal
4.	Factors That Contribute To The Effectiveness Of Internal Audit In Public Sector	Baharuddin et. al 2014	Variabel Independen : Dukungan Manajemen, Kompetensi, Independensi Variabel Dependen : Efektivitas Audit Internal	Ada hubungan yang positif dan signifikan antara kompetensi, independensi dan dukungan manajemen terhadap efektivitas audit internal	Persamaan : Menggunakan variabel independen: dukungan manajemen, kompetensi, independensi Perbedaan: Penambahan variabel independen hubungan antara auditor internal dan eksternal

No	Judul Penelitian	Peneliti/Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan/ Perbedaan
1	2	3	4	5	6
5.	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Dukungan Manajemen, Dan Audit Professionalism Terhadap Keefektifan Audit Internal Pemerintah Daerah	Hadi Mahmudah 2014	Variabel Independen : Dukungan Manajemen, SPI,Audit Professionalism Variabel Dependen : Keefektifan Audit Internal	- Dukungan manajemen berpengaruh positif terhadap keefektifan audit internal	Persamaan : Menggunakan variabel independen: dukungan manajemen Perbedaan: - Penambahan variabel independen hubungan antara auditor internal dan eksternal, kompetensi dan independensi
6.	Effectiveness Of Internal Audit In Tanzanian Commercial Banks	Ramachandran 2012	Variabel Independen : Kompetensi auditor Aktivitas audit internal Interaksi antara auditor internal dengan komite audit Variabel Dependen : Efektivitas Audit Internal	- Kompetensi auditor berpengaruh signifikan pada efektivitas audit internal	Persamaan : Menggunakan variabel independen: kompetensi auditor Perbedaan: - Penambahan variabel independen hubungan antara auditor internal dan eksternal, dukungan manajemen dan independensi
7.	The Effectiveness Of Internal Auditing: An Empirical Examination Of Its Determinants In Israeli Organisations	Cohen dan Sayag 2010	Variabel Independen : Dukungan Manajemen, Profesionalisme, Independensi, Kualitas pekerjaan audit, Karir dan penjenjangan, Jenis	- Dukungan manajemen merupakan faktor yang paling berpengaruh pada efektivitas audit internal. - Organisasi audit internal	Persamaan : Menggunakan variabel independen: dukungan manajemen, independensi

No	Judul Penelitian	Peneliti/Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan/ Perbedaan
1	2	3	4	5	6
			Organisasi Variabel Dependen : Efektivitas Audit Internal (kualitas pemeriksaan, evaluasi auditi, nilai tambah audit internal)	yang independen dan kualitas pekerjaan audit berpengaruh pada kualitas audit dan evaluasi auditi.	Perbedaan: - Penambahan variabel independen kompetensi auditor dan hubungan antara auditor internal dan eksternal
8.	The effectiveness of internal audit in Malaysian public sector	Halimah@Nasibah Ahmad, Radiah Othman, Rohana Othman,Kamaruzaman Jusoff 2009	Variabel Independen : Kualitas internal audit, Dukungan manajemen puncak,Kecukupan sumber daya,Kerjasama dari auditor dan Interaksi dengan komite audit Variabel Dependen : Efektivitas Audit Internal	- Pentingnya kualitas audit internal untuk meningkatkan efektivitas fungsi audit internal dengan menekankan pentingnya kompetensi, objektivitas dan kualitas pekerjaan yang dilakukan pada audit internal - Kurangnya dukungan manajemen puncak akan menyebabkan masalah pada fungsi audit internal di sektor publik malaysia	Persamaan : Menggunakan variabel independen: dukungan manajemen Perbedaan: - Penambahan variabel independen kompetensi auditor, independensi dan hubungan antara auditor internal dan eksternal
9.	Internal Audit Effectiveness: An Ethiopian Public Sector Case Study	Mihret dan Yismaw 2007	Variabel Independen : kualitas audit internal, dukungan manajemen, pengaturan organisasi, atribut auditi dan interaksi antara faktor-faktor	- Temuan dari studi menyoroti bahwa efektivitas audit internal sangat dipengaruhi oleh kualitas audit internal dan dukungan manajemen,	Persamaan : Menggunakan variabel independen: dukungan manajemen Perbedaan: - Penambahan variabel independen kompetensi

No	Judul Penelitian	Peneliti/Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan/ Perbedaan
1	2	3	4	5	6
			Variabel Dependen : Efektivitas Audit Internal		auditor, independensi dan hubungan antara auditor internal dan eksternal



Lampiran 2



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Jl. Mayjen Haryono 165 Malang 65145 Telp. (0341) 561254

Kepada :

Yth. Bapak/Ibu Auditor
Itjen Kemenag RI

Saya adalah Ika Shohihah, mahasiswi Program Magister (S2) Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang yang sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir saya. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris Determinan Efektivitas Audit Internal Dan Pencegahan Korupsi (Studi Empiris Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI)

Dalam rangka mengumpulkan data, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini dengan lengkap. Daftar pertanyaan ini adalah semata-mata untuk kepentingan ilmiah, karena itu saya akan menjamin kerahasiaan informasi yang diberikan.

Saya ucapkan banyak terimakasih atas kerelaan Bapak/Ibu menjadi partisipan dalam penelitian ini. Jika nanti Bapak/Ibu memerlukan hasil penelitian ini, Bapak/ibu dapat menghubungi saya di HP. 0811366079 atau email: shohihah74@gmail.com.

Malang, September 2017

Peneliti

Ika Shohihah

KUESIONER

**DETERMINAN EFEKTIVITAS AUDIT INTERNAL DAN PENCEGAHAN KORUPSI
(STUDI EMPIRIS PADA ITJEN KEMENTERIAN AGAMA RI)**

a. IDENTITAS RESPONDEN

1. Usia : ☐ 21 – 30 ☐ 31 - 40
☐ 41 – 50 ☐ > 50
2. Jenis Kelamin : ☐ Pria ☐ Wanita
3. Pendidikan Terakhir : ☐ S3 ☐ S2 ☐ S1 ☐ D3 ☐ SLTA
4. Latar Belakang Pendidikan: ☐ Akuntansi ☐ Non Akuntansi.....
5. Jabatan Auditor : ☐ Madya ☐ Muda ☐ Pertama ☐ Terampil
6. Masa Kerja : ☐ 5 th ☐ 5-10 th ☐ 10-15 th ☐ 15 th
7. Jam Pelatihan Pertama : ☐ 20 jam ☐ 21-40 jam ☐ 41-80 jam ☐ 80 jm
8. Diklat Kompetensi yang pernah diikuti :
- ☐ Tidak pernah ☐ 1 kali ☐ 2 kali ☐ 3 kali ☐ 4 kali atau lebih

b. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

- Beri tanda “X” (cross/silang) pada jawaban yang Bapak/Ibu pilih
- Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert yaitu:

Sangat Tidak Setuju (STS) diberi bobot	1
Tidak Setuju (TS) diberi bobot	2
Agak Tidak Setuju (ATS) diberi bobot	3
Netral (N) diberi bobot	4
Agak Setuju (AS) diberi bobot	5
Setuju (S) diberi bobot	6
Sangat Setuju (SS) diberi bobot	7

DAFTAR PERTANYAAN KUESIONER PENELITIAN

1. Kompetensi Auditor

Pertanyaan		STS 1	TS 2	ATS 3	N 4	AS 5	S 6	SS 7
(Skala Pengukuran 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Agak Tidak Setuju, 4 = Netral, 5 = Agak Setuju, 6 = Setuju, dan 7 = Sangat Setuju)								
1	Dengan latar belakang pendidikan, Auditor Inspektorat Jenderal mampu melaksanakan tugas sebagai auditor internal dengan baik							
2	Pengalaman kerja yang Auditor Inspektorat Jenderal miliki cukup untuk bertugas sebagai auditor internal							
3	Auditor Inspektorat Jenderal percaya bahwa mengikuti pelatihan/training audit telah meningkatkan kemampuan sebagai auditor internal							
4	Inspektorat Jenderal mempunyai auditor internal yang bersertifikat (sertifikat JFA dan/atau sertifikat lain di bidang Pengawasan Intern Pemerintah)							
5	Kurangnya jumlah auditor Inspektorat Jenderal yang bersertifikat dapat mengurangi ruang lingkup penugasan audit di kementerian/lembaga							
6	Auditor Inspektorat Jenderal dapat menggunakan teknologi modern (menggunakan alat data terkomputerasi dan perangkat lunak audit internal tertentu)							
7	Auditor Inspektorat Jenderal melakukan audit dan monitoring setiap aktivitas tepat waktu.							
8	Auditor Inspektorat Jenderal melakukan audit dan monitoring setiap aktivitas mencakup lingkup penugasan audit/pengawasan yang direncanakan							

2. Independensi Organisasi Audit Internal

Pertanyaan		STS 1	TS 2	ATS 3	N 4	AS 5	S 6	SS 7
(Skala Pengukuran 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Agak Tidak Setuju, 4 = Netral, 5 = Agak Setuju, 6 = Setuju, dan 7 = Sangat Setuju)								
1	Inspektur Jenderal melapor ke Pimpinan kementerian/lembaga sebagai bentuk tanggung jawab atas pengawasan internal yang telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal							
2	Inspektur Jenderal memiliki akses langsung dengan Pimpinan kementerian/lembaga							
3	Inspektorat Jenderal memiliki akses langsung dengan Pimpinan kementerian/lembaga selain Ka Biro Keuangan							
4	Konflik kepentingan dalam penugasan audit internal tidak terjadi							
5	Auditor Inspektorat Jenderal mempunyai akses tidak terbatas pada seluruh Unit Kerja dan para pegawai Unit Kerja di Lingkungan kementerian/lembaga							

3. Hubungan Antara Auditor Internal dan Eksternal (BPK)

Pertanyaan		STS 1	TS 2	ATS 3	N 4	AS 5	S 6	SS 7
(Skala Pengukuran 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Agak Tidak Setuju, 4 = Netral, 5 = Agak Setuju, 6 = Setuju, dan 7 = Sangat Setuju)								
1	Auditor eksternal bersikap ramah dan mendukung auditor Inspektorat Jenderal							
2	Auditor eksternal memiliki sikap yang baik terhadap auditor Inspektorat Jenderal							
3	Auditor eksternal bersedia memberi kesempatan kepada Inspektorat							

Pertanyaan		STS 1	TS 2	ATS 3	N 4	AS 5	S 6	SS 7
(Skala Pengukuran 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Agak Tidak Setuju, 4 = Netral, 5 = Agak Setuju, 6 = Setuju, dan 7 = Sangat Setuju)								
	Jenderal untuk menjelaskan kepentingan mereka							
4	Auditor eksternal dan auditor Inspektorat Jenderal berkonsultasi mengenai hal-hal yang menjadi kepentingan bersama termasuk mengenai waktu kerja							
5	Auditor eksternal mendiskusikan rencana mereka dengan auditor Inspektorat Jenderal							
6	Auditor eksternal dan auditor Inspektorat Jenderal bertemu secara berkala							
7	Pimpinan kementerian/lembaga membantu mendukung terjalinnya hubungan antara auditor Inspektorat Jenderal dengan auditor eksternal.							

4. Dukungan Manajemen

Pertanyaan		STS 1	TS 2	ATS 3	N 4	AS 5	S 6	SS 7
(Skala Pengukuran 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Agak Tidak Setuju, 4 = Netral, 5 = Agak Setuju, 6 = Setuju, dan 7 = Sangat Setuju)								
1	Pimpinan kementerian/lembaga dilibatkan dalam rencana – rencana kegiatan audit intern tahunan Inspektorat Jenderal							
2	Pimpinan kementerian/lembaga memberi tanggapan terhadap laporan audit internal							
3	Inspektorat Jenderal mempunyai sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya							
4	Inspektorat Jenderal memiliki anggaran yang cukup untuk							

Pertanyaan		STS 1	TS 2	ATS 3	N 4	AS 5	S 6	SS 7
(Skala Pengukuran 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Agak Tidak Setuju, 4 = Netral, 5 = Agak Setuju, 6 = Setuju, dan 7 = Sangat Setuju)								
	menjalankan tugas dan tanggung jawabnya							

5. Efektivitas Audit Internal

Pertanyaan		STS 1	TS 2	ATS 3	N 4	AS 5	S 6	SS 7
(Skala Pengukuran 1 = Sangat Tidak Setuju, 2= Tidak Setuju, 3 = Agak Tidak Setuju, 4 = Netral, 5=Agak Setuju, 6 = Setuju, dan 7 = Sangat Setuju)								
1	Audit internal yang dilakukan Inspektorat Jenderal (Itjen) meningkatkan produktivitas kementerian							
2	Audit internal yang dilakukan Inspektorat Jenderal (Itjen) meningkatkan kinerja kementerian							
3	Auditor Inspektorat melakukan review/evaluasi terhadap kegiatan dan program audit untuk memastikan bahwa hasilnya konsisten dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan							
4	Auditor Inspektorat Jenderal melakukan review terhadap ketepatan dan keandalan laporan keuangan.							
5	Auditor Inspektorat Jenderal melakukan review terhadap kepatuhan atas kebijakan, rencana, prosedur dan peraturan yang ada							
6	Auditor Inspektorat melakukan review terhadap unit kerja atas keekonomisan, keefektifan dan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada							
7	Auditor Inspektorat melakukan review terhadap peralatan, metode dan sistem pengamanan asset unit kerja							

Pertanyaan		STS 1	TS 2	ATS 3	N 4	AS 5	S 6	SS 7
(Skala Pengukuran 1 = Sangat Tidak Setuju, 2= Tidak Setuju, 3 = Agak Tidak Setuju, 4 = Netral, 5=Agak Setuju, 6 = Setuju, dan 7 = Sangat Setuju)								
8	Auditor Inspektorat melakukan evaluasi dan membuat rekomendasi untuk meningkatkan sistem pengendalian internal jika diperlukan							
9	Inspektorat Jenderal mengembangkan rencana audit/pengawasan tahunan dengan baik							
10	Tindakan rutin diambil untuk mengimplementasikan rekomendasi dalam laporan hasil audit							
11	Inspektorat Jenderal menyediakan tindak lanjut yang memadai untuk memastikan tindakan koreksi telah dilakukan dan efektif							

6. Korupsi

Pertanyaan		STS 1	TS 2	ATS 3	N 4	AS 5	S 6	SS 7
(Skala Pengukuran 1 = Sangat Tidak Setuju, 2= Tidak Setuju, 3 = Agak Tidak Setuju, 4 = Netral, 5=Agak Setuju, 6 = Setuju, dan 7 = Sangat Setuju)								
1	Auditor Inspektorat Jenderal percaya bahwa peningkatan efektivitas fungsi audit/pengawasan internal dapat menurunkan tingkat benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa							
2	Auditor Inspektorat Jenderal percaya bahwa peningkatan efektivitas fungsi audit/pengawasan internal dapat menurunkan tingkat perbuatan curang dalam pengadaan barang dan jasa							
3	Auditor Inspektorat Jenderal percaya bahwa peningkatan efektivitas fungsi audit/pengawasan internal dapat menurunkan gratifikasi							

Pertanyaan		STS 1	TS 2	ATS 3	N 4	AS 5	S 6	SS 7
(Skala Pengukuran 1 = Sangat Tidak Setuju, 2= Tidak Setuju, 3 = Agak Tidak Setuju, 4 = Netral, 5=Agak Setuju, 6 = Setuju, dan 7 = Sangat Setuju)								
4	Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari tata kelola organisasi kementerian/lembaga, dapat membantu dalam memerangi korupsi							



Lampiran 3

Pilot Test

Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
DM.2 <- DM	0.809036	0.810231	0.031164	0.031164	25.960645
DM.4 <- DM	0.916223	0.917090	0.007940	0.007940	115.392204
DM.5 <- DM	0.889207	0.886940	0.019012	0.019012	46.770730
DM.6 <- DM	0.857610	0.857769	0.022726	0.022726	37.736821
EAI.1 <- EAI	0.804001	0.803687	0.027449	0.027449	29.291005
EAI.12 <- EAI	0.832805	0.833803	0.023104	0.023104	36.046263
EAI.13 <- EAI	0.846941	0.841793	0.025765	0.025765	32.871388
EAI.14 <- EAI	0.762981	0.765638	0.026610	0.026610	28.672455
EAI.15 <- EAI	0.811492	0.818113	0.018194	0.018194	44.602291
EAI.2 <- EAI	0.823224	0.823233	0.022191	0.022191	37.097762
EAI.3 <- EAI	0.865032	0.863271	0.020640	0.020640	41.910520
EAI.4 <- EAI	0.870864	0.867466	0.020863	0.020863	41.741504
EAI.5 <- EAI	0.842261	0.838109	0.026846	0.026846	31.373631

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
EAI.7 <- EAI	0.901343	0.898968	0.012959	0.012959	69.554403
EAI.9 <- EAI	0.879265	0.881383	0.015054	0.015054	58.409153
HA.1 <- HA	0.841533	0.827926	0.076586	0.076586	10.988138
HA.2 <- HA	0.787853	0.772585	0.083482	0.083482	9.437349
HA.3 <- HA	0.855035	0.848776	0.032251	0.032251	26.511955
HA.4 <- HA	0.830221	0.824262	0.029771	0.029771	27.886757
HA.5 <- HA	0.892958	0.888266	0.020603	0.020603	43.341996
HA.7 <- HA	0.809911	0.796065	0.052759	0.052759	15.351211
HA.9 <- HA	0.767347	0.755421	0.049677	0.049677	15.446612
IN.2 <- IN	0.943026	0.936552	0.019836	0.019836	47.539995
IN.3 <- IN	0.955982	0.957141	0.012207	0.012207	78.317454
IN.4 <- IN	0.827997	0.821245	0.039614	0.039614	20.901880
IN.5 <- IN	0.675843	0.652585	0.071747	0.071747	9.419823
IN.7 <- IN	0.734764	0.711661	0.068102	0.068102	10.789190

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
KO.1 <- KO	0.940893	0.707137	0.303532	0.303532	3.099816
KO.2 <- KO	0.833475	0.689352	0.241102	0.241102	3.456940
KO.3 <- KO	0.711338	0.660135	0.221277	0.221277	3.214699
KO.4 <- KO	0.795566	0.693797	0.212252	0.212252	3.748219
KO.5 <- KO	0.647559	0.642905	0.216953	0.216953	2.984787
KO.6 <- KO	0.694337	0.683129	0.226795	0.226795	3.061524
KO.8 <- KO	0.687760	0.679726	0.250971	0.250971	2.740393
KO.9 <- KO	0.680381	0.689754	0.259754	0.259754	2.619329
KOR.1 <- KOR	0.866954	0.861635	0.021563	0.021563	40.206056
KOR.2 <- KOR	0.926969	0.926886	0.007968	0.007968	116.336819
KOR.3 <- KOR	0.894610	0.890662	0.016190	0.016190	55.255903
KOR.8 <- KOR	0.730599	0.733770	0.032691	0.032691	22.348351

Cross Loadings

	DM	EAI	IN	HA	KO	KOR
DM.2	0.809036	0.342526	0.080160	0.282280	0.305316	0.493683
DM.4	0.916223	0.548214	-0.148479	0.280509	0.347621	0.512719
DM.5	0.889207	0.341340	-0.260001	0.310911	0.154979	0.214340
DM.6	0.857610	0.387930	-0.265603	0.422981	0.200088	0.404343
EAI.1	0.342052	0.804001	-0.250141	0.066212	0.233578	0.438006
EAI.12	0.261434	0.832805	-0.391528	0.226592	-0.024312	0.328685
EAI.13	0.309936	0.846941	-0.318401	0.205805	0.313221	0.428498
EAI.14	0.396326	0.762981	-0.341834	0.222656	0.231075	0.577686
EAI.15	0.509813	0.811492	-0.498478	0.328750	-0.053582	0.407158
EAI.2	0.424500	0.823224	-0.301044	0.243160	0.178282	0.336246
EAI.3	0.540601	0.865032	-0.304542	0.263489	0.233611	0.607692
EAI.4	0.369351	0.870864	-0.098454	0.133725	0.317760	0.638244
EAI.5	0.370270	0.842261	-0.242910	0.150055	0.228772	0.548887
EAI.7	0.414067	0.901343	-0.184974	0.227659	0.237658	0.646076
EAI.9	0.451958	0.879265	-0.331432	0.343466	0.055834	0.573757
HA.1	0.362823	0.181495	0.010989	0.841533	-0.059847	0.168781
HA.2	0.248540	0.082043	0.122429	0.787853	0.057567	0.056938
HA.3	0.253904	0.178088	-0.031647	0.855035	-0.128956	0.022433
HA.4	0.181593	0.305663	0.083857	0.830221	-0.062384	0.258097
HA.5	0.385903	0.261087	-0.134829	0.892958	-0.013305	0.281913
HA.7	0.275473	0.205534	-0.105966	0.809911	0.029313	0.267912
HA.9	0.457153	0.182595	0.126404	0.767347	0.169252	0.180302

	DM	EAI	IN	HA	KO	KOR
IN.2	-0.091929	-0.315784	0.943026	0.092309	0.202993	0.032498
IN.3	-0.258471	-0.438074	0.955982	-0.010371	0.125415	-0.106176
IN.4	-0.014305	-0.203149	0.827997	-0.046390	0.035331	-0.037648
IN.5	-0.041533	-0.034963	0.675843	0.079003	0.209519	-0.037380
IN.7	-0.200724	-0.151237	0.734764	-0.129466	-0.011043	-0.072703
KO.1	0.195783	0.206989	0.041211	-0.079891	0.940893	0.358554
KO.2	0.185119	0.086293	0.136543	-0.061584	0.833475	0.083607
KO.3	0.302476	0.039698	0.201838	0.124179	0.711338	0.284166
KO.4	0.360987	0.043002	0.126215	0.001441	0.795566	0.266519
KO.5	0.007008	-0.039775	0.035837	-0.038878	0.647559	0.242027
KO.6	0.171020	0.007282	-0.098135	-0.021719	0.694337	0.084477
KO.8	-0.066636	-0.029738	-0.003920	-0.211059	0.687760	0.044988
KO.9	0.216569	-0.032175	-0.083545	-0.181137	0.680381	-0.007957
KOR.1	0.505030	0.379965	0.125057	0.154677	0.336949	0.866954
KOR.2	0.527511	0.655731	-0.176499	0.218640	0.275517	0.926969
KOR.3	0.363577	0.567270	-0.092316	0.162506	0.468160	0.894610
KOR.8	0.233099	0.422663	0.056606	0.301595	0.108201	0.730599

Overview

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha	Communality	Redundancy
DM	0.755047	0.924833		0.892439	0.755047	
EAI	0.707024	0.963628	0.341405	0.958440	0.707024	0.144087

IN	0.697084	0.918721		0.903544	0.697084	
HA	0.684485	0.938088		0.925568	0.684485	
KO	0.569532	0.912461		0.946728	0.569528	
KOR	0.736246	0.917224	0.375683	0.879110	0.736246	0.260803



LAMPIRAN 4

Analisis Deskriptif

Variabel Kompetensi Auditor

Statistics

		KO.1	KO.2	KO.3	KO.4	KO.5	KO.6	KO.7	KO.8
N	Valid	152	152	152	152	152	152	152	152
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		5,8487	6,0855	6,3684	6,4408	5,3684	5,8750	5,7829	5,9211
Std. Deviation		,89709	,75419	,57179	,63802	1,57667	,91574	,81312	,76795
Minimum		2,00	3,00	5,00	4,00	1,00	1,00	3,00	2,00
Maximum		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

KO.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	,7	,7	,7
	ATS	5	3,3	3,3	3,9
	N	3	2,0	2,0	5,9
	AS	25	16,4	16,4	22,4
	S	91	59,9	59,9	82,2
	SS	27	17,8	17,8	100,0
	Total	152	100,0	100,0	

KO.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ATS	3	2,0	2,0	2,0
	N	3	2,0	2,0	3,9
	AS	10	6,6	6,6	10,5
	S	98	64,5	64,5	75,0
	SS	38	25,0	25,0	100,0
	Total	152	100,0	100,0	

KO.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	AS	7	4,6	4,6	4,6
	S	82	53,9	53,9	58,6
	SS	63	41,4	41,4	100,0
	Total	152	100,0	100,0	

KO.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	2	1,3	1,3	1,3
	AS	6	3,9	3,9	5,3
	S	67	44,1	44,1	49,3
	SS	77	50,7	50,7	100,0
	Total	152	100,0	100,0	

KO.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	6	3,9	3,9	3,9
	TS	6	3,9	3,9	7,9
	ATS	15	9,9	9,9	17,8
	N	4	2,6	2,6	20,4
	AS	14	9,2	9,2	29,6
	S	82	53,9	53,9	83,6
	SS	25	16,4	16,4	100,0
	Total	152	100,0	100,0	

KO.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	,7	,7	,7
	ATS	4	2,6	2,6	3,3
	N	5	3,3	3,3	6,6
	AS	20	13,2	13,2	19,7
	S	94	61,8	61,8	81,6
	SS	28	18,4	18,4	100,0
	Total	152	100,0	100,0	

KO.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ATS	4	2,6	2,6	2,6
	N	4	2,6	2,6	5,3
	AS	34	22,4	22,4	27,6
	S	89	58,6	58,6	86,2
	SS	21	13,8	13,8	100,0
	Total	152	100,0	100,0	

KO.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	,7	,7	,7
	ATS	2	1,3	1,3	2,0
	N	3	2,0	2,0	3,9
	AS	20	13,2	13,2	17,1
	S	102	67,1	67,1	84,2
	SS	24	15,8	15,8	100,0
	Total	152	100,0	100,0	

Variabel Independensi Organisasi

Statistics

		IN.1	IN.2	IN.3	IN.4	IN.5
N	Valid	152	152	152	152	152
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		6,2697	6,1513	6,0000	5,1776	5,3158
Std. Deviation		,60866	,82799	,96289	1,46075	1,59644
Minimum		5,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Maximum		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

IN.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	AS	13	8,6	8,6	8,6
	S	85	55,9	55,9	64,5
	SS	54	35,5	35,5	100,0
	Total	152	100,0	100,0	

IN.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	,7	,7	,7
	ATS	1	,7	,7	1,3
	N	4	2,6	2,6	3,9
	AS	9	5,9	5,9	9,9
	S	89	58,6	58,6	68,4
	SS	48	31,6	31,6	100,0
	Total	152	100,0	100,0	

IN.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	,7	,7	,7
	TS	1	,7	,7	1,3
	ATS	3	2,0	2,0	3,3
	N	5	3,3	3,3	6,6
	AS	12	7,9	7,9	14,5
	S	90	59,2	59,2	73,7
	SS	40	26,3	26,3	100,0
	Total	152	100,0	100,0	

IN.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	2,0	2,0	2,0
	TS	7	4,6	4,6	6,6
	ATS	13	8,6	8,6	15,1
	N	16	10,5	10,5	25,7
	AS	34	22,4	22,4	48,0
	S	56	36,8	36,8	84,9
	SS	23	15,1	15,1	100,0
	Total	152	100,0	100,0	

IN.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	5	3,3	3,3	3,3
	TS	11	7,2	7,2	10,5
	ATS	9	5,9	5,9	16,4
	N	6	3,9	3,9	20,4
	AS	23	15,1	15,1	35,5
	S	71	46,7	46,7	82,2
	SS	27	17,8	17,8	100,0
	Total	152	100,0	100,0	

Variabel Hubungan Antara Auditor Internal dan Eksternal

Statistics

		HA.1	HA.2	HA.3	HA.4	HA.5	HA.6	HA.7
N	Valid	152	152	152	152	152	152	152
	Missing	0	0	0	0	0	0	0
Mean		5,0132	5,2368	5,0461	5,0329	4,8158	4,3487	5,4145
Std. Deviation		1,34207	1,07800	1,37787	1,34911	1,43014	1,45238	1,33443
Minimum		1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Maximum		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

HA.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	,7	,7	,7
	TS	4	2,6	2,6	3,3
	ATS	20	13,2	13,2	16,4
	N	25	16,4	16,4	32,9
	AS	35	23,0	23,0	55,9
	S	51	33,6	33,6	89,5
	SS	16	10,5	10,5	100,0
	Total	152	100,0	100,0	

HA.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	4	2,6	2,6	2,6
	ATS	4	2,6	2,6	5,3
	N	28	18,4	18,4	23,7
	AS	42	27,6	27,6	51,3
	S	64	42,1	42,1	93,4
	SS	10	6,6	6,6	100,0
	Total	152	100,0	100,0	

HA.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	3	2,0	2,0	2,0
	TS	7	4,6	4,6	6,6
	ATS	14	9,2	9,2	15,8
	N	14	9,2	9,2	25,0
	AS	44	28,9	28,9	53,9
	S	58	38,2	38,2	92,1
	SS	12	7,9	7,9	100,0
	Total	152	100,0	100,0	

HA.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	2	1,3	1,3	1,3
	TS	5	3,3	3,3	4,6
	ATS	19	12,5	12,5	17,1
	N	16	10,5	10,5	27,6
	AS	40	26,3	26,3	53,9
	S	58	38,2	38,2	92,1
	SS	12	7,9	7,9	100,0
	Total	152	100,0	100,0	

HA.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	4	2,6	2,6	2,6
	TS	7	4,6	4,6	7,2
	ATS	18	11,8	11,8	19,1
	N	24	15,8	15,8	34,9
	AS	41	27,0	27,0	61,8
	S	47	30,9	30,9	92,8
	SS	11	7,2	7,2	100,0
	Total	152	100,0	100,0	

HA.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	6	3,9	3,9	3,9
	TS	6	3,9	3,9	7,9
	ATS	37	24,3	24,3	32,2
	N	26	17,1	17,1	49,3
	AS	42	27,6	27,6	77,0
	S	27	17,8	17,8	94,7
	SS	8	5,3	5,3	100,0
	Total	152	100,0	100,0	

HA.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	,7	,7	,7
	TS	7	4,6	4,6	5,3
	ATS	6	3,9	3,9	9,2
	N	20	13,2	13,2	22,4
	AS	24	15,8	15,8	38,2
	S	68	44,7	44,7	82,9
	SS	26	17,1	17,1	100,0
	Total	152	100,0	100,0	

Variabel Dukungan Manajemen

Statistics

		DM.1	DM.2	DM.3	DM.4
N	Valid	152	152	152	152
	Missing	0	0	0	0
Mean		5,7039	5,9605	5,1382	4,5921
Std. Deviation		1,02187	,87558	1,62778	1,80270
Minimum		1,00	1,00	1,00	1,00
Maximum		7,00	7,00	7,00	7,00

DM.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	,7	,7	,7
	TS	1	,7	,7	1,3
	ATS	4	2,6	2,6	3,9
	N	13	8,6	8,6	12,5
	AS	20	13,2	13,2	25,7
	S	91	59,9	59,9	85,5
	SS	22	14,5	14,5	100,0
	Total	152	100,0	100,0	

DM.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	,7	,7	,7
	TS	1	,7	,7	1,3
	ATS	2	1,3	1,3	2,6
	N	5	3,3	3,3	5,9
	AS	9	5,9	5,9	11,8
	S	106	69,7	69,7	81,6
	SS	28	18,4	18,4	100,0
	Total	152	100,0	100,0	

DM.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	5	3,3	3,3	3,3
	TS	12	7,9	7,9	11,2
	ATS	15	9,9	9,9	21,1
	N	6	3,9	3,9	25,0
	AS	19	12,5	12,5	37,5
	S	77	50,7	50,7	88,2
	SS	18	11,8	11,8	100,0
	Total	152	100,0	100,0	

DM.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	10	6,6	6,6	6,6
	TS	16	10,5	10,5	17,1
	ATS	21	13,8	13,8	30,9
	N	15	9,9	9,9	40,8
	AS	22	14,5	14,5	55,3
	S	53	34,9	34,9	90,1
	SS	15	9,9	9,9	100,0
	Total	152	100,0	100,0	

Variabel Efektivitas Audit Internal

Statistics

	EAI.1	EAI.2	EAI.3	EAI.4	EAI.5	EAI.6	EAI.7	EAI.8	EAI.9	EAI.10	EAI.11
N Valid	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152
Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean	6,1118	6,2039	6,1184	6,1842	6,1250	6,0526	5,8553	6,1250	5,8158	5,9145	5,9737
Std. Deviation	,71455	,67440	,61906	,67521	,74862	,88242	,89449	,74862	1,04483	,86080	,80518
Minimum	3,00	3,00	4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	3,00	3,00
Maximum	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

EAI.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ATS	1	,7	,7	,7
	N	2	1,3	1,3	2,0
	AS	19	12,5	12,5	14,5
	S	87	57,2	57,2	71,7
	SS	43	28,3	28,3	100,0
	Total	152	100,0	100,0	

EAI.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ATS	1	,7	,7	,7
	N	1	,7	,7	1,3
	AS	13	8,6	8,6	9,9
	S	88	57,9	57,9	67,8
	SS	49	32,2	32,2	100,0
	Total	152	100,0	100,0	

EAI.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	3	2,0	2,0	2,0
	AS	12	7,9	7,9	9,9
	S	101	66,4	66,4	76,3
	SS	36	23,7	23,7	100,0
	Total	152	100,0	100,0	

EAI.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	,7	,7	,7
	N	1	,7	,7	1,3
	AS	10	6,6	6,6	7,9
	S	96	63,2	63,2	71,1
	SS	44	28,9	28,9	100,0
	Total	152	100,0	100,0	

EAI.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	,7	,7	,7
	ATS	1	,7	,7	1,3
	N	2	1,3	1,3	2,6
	AS	12	7,9	7,9	10,5
	S	94	61,8	61,8	72,4
	SS	42	27,6	27,6	100,0
	Total	152	100,0	100,0	

EAI.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	,7	,7	,7
	ATS	5	3,3	3,3	3,9
	N	1	,7	,7	4,6
	AS	12	7,9	7,9	12,5
	S	92	60,5	60,5	73,0
	SS	41	27,0	27,0	100,0
	Total	152	100,0	100,0	

EAI.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	,7	,7	,7
	ATS	3	2,0	2,0	2,6
	N	7	4,6	4,6	7,2
	AS	24	15,8	15,8	23,0
	S	88	57,9	57,9	80,9
	SS	29	19,1	19,1	100,0
	Total	152	100,0	100,0	

EAI.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	TS	1	,7	,7	,7
	ATS	1	,7	,7	1,3
	N	1	,7	,7	2,0
	AS	15	9,9	9,9	11,8
	S	91	59,9	59,9	71,7
	SS	43	28,3	28,3	100,0
	Total	152	100,0	100,0	

EAI.9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	,7	,7	,7
	TS	2	1,3	1,3	2,0
	ATS	6	3,9	3,9	5,9
	N	3	2,0	2,0	7,9
	AS	19	12,5	12,5	20,4
	S	93	61,2	61,2	81,6
	SS	28	18,4	18,4	100,0
	Total	152	100,0	100,0	

EAI.10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ATS	3	2,0	2,0	2,0
	N	8	5,3	5,3	7,2
	AS	21	13,8	13,8	21,1
	S	87	57,2	57,2	78,3
	SS	33	21,7	21,7	100,0
	Total	152	100,0	100,0	

EAI.11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ATS	2	1,3	1,3	1,3
	N	4	2,6	2,6	3,9
	AS	27	17,8	17,8	21,7
	S	82	53,9	53,9	75,7
	SS	37	24,3	24,3	100,0
	Total	152	100,0	100,0	

Variabel Korupsi

Statistics

		KOR.1	KOR.2	KOR.3	KOR.4
N	Valid	152	152	152	152
	Missing	0	0	0	0
Mean		6,2895	6,3026	6,2697	6,4276
Std. Deviation		,66742	,62018	,65073	,58232
Minimum		4,00	4,00	4,00	4,00
Maximum		7,00	7,00	7,00	7,00

KOR.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	1	,7	,7	,7
	ATS	15	9,9	9,9	10,5
	TS	75	49,3	49,3	59,9
	STS	61	40,1	40,1	100,0
	Total	152	100,0	100,0	

KOR.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	2	1,3	1,3	1,3
	ATS	7	4,6	4,6	5,9
	TS	86	56,6	56,6	62,5
	STS	57	37,5	37,5	100,0
	Total	152	100,0	100,0	

KOR.3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	1	,7	,7	,7
	ATS	14	9,2	9,2	9,9
	TS	80	52,6	52,6	62,5
	STS	57	37,5	37,5	100,0
	Total	152	100,0	100,0	

KOR.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	N	1	,7	,7	,7
	ATS	4	2,6	2,6	3,3
	TS	76	50,0	50,0	53,3
	STS	71	46,7	46,7	100,0
	Total	152	100,0	100,0	

Lampiran 5.

Analisis PLS

Outer Loadings (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
DM.1 <- DM	0.893950	0.886347	0.043856	0.043856	20.383544
DM.2 <- DM	0.824050	0.828599	0.054406	0.054406	15.146401
EAI.1 <- EAI	0.729552	0.727785	0.042201	0.042201	17.287498
EAI.10 <- EAI	0.745768	0.748133	0.043537	0.043537	17.129324
EAI.11 <- EAI	0.730383	0.733372	0.027360	0.027360	26.694876
EAI.2 <- EAI	0.825929	0.826195	0.025649	0.025649	32.201008
EAI.3 <- EAI	0.768416	0.770295	0.034121	0.034121	22.520434
EAI.4 <- EAI	0.710695	0.718155	0.032291	0.032291	22.009399
EAI.5 <- EAI	0.813446	0.809758	0.035398	0.035398	22.979691
EAI.6 <- EAI	0.732853	0.713298	0.081853	0.081853	8.953267
EAI.7 <- EAI	0.717173	0.717814	0.059538	0.059538	12.045567
EAI.8 <- EAI	0.679210	0.692944	0.040869	0.040869	16.619300
EAI.9 <- EAI	0.628048	0.640427	0.091383	0.091383	6.872680
HA.1 <- HA	0.711022	0.699180	0.052519	0.052519	13.538423
HA.2 <- HA	0.711389	0.706121	0.055281	0.055281	12.868600

HA.3 <- HA	0.869769	0.870594	0.017195	0.017195	50.582346
HA.4 <- HA	0.815350	0.809714	0.036820	0.036820	22.143980
HA.5 <- HA	0.787949	0.784861	0.052368	0.052368	15.046277
HA.6 <- HA	0.799377	0.798173	0.038043	0.038043	21.012543
HA.7 <- HA	0.721178	0.722983	0.041687	0.041687	17.299690
IN.2 <- IN	0.700988	0.674761	0.094306	0.094306	7.433104
IN.3 <- IN	0.696508	0.665160	0.118330	0.118330	5.886169
IN.4 <- IN	0.821134	0.820884	0.054069	0.054069	15.186812
IN.5 <- IN	0.844432	0.844213	0.044594	0.044594	18.936204
KO.1 <- KO	0.761353	0.762929	0.044942	0.044942	16.940669
KO.6 <- KO	0.715040	0.724344	0.102846	0.102846	6.952504
KO.7 <- KO	0.733227	0.743454	0.054654	0.054654	13.415811
KO.8 <- KO	0.786855	0.774542	0.055882	0.055882	14.080686
KOR.1 <- KOR	0.852732	0.851301	0.026471	0.026471	32.213589
KOR.2 <- KOR	0.894463	0.898216	0.024692	0.024692	36.224068
KOR.3 <- KOR	0.918247	0.918807	0.015999	0.015999	57.393095
KOR.4 <- KOR	0.775815	0.779199	0.032391	0.032391	23.951815

Overview

	AVE	Composite Reliability	R Square	Cronbachs Alpha	Communality	Redundancy
DM	0.739102	0.849770		0.651168	0.739102	
EAI	0.542587	0.928470	0.656757	0.914867	0.542587	0.076148
HA	0.601841	0.913230		0.888970	0.601841	
IN	0.590958	0.851507		0.789233	0.590958	
KO	0.561926	0.836709		0.740758	0.561926	
KOR	0.743071	0.920146	0.310789	0.883012	0.743071	0.230265

Cross Loadings

	DM	EAI	HA	IN	KO	KOR
DM.1	0.893950	0.425617	0.294240	0.156158	0.321541	-0.133558
DM.2	0.824050	0.336702	0.164119	0.150238	0.238849	-0.127965
EAI.1	0.303980	0.729552	0.558905	0.279628	0.359046	-0.490467
EAI.10	0.337506	0.745768	0.512427	0.239410	0.425300	-0.372734
EAI.11	0.259844	0.730383	0.532413	0.343708	0.346185	-0.450496
EAI.2	0.417011	0.825929	0.649815	0.260390	0.464908	-0.487611

EAI.3	0.385944	0.768416	0.527157	0.259292	0.407158	-0.498642
EAI.4	0.249823	0.710695	0.500576	0.368806	0.400466	-0.356791
EAI.5	0.370985	0.813446	0.540330	0.280585	0.539194	-0.384067
EAI.6	0.332435	0.732853	0.518761	0.248603	0.408261	-0.353939
EAI.7	0.294901	0.717173	0.506620	0.249379	0.386110	-0.441999
EAI.8	0.298613	0.679210	0.497542	0.361760	0.395223	-0.375361
EAI.9	0.359592	0.628048	0.489352	0.278806	0.511997	-0.263244
HA.1	0.136888	0.452501	0.711022	0.136888	0.372689	-0.302805
HA.2	0.141390	0.451056	0.711389	0.145423	0.377698	-0.365879
HA.3	0.261044	0.660969	0.869769	0.304090	0.417073	-0.478413
HA.4	0.272188	0.636135	0.815350	0.203059	0.372661	-0.328570
HA.5	0.246028	0.581014	0.787949	0.203985	0.371876	-0.418134
HA.6	0.169231	0.562764	0.799377	0.184062	0.406536	-0.372326
HA.7	0.227249	0.533764	0.721178	0.179005	0.285925	-0.399663
IN.2	0.037556	0.168060	0.084538	0.700988	0.083772	-0.141493
IN.3	0.079384	0.202208	0.091542	0.696508	0.115302	-0.139659
IN.4	0.206369	0.351504	0.232612	0.821134	0.183883	-0.217075
IN.5	0.156666	0.381885	0.283254	0.844432	0.260941	-0.255239
KO.1	0.148325	0.450489	0.335466	0.163499	0.761353	-0.201056
KO.6	0.382792	0.447865	0.389721	0.237872	0.715040	-0.221910

KO.7	0.175060	0.352619	0.331197	0.186386	0.733227	-0.148510
KO.8	0.269674	0.449062	0.373362	0.110813	0.786855	-0.239948
KOR.1	-0.145056	-0.478898	-0.401221	-0.252051	-0.248900	0.852732
KOR.2	-0.147598	-0.487311	-0.471311	-0.206788	-0.249811	0.894463
KOR.3	-0.134424	-0.492639	-0.445626	-0.196706	-0.240460	0.918247
KOR.4	-0.094686	-0.461409	-0.377755	-0.240911	-0.205601	0.775815

Path Coefficients (Mean, STDEV, T-Values)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	Standard Error (STERR)	T Statistics (O/STERR)
DM -> EAI	0.203219	0.193575	0.050682	0.050682	4.009690
EAI -> KOR	-0.557485	-0.566893	0.045651	0.045651	12.211845
HA -> EAI	0.519690	0.514394	0.040862	0.040862	12.718032
IN -> EAI	0.169709	0.181812	0.052571	0.052571	3.228169
KO -> EAI	0.216998	0.216321	0.045246	0.045246	4.795979